

Edisi 31 ■ Rp 21.000 Luar Jabotabek Rp 22.500

TokohINDONESIA®

THE EXCELLENT BIOGRAPHY

**JANGAN
HILANGKAN
JATI DIRI
TNI**

**TNI HARUS
'MELEK'
POLITIK**

Budi Harsono

PEJUANG BERJIWA IKHLAS



TokohINDONESIA Majalah Biografi Pertama dan Satu-satunya di Indonesia

The Excellent Biography

www.tokohindonesia.com

THE EXPERIENCE SITE



TOKOH UTAMA:
■ Letjen TNI (Purn) Budi Harsono Pejuang Berjiwa Ikhlas: Politikus Partai Golkar dan anggota DPR-RI (2004-2009) ini memiliki latar belakang militer dengan pangkat Letnan Jenderal (Letjen) TNI. Kendati demikian, bila disimak dari cara bertuturnya yang lemah-lembut, perawakannya yang mungil, serta sikapnya yang rendah hati di hadapan orang lain, tidak tampak sama sekali sosok 'keras' seorang jenderal penyandang bintang tiga. 6

KISAH HIDUP

■ Bekerja Ikhlas, Tuhan Menjaga Rezeki Kita Hidup ini mengalir saja seperti sifat air. Apa adanya. Keikhlasan dalam bekerja, berbuat dan menjalankan setiap amanah yang diberikan. 32
■ Meniti Karier Militer dengan Ikhlas



Menunaikan tugas yang diamanatkan kepada dirinya dengan sikap penuh ikhlas, dan meyakini adanya tangan Tuhan di balik setiap tanggung jawab yang diserahkan kepadanya, adalah etos seorang Budi Harsono dalam mengabdikan diri di dunia ketenteraan selama 35 tahun. 28

■ Fraksi TNI/Polri Jembatan Penghubung Lintaskepentingan

Dulu, Fraksi TNI/Polri memiliki peranan penting dalam menjembatani setiap konflik kepentingan politik partisan yang berkembang di DPR. Kini, tidak ada lagi yang mampu berperanan demikian. 10

■ Ada Spirit yang Hilang di DPR

Jalan musyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah yang senantiasa dikedepankan oleh Fraksi TNI/Polri seharusnya tidak hilang di dunia parlemen Indonesia. 14



■ Terbanyak Belum Tentu Terbaik 17

■ Pimpin F-TNI/Polri di Masa Kritis

Pada akhir 2001, ketika terjadi konflik politik antara Presiden Abdurrahman Wahid di satu pihak dan mayoritas fraksi di DPR di lain pihak dengan menggelar Sidang Istimewa MPR, sehingga akhirnya tampuk pemerintah diserahkan kepada (Wakil Presiden RI, saat itu) Megawati Soekarnoputri, Fraksi TNI/Polri mampu memosisikan diri secara tepat dan efektif. 18

■ Mengabdikan Melalui Partai Golkar

Karena pertimbangan historis dan ideologis, Budi Harsono menerima ajakan Akbar Tandjung bergabung ke Partai Golkar. Dia pun menyambut kepercayaan dan tanggung jawab sebagai Sekjen Partai Golkar. 23

■ Dari Teritorial ke Pentas Politik

Selama 35 tahun berkarier di militer, sebagian besar tugas Budi Harsono dihabiskan di bidang teritorial (1967-2002). Tugas sebagai Kasdim, Dandim, Kasrem, Danrem, Aster, hingga Assospol pernah dijalani Budi. 26

KAPUR SIRIH: Politisi Abdi Negara 4

SURAT: Terjadi di BNI 4

WAWANCARA



■ Jangan Hilangkan Jati Diri TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak lahir secara tiba-tiba di saat negara ini sudah mapan. Secara historis, cikal-bakal TNI adalah sebagian rakyat bersenjata yang berjuang mengorbankan jiwa dan raganya mengusir penjajah. Keniscayaan sejarah TNI itu yang tidak boleh hilang. Sebab, itulah jati diri TNI. 46

■ Tugas Dekatkan Diri kepada Tuhan 28

■ Masa Kecil, Remaja, dan Dewasa

Berasal dari keluarga berekonomi pas-pasan, dan sebagai anak tertua dari sembilan bersaudara, Budi Harsono meraih kesuksesan hidup dengan keber-sahaajaan. 34

■ Teladan bagi Keluarga

Keteladanan sikap dan harmoni dalam keluarga adalah dua hal yang ditonjolkan oleh Budi Harsono selaku kepala rumah tangga. 38

■ Terapkan Disiplin Batin 39

■ Sosok Budi di Mata Mut Indayah

"Pengalah dan Tidak Suka Konflik" 40

■ Kesadaran Bernegara dan Bela Negara Mulai Hilang. "Jangan tanyakan apa yang dapat negara berikan kepadamu, tetapi tanyalah apa yang sudah Anda berikan kepada negara." 42

■ Netralitas TNI

Sebagai institusi, TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Namun, para perwira TNI harus melek politik agar tahu keadaan dan tidak mudah diperalat oleh pihak-pihak dari luar TNI. 44

COVER: Esero Design
FOTO: Ricky L Photo Studio



■ MAJALAH TOKOH INDONESIA, Majalah biografi pertama di Indonesia ■ **EDISI CETAK:** PLASA WEB **WWW.TOKOHINDONESIA.COM**
 - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA ■ **SERTIFIKAT MEREK:** Ditjen HAKI Departemen Hukum dan HAM Agno: D00-02-2395 ■ **PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI:** Ch Robin Simanullang ■ **REDAKTUR EKSEKUTIF:** Mangatur Lorieicide Paniroy ■ **SENIOR WRITER:** H Syahbuddin Hamzah ■ **SEKRETARIS REDAKSI:** Marjuka Situmorang ■ **SIDANG REDAKSI:** Haposan Tampubolon, Anis Fuadi, Anna Fauzia, Samsuri, Tian Son Lang, Suryo Pranoto, Retno Handayani, Christian Natamado, Dean Lawrence Rompis ■ **KONTRIBUTOR:** Dandy Hendrias, Henry Maruwas, Heru B Utomo, Saut Situmorang, Yoellani Desianna Somali, Yusak HS, Yayat Suryatna, Tahi Purba (Medan), Benhard Sihite (Purwakarta), Richard Susilo (Tokyo)
 ■ **FOTOGRAFER:** Ricky Harjadi, Wilson Edward ■ **TATA GRAFIS:** ESERO Design ■ **LIPUTAN, RISET DAN PUSAT DATA:** In Headnews (The Indonesia Headnews) ■ **PEMIMPIN PERUSAHAAN:** Mangatur Lorieicide Paniroy ■ **MANAJER KEUANGAN:** Adur Nursinta Purba ■ **SEKRETARIS:** Herni Dewi Farida ■ **IKLAN:** Doan Adikara Pudan, Watty Soetikno ■ **DISTRIBUSI:** Kedarton Harijana ■ **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:** Jalan Bukit Duri Tanjakan IX No.26, Tebet, Jakarta 12840 ■ **Po Box 4042 JKTJ 13040** ■ **TELEPON (021) 83701736 - 9101871 - 70930474** ■ **FAX:** (021) 9101871 ■ **SMS 0812-949-1043** ■ **E-MAIL:** redaksi@tokohindonesia.com - iklan@tokohindonesia.com - sirkulasi@tokohindonesia.com ■ **WEBSITE:** www.tokohindonesia.com - www.tokohindonesia.co.id - www.tokohnasional.com - www.ensiklopedi.com - www.tokoh.net - www.e-ti.com - www.indonesianfamous.com ■ **WEB MAINTENANCE:** cv Esero Teknologi Informasi ■ **PERCETAKAN:** pt Gramedia ■ **PENERBIT:** pt Citraprinsip Publisitas Indoaprint ■ **REKENING:** Bank Niaga Supomo Jakarta No.025.01.24000.00.8 ■ **TARIF IKLAN:** Cover Rp20.000.000, Isi Rp12.500.000/halaman ■ **HARGA:** Rp21.000 (Luar Jabotabek Rp22.500) ■ **Langganan Rp160.000 (12 Edisi).**

Politisi Abdi Negara

Terjadi di BNI

Kepada semua tokoh yang ahli dalam SDM, apakah suatu ketentuan PGS (Pengganti Sementara) pada suatu unit kerja pantas dan wajar diberlakukan 5 tahun (60 bulan) tidak terputus sejak tahun 2000 s/d 2005 dan tidak terjangkau pada sistem management yaitu span of controll hal ini terjadi di Bank BNI.

ML Parede (DKI Jakarta)
mlparede@yahoo.cpm

Informasi KIB

Terimakasih atas informasi tentang Kabinet Indonesia Bersatu. Saya dapat menggunakannya untuk kepentingan menyelesaikan tugas sekolah anak saya.

Vic Sugiyanto (Jawa Tengah)
buayamuara@yahoo.co.id

Siapa Donatur TI

Design halamannya bagus banget, isinya berbobot dan dikerjakan secara profesional. Ngomong-ngomong siapa sih tokoh yang menjadi donatur situs ini?

Anton (DKI Jakarta)
anton6789@yahui.com

Tokoh Panutan

Sangat menarik artikel seperti ini. Untuk mengenali tokoh-tokoh panutan di jamannya, yang sangat mungkin bisa memotifasi generasi muda untuk berbuat yang terbaik bagi bangsanya.

Harisubagio (Bali)
harisubagio@conradbali.com

Homepage TNI

Saya sangat bangga adanya homepage daripada TNI sehingga para muda-mudi dapat mengetahui seberapa jauh perkembangan TNI. Dan saya berpesan kepada Kepala Staf TNI AL, TNI AU, TNI AD, dan Polri, junjung tinggi sumpah prajurit demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Agus Merta Suryasa (Jatim)
Agus_Suryasa@plasa.com

Fans Bob Sadino

Saya sangat *nefans* dengan bapak Bob Sadino karena mempunyai jiwa & mental yang pantut dicontoh oleh semua manusia. Bapak Bob tidak pernah putus asa dalam menjalani hidupnya dari nol hingga sukses. Bapak Bob adalah insprasi dalam hidup saya

Ima (DKI Jakarta)
dhevut_quet@yahoo.co.id

Bagaimana bila seorang militer (jenderal) melanjutkan pengabdian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Pertanyaan ini menjadi sangat relevan ketika pada era reformasi ini bergema seruan yang melarang militer berpolitik (politik praktis baik di partai, parlemen juga eksekutif). Sejak Pemilu 2004, institusi militer tidak lagi memiliki wakil (Fraksi TNI/Polri) di lembaga legislatif.

Hal ini, sesungguhnya bermaksud baik. Sebab pengalaman masa lalu, kala militer menguasai panggung politik negeri ini, instink politik militer untuk mempertahankan kekuasaan telah memacetkan peranan institusi politik sipil dalam proses kepemimpinan daerah dan nasional. Sistem komando yang dianut militer seringkali mendistrorsi mekanisme penyerapan aspirasi rakyat dari bawah.

Namun setelah reformasi bergulir delapan tahun, timbul pula ekses dari ketiadaan Fraksi TNI/Polri di parlemen. Yakni munculnya sosok dan kelompok politisi yang lebih menonjolkan kepentingan kelompoknya. Pada saat munculnya tuntutan-tuntutan sektarian seperti itu, sepertinya terasa ada sesuatu yang hilang di parlemen.

Dalam situasi seperti ini, kenangan terhadap Fraksi TNI/Polri bisa muncul. Terlepas dari sistem komando militer yang berpotensi menjalankan politik demi kelanggengan kekuasaan, ternyata para *politisi militer* (anggota Fraksi TNI/Polri) lebih memiliki bekal sebagai abdi negara. Peran anggota parlemen sebagai abdi negara inilah yang paling terasa hilang saat ini.

Jika disimak, paling tidak ada tiga hakikat keanggotaan DPR (legislatif). *Pertama*, sebagai wakil rakyat, dipilih rakyat menjadi kepanjangan tangan rakyat, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. *Kedua*, sebagai politisi, mewakili partai politik yang merupakan institusi inti sistim demokrasi untuk menampung, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. *Ketiga*, sebagai abdi negara, putera-puteri bangsa yang mengabdikan diri secara ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan diri sendiri dan golongannya saja.

Para anggota parlemen, bisa mengukur diri dalam takaran ketiga hakekat keanggotaan parlemen itu. Mungkin saja peranan para anggota dewan saat ini sebagai wakil rakyat (dipilih rakyat) dan sebagai politisi (mewakili partai) jauh lebih menonjol dari sebelumnya. Namun sebagai abdi negara, masih patut belajar dari para *politisi militer* masa lalu.

Hal ini pulalah menjadi salah satu yang digelisahkan **Letnan Jenderal TNI (Purn) Budi Harsono**, Anggota DPR dari Partai Golkar. Mantan Ketua Fraksi TNI/Polri, ini mengkritisi kesadaran bernegara dan bela negara yang dinilainya semakin terkikis dari jiwa warga negara, termasuk anggota parlemen, dewasa ini.

Dia amat prihatin menyaksikan potret manusia Indonesia yang terlalu bermental materialistis dan individualistis. Mantan Sekjen Partai Golkar ini mengingatkan, kesadaran bernegara dan kerelaan berkorban demi negara seharusnya bukan hanya dimiliki seorang militer tapi juga dimiliki segenap warga negara Indonesia, apalagi anggota parlemen.

Jadilah politisi abdi negara.

Redaksi



Tokoh INDONESIA

LETJEN TNI (PURN)
BUDI HARSONO

PEJUANG BERJIWA IKHLAS



BUDI HARSONO DAN ISTERI ■ mti/dok

Tapi, Budi Harsono akan menunjukkan kalibernya sebagai seorang pejuang bangsa dan negara yang sejati manakala mengkritisi kesadaran bernegara dan bela negara, yang dinilainya sudah semakin terkikis dari jiwa warga negara Indonesia, dewasa ini.

Pria yang memiliki falsafah hidup: "Bekerja dengan ikhlas, Tuhan akan Menjaga Rezeki" ini mengaku

Oleh Anis Fuadi

Wartawan Tokoh Indonesia

Politikus Partai Golkar dan anggota DPR-RI (2004-2009) ini memiliki latar belakang militer dengan pangkat Letnan Jenderal (Letjen) TNI. Kendati demikian, bila disimak dari cara bertuturnya yang lemah-lembut, perawakannya yang mungil, serta sikapnya yang rendah hati di hadapan orang lain, tidak tampak sama sekali sosok 'keras' seorang jenderal penyandang bintang tiga.

amat prihatin menyaksikan potret manusia Indonesia yang terlalu menghambakan diri pada mental materialistis-individualistis.

Budi yang kini ditugaskan Fraksi Partai Golkar di Komisi VII (bidang Energi dan Sumber Daya Mineral) DPR ini mengingatkan, kesadaran bernegara dan kesediaan serta kerelaan berkorban untuk negara seharusnya bukan hanya dimiliki seorang militer tapi

URL: www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/b/budi-harsono/

BUDI HAR



PERSONO

juga dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.

"Kita dapat amati dewasa ini kesadaran bernegara dan bela negara warga Indonesia sudah mengalami erosi yang sangat tajam," tukasnya.

Dalam hematnya, faktor penyebab dari fenomena itu adanya kekurangan pada sistem pembangunan nasional di masa lalu, yang belum menempatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama.

Ironisnya pula, SDM dibangun seiring dengan derap pembangunan fisik-material. Akibatnya, timbullah ekses dari kegiatan pembangunan tersebut yaitu SDM yang cenderung bermental dan berperilaku materialistis. Yang hanya berfikir dan bertindak atas apa yang dia harus peroleh. Pola pikir seperti itu, sambung anggota Badan Kehormatan (BK) DPR-RI ini, dominan merasuki benak SDM Indonesia dewasa ini.

"Pembangunan SDM mestinya menjadi prioritas dan diprogram dari awal secara sistematis dan berjangka panjang, dan tidak secara instan. Jerih-payah kita sekarang hasilnya baru bisa dipetik bangsa ini 15-20 tahun mendatang," tandas anggota Tim Sosialisasi Badan Pekerja MPR-RI ini.

Memimpin Fraksi TNI/Polri DPR

Sebenarnya, Budi Harsono terbilang sudah cukup lama berkecimpung di dunia parlementaria. Anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR periode 2004-2009 ini pertama kali bertugas di Gedung DPR/MPR pada tahun 1997.

Ketika itu, pria kelahiran Yogyakarta, 13 September 1946, ini mendapatkan kepercayaan dari Mabas ABRI sebagai anggota Fraksi ABRI di DPR/MPR.

Dia mengemban tugas sebagai anggota legislatif di DPR berkaitan dengan peran Dwifungsi (fungsi Pertahanan Keamanan dan fungsi Sosial Politik) ABRI yang berlaku di masa itu.

Dia mendapat tugas baru di DPR setelah hampir satu tahun lamanya memangku tugas sebagai Asisten Sosial Politik (Assospol) Mabas ABRI. Saat itu, Budi berpangkat Mayor Jenderal TNI (bintang dua). Posisi Assospol ABRI yang ditinggalkannya selanjutnya ditempati oleh Mayor Jenderal TNI

Susilo Bambang Yudhoyono, yang kini menjabat Presiden RI.

Pertama kali bertugas di Senayan, dia langsung diserahi tanggung jawab sebagai Ketua Komisi II DPR RI, yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri. Setahun kemudian, dia dipercaya menjadi Wakil Ketua Fraksi ABRI (1997-1999). Saat itu, posisi Ketua F-ABRI dijabat oleh Letjen TNI Ahmad Rustandi, yang sekarang menjadi anggota Mahkamah Konstitusi.

Di era reformasi, seiring pergantian kepemimpinan nasional (eksekutif dan legislatif) hasil dari Pemilu 1999, Budi rupanya masih mendapat kepercayaan dari Mabas TNI bertugas di DPR.

Seperti dipahami, berdasarkan konsensus rakyat Indonesia yang dilandasi semangat reformasi, pada 1 April 1999, institusi Polri (Kepolisian RI) dipisahkan dari institusi TNI dalam organisasi ABRI, sehingga sejak itu sebutan Fraksi ABRI pun berubah menjadi Fraksi TNI/Polri.

Setelah sekitar dua tahun menjabat Wakil Ketua F-TNI/Polri, pada tahun 2001, Budi Harsono ditunjuk Mabas TNI sebagai Ketua F-TNI/Polri, menggantikan posisi Letjen TNI Ahmad Rustandi yang memasuki masa pensiun.

Selaras dengan kapasitas tugas dan tanggung jawabnya selaku Ketua F-TNI/Polri, suami dari Mut Indayah ini dan ayah empat orang putra ini memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat dari Mayor Jenderal TNI menjadi Letnan Jenderal TNI (bintang tiga).

Saat menjadi komandan gerbong F-TNI/Polri di DPR yang terdiri dari 38 orang anggota, Budi Harsono mesti benar-benar bijaksana dalam memposisikan peran F-TNI/Polri di dalam dinamika kehidupan parlementaria, yang sarat dengan tarik-menarik kepentingan antarpartai politik (Parpol).

Bijaksana dalam pengertian menempatkan posisi TNI/Polri secara netral, nonpartisan, dan semata-mata mengabdikan pada kepentingan negara dan rakyat Indonesia di tengah-tengah pertarungan politik yang cenderung bersifat partisan dan sektarian di Senayan.

Alumnus Lemhannas KRA XXI (1994-1995) ini menggarisbawahi, F-TNI/Polri bertugas mewakili dan mengusung kepentingan negara dan bangsa. Dengan kata lain,

politik yang dimainkan F-TNI/Polri di parlemen adalah politik negara. Bukan politik praktis yang dimainkan fraksi-fraksi lain dan kepentingan partisan kelompok masyarakat yang diwakili dan diperjuangkan Parpol-parpol.

Di bawah kepemimpinan Budi Harsono, F-TNI/Polri mampu memerankan diri sebagai penyeimbang sekaligus jembatan penghubung di antara fraksi-fraksi di DPR yang sering berseteru atau berbeda pendapat mengenai isu-isu yang berkembang di Senayan.

Peranan penyeimbang yang dimainkan F-TNI/polri di DPR, kata Budi, berkaitan erat dengan tujuan keberadaan F-TNI/Polri yakni mengabdikan pada kepentingan bangsa, negara, dan rakyat secara keseluruhan.

Sebab, apabila konflik-konflik antarkepentingan fraksi di DPR dibiarkan berlarut-larut, kondisi itu akan merugikan kepentingan rakyat.

Dan, peran jembatan yang dimainkan F-TNI/Polri dapat diterima fraksi-fraksi yang berbeda kepentingan karena selalu ada solusi terbaik, yang bersifat akomodatif terhadap semua pihak. "Dulu saat Fraksi TNI/Polri ada di DPR, keputusan akhir yang diambil DPR tentang banyak isu cenderung melalui jalan musyawarah untuk mufakat," papar mantan Assospol ABRI (1997) ini.

"Sangat jarang keputusan paripurna DPR diambil melalui pemungutan suara atau *voting*, seperti yang menjadi ciri DPR di era reformasi sekarang ini."

Merupakan sebuah tantangan berat bagi Budi Harsono untuk bijak menempatkan posisi dan sikap politis F-TNI/Polri dalam konflik tersebut. Dia mesti setiap saat melakukan konsolidasi ke dalam dan berkoordinasi secara intensif –dan melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi di Senayan— dengan Mabas TNI di Cilangkap, dalam hal ini Panglima TNI.

Ketika dia memimpin F-TNI/Polri, ada satu peristiwa besar berskala nasional dalam dunia ketatanegaraan Indonesia, dan menyangkut kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dilatarbelakangi perseteruan politik tingkat tinggi antara pemerintah (baca: Presiden RI) dan DPR/MPR (mayoritas fraksi). Dalam situasi konfliktual



BUDI HARSONO DAN ISTERI MUT INDAYAH BERBUSANA MELAYU ■ mti/dok

tersebut, F-TNI/Polri ikut berperan dalam menentukan nasib bangsa dan negara.

Puncak dari persetujuan politik tersebut adalah keputusan mayoritas fraksi di MPR untuk menggelar Sidang Istimewa (SI) MPR sebagai respons terhadap kondisi negara yang diterpa berbagai persoalan, yang potensial mengarah pada instabilitas nasional, seperti kasus Bulog dan dualisme kepemimpinan di tubuh institusi Polri.

Satu tahun menjelang berakhirnya eksistensi TNI dan Polri di DPR, sebagai implementasi dari keinginan rakyat Indonesia, Budi Harsono pensiun dari dunia militer yang telah digelutinya selama hampir 35 tahun dengan penuh pengabdian, dedikasi, dan loyalitas kepada bangsa, negara, dan institusi TNI sendiri.

Menjaga Keutuhan Partai Golkar

Agaknya, pengalaman, kinerja, dan integritas seorang Budi Harsono selama beraktivitas di parlemen, khususnya ketika menjadi Ketua F-TNI/Polri, rupanya menarik perhatian Akbar Tandjung (kala itu Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPR-RI).

Politikus kawakan itu lantas mengajak Budi bergabung ke partai berlambang Pohon Beringin tersebut. Tak tanggung-tanggung, Akbar menawarkan posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar kepada Budi Harsono.

Kebetulan, posisi Sekjen Partai Golkar memang sedang lowong setelah ditinggal Mayjen TNI (purn) Tuswandi yang wafat. Tawaran Akbar disambutnya.

Salah satu pertimbangan utama

lulusan Akademi Militer Nasional (AMN) angkatan 1967 ini bergabung ke Partai Golkar adalah keinginannya menyumbangkan pikirannya, tenaga, dan darma baktinya kepada bangsa dan negara melalui partai politik (Parpol) terbesar di Indonesia itu.

Dalam persepsi Budi, dari demikian banyak Parpol yang ada di tanah air, utamanya Partai Golkar yang bisa menjadi perekat, penjaga, dan pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan platform nasionalismenya.

“Spirit kebangsaan yang tertanam dalam diri saya sejak pendidikan pembentukan militer sampai bertugas di lapangan membela negara selaras dengan visi dan misi Golkar. Faktor historis dan ideologis itulah yang menjadi energi utama saya bergabung ke Partai Golkar,” Budi menjelaskan sebagian latar belakang dari keputusannya.

Kondisi Partai Golkar saat itu yang sedang dilanda konflik internal yang mengarah pada perpecahan dan sangat potensial menghancurkan Partai Golkar sendiri juga memantik motivasi Budi Harsono untuk menerima tawaran Akbar Tandjung demi menjaga keutuhan Parpol tersebut.

“Alasan yang paling subyektif, saya ingin membantu Pak Akbar Tandjung yang tengah didera persoalan hukum, di satu situasi, namun pada situasi lain dia digoyang dari dalam partainya sendiri.”

Bersama Akbar Tandjung dan pengurus pusat lainnya, Budi Harsono akhirnya berhasil menjaga keutuhan Partai Golkar, dan bahkan dengan gemilang menempatkan partai sebagai pemenang Pemilu 2004.

Pada Pemilu 2004, Budi Harsono diusung Partai Golkar untuk bertarung di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII (Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Majalengka).

Berkat kepercayaan besar dari warga tiga kabupaten itu yang ditandai perolehan suara cukup signifikan, mantan Danyon 312 Kala Hitam, Subang, (1984-1985), mantan Dandim 0617, Majalengka (1986-1988), dan mantan Danrem 063, Cirebon, (1993-1994) ini pun melenggang kembali ke Senayan, dan bergabung ke Fraksi Partai Golkar DPR. ■ mti

Fraksi TNI/Polri

Jembatan Penghubung Lintas Kepentingan

Dulu, Fraksi TNI/Polri memiliki peranan penting dalam menjembatani setiap konflik kepentingan politik partisan yang berkembang di DPR. Kini, tidak ada lagi yang mampu berperan demikian.



BUDI HARSONO BERBICARA PADA SIDANG UMUM MPR 1999 ■ mti/dok

Kebudayaan Fraksi TNI/Polri di DPR tidak bisa dilepaskan dari dua tugas utamanya. Tugas pertama, mengemban dan melaksanakan tugas TNI dan Polri dalam rangka menjaga keselamatan dan keutuhan negara, yang diimplementasikan melalui tiga fungsi DPR (pengawasan, penyusunan anggaran, dan pembentukan peraturan perundang-undangan).

Tugas kedua, mengemban dan mewakili kepentingan rakyat dan negara dalam arti luas. Bukan kepentingan kelompok rakyat seperti yang diemban oleh partai-partai politik dengan platform masing-masing.

Anggota TNI yang bergabung di F-TNI/Polri, kata Budi Harsono, memiliki status dan peran yang sangat unik. Di satu pihak, status mereka adalah kepanjangan tangan dari Mabes TNI. Mereka ditugaskan di DPR dalam rangka mengemban fungsi sosial dan politik (sebagai salah satu perwujudan

dari Dwifungsi) TNI.

Tapi, di lain pihak, mereka juga mengemban tugas mewakili aspirasi rakyat dan kepentingan negara dalam arti kata luas. Karena itu, setiap anggota F-TNI/Polri dituntut harus cerdas, hati-hati, dan bijak dalam menjalankan dua peran penting tersebut di DPR.

Atas dasar itulah, anggota TNI dan Polri yang ditugaskan di Fraksi TNI/Polri itu adalah mereka yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu yang relatif ketat.

Singkatnya, anggota TNI dan Polri yang bisa masuk ke F-TNI/Polri itu adalah orang-orang yang memang memiliki kualitas dan integritas diri yang baik, serta dianggap mampu mengemban dua tugas utama tersebut.

Pilihan Abstain

Kiprah F-TNI/Polri sering mendapat sorotan tajam dalam konteks pengambilan keputusan politik di

tingkat paripurna DPR. Muncul skeptisisme terhadap peranan konkret F-TNI/Polri di DPR, karena dipastikan setiap langkah atau keputusan politik yang diambil F-TNI/Polri sangat tergantung pada instruksi dan komando dari Panglima TNI dan/atau Kepala Kepolisian RI (Kapolri).

Sejumlah kalangan mengkritik sikap dan keputusan politik F-TNI/Polri yang kadang kala berbeda dengan arus besar (*mainstream*) pendapat yang berkembang di DPR.

Misalnya, sikap abstain yang sering dipilih F-TNI/Polri manakala berlangsung pemungutan suara (*voting*) dalam proses pengambilan keputusan akhir tentang isu atau masalah yang menuai pro-kontra di antara fraksi-fraksi di DPR.

"Apa gunanya ada Fraksi TNI dan Polri di DPR bila mereka cenderung tidak punya sikap dan memilih abstain saat *voting*? Bukankah mereka yang berkantor di Gedung DPR adalah wakil rakyat?" demikian lontaran kritik yang kerap tertuju pada F-TNI/Polri.

Budi Harsono mengklarifikasi satu hal, anggota F-TNI/Polri memang tidak seperti halnya kebanyakan anggota DPR dari fraksi-fraksi lain, yang setiap langkahnya cenderung dilatarbelakangi kepentingan kelompok pendukung atau Parpol yang diwakilinya.

Mantan Ketua F-TNI/Polri (2001-2002) ini mengatakan, di dalam menyikapi berbagai masalah, umumnya F-TNI/Polri cenderung pasif dan netral, dalam arti kata tidak memihak kepentingan salah satu kelompok.

Diakuinya, memang, pasivitas dan netralitas F-TNI/Polri yang disimbolisir oleh sikap abstain saat *voting* tersebut acapkali menuai tanggapan bernada minor dari publik, dan bahkan anggota Dewan yang tidak memahami hakikat keberadaan F-TNI/Polri.

Padahal, kata Budi, pilihan abstain bukan berarti F-TNI/Polri tidak mempunyai sikap sama sekali. Justru dengan memilih abstain, F-TNI/Polri hendak menunjukkan netralitasnya terhadap ruang konflik antarkepentingan yang mengemuka saat itu, dan sekaligus pula menegaskan ketidakberpihakannya pada mereka yang berbeda kepentingan.

Dijelaskan lebih jauh oleh Budi, sebelum menetapkan sikapnya terhadap setiap permasalahan yang

menuai pro-kontra di DPR, F-TNI/Polri berpegang pada sejumlah pertimbangan pokok.

Pertama, apakah substansi masalah sudah atau belum menyentuh kepentingan nasional. **Kedua**, apakah substansi masalah itu terkategori sudah atau belum mengganggu keselamatan bangsa dan negara.

Ketiga, apakah substansi masalah itu potensial atau tidak potensial menghambat pelaksanaan tugas-tugas TNI/Polri di lapangan. Alasannya, aparat TNI dan Polri tidak boleh berpihak dalam bertugas di lapangan.

Berangkat dari hal itulah, ucap Budi, sebelum menentukan sikap akhir, F-TNI/Polri pasti melihat setiap masalah atau isu yang berkembang di DPR dari pendekatan nasional.

“Fraksi TNI/Polri selalu menakar apakah ruang lingkup dan skala masalah tersebut mengancam keselamatan bangsa dan negara ataukah tidak. Merujuk dari hasil takaran itulah, sikap akhir ditetapkan. Bahwa selama ini sikap abstain lebih menonjol, hal itu karena Fraksi TNI/Polri menilai substansi masalahnya masih berskala kepentingan politik partisan,” papar Budi Harsono.

Meskipun memilih sikap abstain, F-TNI/Polri selalu mengapresiasi, mengakui, dan mematuhi apapun keputusan akhir dari *voting* tersebut sebab itu adalah produk dari sebuah mekanisme pengambilan keputusan yang berlangsung secara demokratis.

Adalah prinsip dari demokrasi, walaupun awalnya terjadi perbedaan pendapat, sikap pro-kontra, namun setelah diambil keputusan maka semua pihak termasuk yang kalah suara mesti loyal pada pendapat dari pihak yang menang.

Peran Penyeimbang

Sebagai kepanjangan tangan dari institusi TNI dan Polri, yang semata-mata mengabdikan pada kepentingan bangsa, negara, dan rakyat, maka orientasi tugas F-TNI/Polri di DPR pun bukan kepentingan kelompok yang bersifat praktis-pragmatis.

Politik F-TNI/Polri adalah politik negara bukannya politik praktis. Visi dan misi itu yang membedakan F-TNI/Polri dengan fraksi-fraksi lain di DPR.

Dalam realitasnya, F-TNI/Polri berada dalam kehidupan politik di parlemen yang senantiasa diwarnai dinamika tarik-menarik kepentingan politik antarfraksi (yang menjadi kepanjangan tangan partai-partai politik), yang kadangkala meruncing menjadi perseteruan. Dalam situasi-situasi konfliktual seperti itu, F-TNI/Polri berupaya memposisikan diri secara bijak untuk tidak berpihak pada pihak manapun.

Tapi itu tidak berarti F-TNI/Polri hanya berdiam diri. F-TNI/Polri senantiasa mencoba berperan sebagai kekuatan penyeimbang dan menjadi



BUDI HARSONO DIWAWANCARA DI SELA SIDANG ISTIMEWA MPR 2001 ■ mti/dok

jembatan penghubung alias mediator bagi pihak-pihak yang berbeda kepentingan di Senayan.

Dari sudut pandang politik, dia menyadari sering terjadi kesenjangan komunikasi di antara fraksi-fraksi di dalam memperjuangkan kepentingan Parpol masing-masing. Sebaliknya, karena sama sekali tidak memiliki kepentingan politik praktis, sesaat, atau partisan, F-TNI/Polri berupaya menjadi jembatan penghubung bagi perbedaan kepentingan politik di antara fraksi-fraksi lain, agar diperoleh jalan keluar.

“Berkat peran penyeimbang dari Fraksi TNI/Polri itu keadaan dinamika politik di DPR cenderung lebih tenang. Saya katakan demikian karena Fraksi TNI/Polri menjadi jembatan penghubung antarpihak dan antarkepentingan politik di DPR. Fraksi TNI/Polri juga menjadi kekuatan penyeimbang, stabilisator, dan sekaligus katalisator dinamika politik di DPR,” kata Budi, mengungkapkan pengalaman dirinya selama memimpin F-TNI/Polri.

“Alhamdulillah, selama saya memimpin Fraksi TNI/Polri, konflik-konflik kepentingan antarfraksi di DPR tidak sampai meningkat eskalasinya dan relatif bisa diredakan berkat peranan jembatan penghubung yang dimainkan Fraksi TNI/Polri.”

Kemauan F-TNI/Polri berperan sebagai jembatan penghubung bagi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan yang menajam di DPR, lanjut Budi, dilandasi tujuan ideal agar ada jalan keluar (*way out*) terbaik,

sehingga konflik tidak sampai berlarut-larut alias berkepanjangan.

Bila dibiarkan berlarut-larut, konflik tersebut sangat potensial meluas dan menimbulkan eksekusi politik yang kurang sehat bagi kehidupan demokrasi di tanah air, dan akan merugikan kepentingan rakyat banyak.

F-TNI/Polri mencoba mengajak pihak-pihak tersebut untuk sama-sama mencari solusi yang terbaik. Dan, terciptanya kondisi politik yang relatif kondusif di DPR adalah sedikit banyak merupakan hasil dari peran F-TNI/Polri sebagai penyeimbang.

Meski begitu, tekan Budi lagi, peran penghubung yang sering ditempuh oleh F-TNI/Polri selalu bersandar pada satu orientasi yakni kepentingan bangsa dan negara.

“Bagi Fraksi TNI/Polri, kepentingan bangsa dan negara berada di atas segala-galanya. Fraksi TNI/Polri bertekad menjaga stabilitas nasional dan suhu politik agar tidak memanas, serta menjaga suasana terus kondusif bagi kehidupan bangsa ini,” katanya.

Peran penting sebagai jembatan penghubung yang dimainkan F-TNI/Polri tersebut tidak diketahui oleh publik sebab F-TNI/Polri memang tidak menggembar-gemborkannya kepada publik.

Itulah salah satu profil seputar peranan dan kontribusi F-TNI/Polri kepada bangsa dan negara sewaktu bertugas di Senayan dahulu. Kini, menyusul konsensus nasional di era reformasi yang menghapus keberadaan unsur TNI dan Polri di



BUDI DAN HARI SABARNO BERSAMA ANGGOTA F-TNI/POLRI PADA SU-MPR 1999 ■ mti/dok

lembaga legislatif (pusat dan daerah), maka otomatis tak ada lagi pihak yang mau dan mampu berperan —dengan orientasi kebangsaan bukan orientasi kepentingan kekuasaan— sebagai jembatan penghubung, penengah, dan/atau kekuatan penyeimbang bagi berbagai perbedaan kepentingan di DPR.

Dewasa ini, peran sebagai jembatan seperti yang dulu F-TNI/Polri lakukan itu, walaupun dikatakan ada, cenderung dimainkan oleh fraksi pemerintah.

Dia sangat merasakan betapa fungsi jembatan penghubung seperti pernah diperankan F-TNI/Polri dalam rangka menyelesaikan setiap masalah sekarang telah hilang di DPR.

Di satu sisi, potensi konflik kepentingan antarfraksi di DPR akan terus berlangsung, sementara di lain sisi tidak ada lagi pihak yang mampu berperan sebagai jembatan penghubung sekaligus kekuatan penyeimbang. Ekses dari kondisi tersebut, setiap masalah yang mengemuka di DPR akhirnya diselesaikan melalui mekanisme *voting*.

Jalan musyawarah untuk mufakat yang senantiasa dahulu ditawarkan oleh F-TNI/Polri kepada pihak-pihak yang berbeda kepentingan dikesampingkan karena perbedaan pendapat yang mengemuka, tanpa ada yang mampu menjadi penengah.

“Fraksi TNI/Polri kerap dipercayai oleh fraksi-fraksi lain yang berseteru sebagai penghubung dan tempat mengadu karena di antara mereka sudah tidak bisa dicapai titik temu. Mereka tahu kami tidak punya kepentingan praktis atau kepentingan partisan, selain kepentingan bangsa dan negara.

Dan, itu saya sangat rasakan selama menjadi Ketua Fraksi TNI/Polri.”

Bahwa, pimpinan fraksi-fraksi lain kadangkala melobi dirinya selaku Ketua F-TNI/Polri untuk mendapatkan dukungan politis, sebagai langkah memperjuangkan kepentingan kelompoknya, Budi menilai wajar-wajar saja. Yang pasti, seraya menampung lobi-lobi itu, F-TNI/Polri pasti melihat substansi masalah dari sudut pandang kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Dinamika F-TNI/Polri

Bertitik tolak selalu pada visi dan misi kebangsaan, kiprah F-TNI/Polri di Senayan tetap dinamis. Termasuk, dalam hal pilihan sikap politik yang diambilnya, misalnya. F-TNI/Polri tidak selalu identik dengan abstain.

Sekadar menunjukkan satu contoh, ketika mayoritas fraksi di DPR berkehendak membentuk panitia khusus (Pansus) penyelidikan skandal Bulog (Bulogate), F-TNI/Polri memilih sikap setuju.

Pertimbangan F-TNI/Polri, keberadaan Pansus memang diperlukan agar persoalan dapat diselesaikan, tidak mengambang, sampai ditemukan kesimpulan akhir yang jelas.

Dalam hemat F-TNI/Polri, ujar Budi, apabila dibiarkan berlarut-larut, persoalan itu akan meluas dan mengkrystal menjadi ‘bola panas’, dan potensial menimbulkan ekses-ekses lebih jauh yang tidak diinginkan.

Namun, begitu dinamika Pansus mulai memasuki tahap menyetuh hal-hal substansi persoalan, F-TNI/Polri memilih sikap abstain ketika digelar *voting* untuk mengambil keputusan.

Mengapa abstain yang dipilih F-TNI/Polri? “Karena kita menilai persoalan itu belum menyetuh kepentingan nasional atau belum memasuki tataran psikologis mengancam keselamatan bangsa dan negara,” jelasnya.

Di samping itu, alasan kedua, F-TNI/Polri tidak menginginkan persoalan itu

menghambat kinerja aparat TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya di lapangan, yang pada hakikatnya bersikap netral.

Dalam perhitungan F-TNI/Polri, ada dua kubu di antara fraksi-fraksi di DPR (pro dan kontra) terhadap kasus Bulog. Bila F-TNI/Polri memihak salah satu yang berseteru, sikap itu dikhawatirkan akan berimplikasi tidak bagus pada pelaksanaan tugas aparat TNI dan Polri di lapangan.

Koordinasi

Berdasarkan pengalaman pribadinya selama menjadi anggota atau Ketua F-TNI/Polri, Budi menilai soliditas F-TNI/Polri sangat kuat. Hal itu tidak lepas dari status anggota F-TNI/Polri yang merupakan anggota TNI dan anggota Polri yang masih aktif. Jadi, sistem satu komando tetap menjadi ciri khas F-TNI/Polri.

Apakah instruksi dari Mabes TNI dan Mabes Polri tidak mengapresiasi pendapat/pandangan pribadi-pribadi anggota F-TNI/Polri? Kata Budi, instruksi dari pimpinan TNI dan Polri kepada F-TNI/Polri dikeluarkan setelah menerima laporan tentang setiap perkembangan situasi yang berlangsung di DPR dari pimpinan F-TNI/Polri.

“Jarang sekali terjadi pimpinan TNI dan Polri itu mengambil keputusan atau mengeluarkan instruksi apa yang mesti dilakukan Fraksi TNI/Polri di DPR, tanpa terlebih dahulu meminta saran dan pertimbangan dari pimpinan Fraksi TNI/Polri,” jelas Budi.

Sebab, yang paling tahu perkembangan situasi di lapangan adalah anggota F-TNI/Polri sendiri sehingga Panglima TNI dan Kapolri selalu meminta saran dari F-TNI/Polri sebelum mengeluarkan instruksi.

F-TNI/Polri sering menggelar rapat internal untuk mendiskusikan setiap masalah atau isu yang berkembang di DPR. Hasil rapat fraksi itulah yang kemudian dilaporkan selengkap mungkin kepada Panglima TNI dan Kapolri.

“Di sinilah dituntut kemampuan dari seorang ketua fraksi untuk memberikan laporan yang valid, obyektif, dan selengkap mungkin agar pucuk pimpinan TNI dan Polri tidak salah mengambil keputusan.”

Komunikasi antara Panglima TNI dengan Kapolri dan pimpinan F-TNI/Polri terjalin setiap saat. Dengan mekanisme komunikasi semacam itu, Panglima TNI dan Kapolri bisa merespons berbagai aspirasi di internal F-TNI/Polri yang dikemukakan Budi selaku Ketua F-TNI/Polri. Jadi, saran yang disampaikan kepada Mabes TNI dan Mabes Polri bisa dikatakan sudah merupakan sikap dari F-TNI/Polri.

Pada umumnya instruksi Panglima TNI dan Kapolri sangat memperhatikan aspirasi yang

sebelumnya berkembang di internal F-TNI/Polri. Sehingga tidak ada salah pengertian atau pernyataan yang berbeda antara Mabes TNI/Mabes Polri dan F-TNI/Polri.

Walaupun berciri satu komando, budaya demokrasi berkembang di F-TNI/Polri. Konkretnya, ada ruang gerak bagi setiap anggota F-TNI/Polri untuk menyampaikan pernyataannya, sejauh masih dalam koridor yang sudah disepakati bersama.

Seluruh anggota F-TNI/Polri tetap diberikan kebebasan menyampaikan pendapat ke luar. Jadi tidak mesti bahasanya 'seragam' sebab, jika begitu, hal itu berarti menghilangkan dinamika demokrasi di F-TNI/Polri sendiri.

F-TNI/Polri menganut sistem permainan sepak bola. Membawa bola tidak harus ke depan terus. Bola kadang diumpan ke belakang, digiring ke tengah, dan dikirim ke depan. Meski demikian, yang pasti orientasinya adalah gawang lawan.

Tujuan akhirnya tetap sama, memasukkan bola ke gawang lawan.

Singkat kata, setiap anggota F-TNI/Polri memiliki kebebasan, misalnya, menjawab pertanyaan wartawan tentang hal-hal aktual di DPR tapi *mindset* makronya masing-masing



BUDI DAN ISTERI BERSALAMAN DENGAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN ISTERI ■ mti/dok

anggota sudah paham.

"Kita mengembangkan budaya berbeda pendapat di internal Fraksi TNI/Polri, khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Kalau perlu kita lakukan *voting* untuk mengambil satu keputusan," ujar Budi

menggambarkan dinamika di tubuh F-TNI/Polri saat itu. Setelah diambil satu keputusan melalui mekanisme yang demokratis, semua anggota F-TNI/Polri tetap loyal pada keputusan itu, sehingga sikap F-TNI/Polri pasti membawa satu suara. □ mti/af



BIODATA: ■ **Nama:** LETJEN TNI (PURN.) H. BUDI HARSONO ■ **Lahir:** Yogyakarta, 13 September 1946 ■ **Agama:** Islam ■ **Istri:** Mut Indayah (Menikah 1972) ■ **Anak:** 1. Budi Indawan, ST., MM = 2. Sus Budi Indardi, ST., MM = 3. Budi Inda Timur Putra = 4. Budi Inda Catur Satya ■ **Ayah:** Aris Moenandar ■ **Ibu:** Salamah ■ **Jabatan Sekarang:** o Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR-RI (Periode 2004-2009) dari Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat VIII (Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sumedang). o Anggota Komisi VII DPR-RI (Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral) DPR-RI. o Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR-RI. o Anggota Tim Sosialisasi Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP-MPR RI). ■ **Riwayat Pendidikan:** SR (Yogyakarta, 1952-1958) = SMP (Yogyakarta, 1958-1961) = SMA/B (Manado, 1961-1964) = Akademi Militer Nasional (Magelang, 1964-1967) = Suslapa (Bandung, 1975-1976) = Seskoad (Bandung, 1983-1984). = Lemhannas KRA XXI (Jakarta, 1993-1994). ■ **Pangkat Militer Terakhir:** Letnan Jenderal TNI ■ **Jenjang Karier di Militer:** 1. 1968-1976: (Letnan Dua-Kapten) Kodam IV/Diponegoro, Jawa Tengah: -Komandan Peleton (Danton) Batalyon Infanteri (Yonif) 406, Gombong, Jawa Tengah (1968-Letnan Dua). -Komandan Kompi (Danki) Yonif 406, Gombong, Jawa Tengah (1972, Letnan Satu-Kapten). -Perwira Staf Operasi Yonif 406 (1976-Kapten). 2. 1976-1983: (Mayor-Letnan Kolonel) Kodam II Bukit Barisan, Sumatera Utara: - Perwira Paban Madya/Karo Operasi Kodam II BB (1976-1981-Mayor). -Wakil Komandan Yonif 122 Tebing Tinggi (1980-1981-Mayor). -Kepala Staf Komando Distrik Militer (Kasdim) 0206 Rantau Prapat, Labuan Batu, (1981-1982, Mayor). -Kasdim 0201 Kota Besar Medan, Sumut (1982-1983, Letnan Kolonel). 3. 1984-1989: (Letnan Kolonel-Kolonel) Kodam III Siliwangi, Jawa Barat: -Komandan Yonif 312 Kala Hitam, Subang, (1984-1985, Letnan Kolonel). -Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0617, Majalengka (1986-1988, Letnan Kolonel). -Kepala Staf Komando Resort Militer (Kasrem) 061 Bogor, (1988-1989, Letnan Kolonel). 4. 1989-1992: (Kolonel) Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad): -Asisten Teritorial (Aster) Divisi I Kostrad, Cilodong, Jawa Barat (1989-1992, Kolonel). 5. 1992-1994: (Kolonel) Kodam III Siliwangi, Jawa Barat: -Aster Dam III Siliwangi, (1992-1993, Kolonel). -Komandan Komando Resort Militer (Danrem) 063 Cirebon, (1993-1994, Kolonel). 6. 1995-1997: (Kolonel-Mayor Jenderal) Mabes TNI: -Paban Sospol Mabes TNI (1995-1996, Kolonel). -Wakil Asisten Sospol (Waassospol) Mabes TNI (1996-Brigadir Jenderal). -Assospol Mabes TNI (1996-1997-Mayor Jenderal). 7. 1997-2002: (Mayor Jenderal-Letnan Jenderal) Fraksi TNI/Polri DPR-RI: -Ketua Komisi II DPR-RI (1997-1999, Mayor Jenderal). -Wakil Ketua Fraksi TNI/Polri DPR-RI (1999-2000, Mayor Jenderal). -Ketua Fraksi TNI/Polri DPR-RI (2001-2002, Letnan Jenderal). ■ **Pengalaman Tugas Militer:** 1. Operasi Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak (1971-1972). = 2. Operasi Timor Timur I (1981-1982). = 3. Operasi Timor Timur II (1984-1985). ■ **Pengalaman Organisasi/Pekerjaan Lain:** 1. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar (2002-2004). = 2. Komisaris PTP XI (1997-1999). = 3. Komisaris TVRI (2003-2004). ■ **Penghargaan/Tanda Jasa:** 1. Satya Lencana Penegak = 2. Satya Lencana Dharma Pala = 3. Satya Lencana Seroja = 4. Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, 16 Tahun, dan 24 Tahun = 5. Bintang Kartika Eka Paksi Nararya = 6. Bintang Kartika Eka Paksi Pratama = 7. Bintang Yudha Dharma Nararya = 8. Bintang Yudha Dharma Pratama = 9. Bintang Dharma ■ **Hobby:** 1. Olah Raga (sepakbola, tenis, golf, jogging) = 2. Kesenian (nonton wayang kulit) ■ **Alamat:** Perum Hankam Jati Makmur Jl. Rafflesia F-3 Pondok Gede, Bekasi. □

Ada Spirit yang Hilang di DPR

Jalan musyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah yang senantiasa dikedepankan oleh Fraksi TNI/Polri seharusnya tidak hilang di dunia parlemen Indonesia.

Mengakui sebagai sebuah pandangan yang terkesan sangat subyektif, menyembul harapan dari Budi Harsono bahwa semangat berbangsa dan bernegara

senantiasa terpatri di benak para anggota legislatif, khususnya yang bertugas di DPR, meskipun mereka mewakili kepentingan Parpolnya masing-masing.

Tentu ada maksud di balik ungkap-

an yang dia lontarkan ini. Menurut pengamatannya, sepinggal Fraksi TNI/Polri, ternyata ada fenomena kepincangan di DPR.

Pertama, hilangnya fungsi jembatan penghubung bagi berbagai perbedaan kepentingan di antara fraksi-fraksi di DPR.

Kedua, terbaikannya jalan musyawarah dalam mencari solusi masalah. *Ketiga*, kurang diamatinya berbagai masalah yang dibahas DPR dari aspek Hankam.

Pada periode-periode sebelumnya, situasi DPR relatif tenang karena F-TNI/Polri banyak berperan sebagai



BUDI HARSONO BERSAMA JENDERAL TNI PURN HARI SABARNO ■ mti/dok

jembatan sehingga dapat dicapai titik temu dari perbedaan kepentingan dan bisa dicarikan jalan keluar bagi banyak masalah.

Di samping itu, jarang dilakukan *voting* dalam menyelesaikan masalah-masalah sebab sudah dilakukan jalan musyawarah antara pihak-pihak yang berbeda pendapat, dengan F-TNI/Polri sebagai penengah.

Sekarang, setelah tidak ada lagi pihak yang bisa memerankan diri sebagai jembatan seperti yang pernah diperankan F-TNI/Polri, kepada siapa fraksi-fraksi di DPR akan meminta bantuan menengahi perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka?

Sementara itu, ketika terjadi perbedaan pendapat, masing-masing cenderung saling mendiamkan dan kurang berkomunikasi satu sama lain. Kalaupun ada komunikasi hanya bersifat lintasindividu, bukan lintasfraksi.

Ujung-ujungnya, jalan terakhir yang ditempuh untuk menyelesaikan perbedaan pendapat adalah *voting*. Pendapat yang memperoleh dukungan suara terbanyaklah yang akhirnya menjadi pemenang dalam *voting* meskipun pendapat itu tidak dijamin sebagai yang terbaik.

Pengambilan keputusan melalui mekanisme *voting* merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan demokrasi modern. Namun, untuk konteks kehidupan politik di Indonesia yang sedang berada pada tahap transisi menuju demokrasi, *voting* tidak seharusnya menjadi andalan dalam menyelesaikan masalah.

Pragmatisme

Dewasa ini, sebagian besar warga negara berpola pikir pragmatis. Setiap individu lebih mengedepankan kepentingan dirinya dan/atau kepentingan kelompoknya. Pragmatisme itulah yang membuat cara berpikir dan cara bersikap orang bisa berubah setiap saat secara situasional berdasarkan kepentingannya.

Memang, dunia politik praktis tidak bisa dilepaskan dari pragmatisme. Tapi ada *fatsun* (etika) politik yang semestinya diikuti. Ada alasan moral dan argumentasi logis yang menyertai setiap sikap.

Di bidang kehidupan apa pun, *fatsun* harus ditaati. Tidak usah terlalu tinggi bicara dalam konteks politik praktis, yang banyak bermain kepentingan praktis-partisan, di dunia sepakbola pun ada *fatsunnya*.

Budi menunjuk contoh kompetisi sepak bola di Liga Inggris dan Liga Italia. Di sana, permainan sangat keras. Tapi, semua pemain sangat patuh pada keputusan yang diambil wasit.

Dari permainan sepak bola bisa dinilai etika, karakter, sifat, dan disiplin yang berkembang pada sebuah bangsa. Semua tercerminkan di situ. Sekarang, coba lihat potret



F-TNI/POLRI DALAM SIDANG ISTIMEWA MPR 1998 ■ mti/dok

kompetisi sepak bola di Indonesia. Wasit yang dipukuli oleh pemain, ofisial, atau supporter sudah menjadi pemandangan umum di tanah air. Carut-marut potret pesepakbolaan di tanah air adalah cermin sederhana dari bangsa kita saat ini.

Padahal demokrasi itu intinya saling menghargai di tengah perbedaan pendapat, mampu mengakui kemenangan orang lain, serta mau mengakui kekalahan diri sendiri.

Dia mengingatkan, bangsa dan negara ini memiliki karakter khas di dalam menyelesaikan setiap masalah yakni bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Apalagi, Dasar Negara Indonesia menggariskan bahwa setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah untuk

mufakat.

“Sekarang, kita cenderung telah meninggalkan jalan musyawarah, sebuah ciri khas kehidupan bangsa dan negara ini, dalam menyelesaikan setiap masalah. Sangat disayangkan, kita telah mulai meninggalkan keunggulan yang dimiliki bangsa sendiri, dan mengunggulkan cara berdemokrasi modern yang belum sepenuhnya kita kuasai,” tukasnya prihatin.

Diingatkan oleh Budi, musyawarah untuk mufakat adalah sebuah kekuatan yang dimiliki bangsa ini dalam mengatasi perbedaan pendapat. Jalan musyawarah justru akan menimbulkan sebuah kekuatan.

Mengapa musyawarah ditinggalkan? Dalam persepsi Budi, hal itu akibat dari trauma masa lalu sehingga



BUDI HARSONO SAAT DIWAWANCARA WARTAWAN TOKOH INDONESIA ■ mti/af



BUDI HARSONO BERSAMA PARA CALON ANGGOTA DPR 1997 ■ mti/dok

musyawarah akhirnya ditafsirkan sekadar forum basa-basi atau alat untuk melegitimasi kepentingan penguasa belaka.

Trauma tersebut pada gilirannya berubah menjadi kompensasi sikap akhir pada banyak orang untuk menafikan jalan musyawarah, dan cenderung menempuh jalan *voting* yang dikesankan lebih demokratis.

Menurut Budi, bangsa ini tidak mengharamkan perbedaan pendapat, justru meramunya melalui jalan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik. Meskipun prosesnya kadangkala menyita waktu, bahkan dinilai bertele-tele, jalan musyawarah akan menghasilkan solusi yang terbaik untuk semua.

Alasannya, musyawarah mensyaratkan kesediaan dan keikhlasan masing-masing pihak yang berbeda pendapat untuk saling mengalah demi kebaikan bersama. Hakikat dari musyawarah untuk mufakat adalah masing-masing pihak mau mengkomunikasikan secara terbuka apa yang menjadi kepentingannya, dengan mengedepankan kepentingan yang besar (bangsa dan negara) dan memomorduakan kepentingan kecil (pribadi atau kelompok).

Konsekuensinya, setiap pihak mau saling mengalah demi diperolehnya solusi yang terbaik untuk semua. Dan, pada akhirnya, semua pihak mendukung apapun hasil akhir musyawarah karena semua sudah menyepakatinya sebagai hasil terbaik untuk semua.

Kembali ke kehidupan demokrasi di DPR, sejauh pengamatan Budi, jalan *voting* lah yang kerap dipakai dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Mekanisme *voting* memang relatif cepat dari segi waktu dalam menghasilkan keputusan akhir. Singkatnya, pendapat/pilihan dari suara terbanyak lah yang menjadi solusi atau keputusan akhir.

Sebuah tanda tanya mengemuka: apakah ada jaminan bahwa solusi yang dihasilkan dari mekanisme *voting* tersebut merupakan yang terbaik?

"*Voting* itu belum tentu menghasilkan yang terbaik! Sebab, pendapat dari suara yang terbanyak tidak bisa secara mutlak diidentikkan sebagai solusi yang terbaik," tandas Budi Harsono.

Apakah produk akhir yang dihasilkan dari mekanisme *voting* benar-benar pilihan yang terbaik atau

bukan, Budi menekankan, sangat tergantung pada kualitas orang-orang yang mengikuti *voting*.

Tidak menjadi persoalan apabila keputusan akhir berdasarkan pilihan terbanyak dari para pemilih yang benar-benar memiliki kualitas baik. Akan tetapi, dia mengaku sulit membayangkan apabila faktor-faktor primordialisme, nepotisme, atau sektarianisme yang justru mendominasi pertimbangan anggota Dewan saat menentukan pilihannya pada proses *voting*.

Sesungguhnya terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi pilihan seseorang dalam proses *voting*, terlebih dalam konteks pengambilan keputusan nasional di parlemen.

Sebut saja, misalnya, mulai dari kualitas intelektual si pemilih, kepentingan pribadi dan kelompok si pemilih yang bersifat sesaat (praktis-pragmatis), sampai faktor *money politic*.

Berbeda secara diametral dengan jalan musyawarah yang disemangati sikap saling mengalah untuk 'kemenganan bersama', maka jalan *voting* justru disemangati sikap saling menang.

“Jika kualitas pemilihnya memang bagus semua yang mampu menakar, menimbang, dan menilai persoalan secara jernih dan obyektif, maka pilihan yang terbanyak itu pantas disebut yang terbaik. Akan tetapi, bila melihat secara realistis kondisi yang ada di lapangan dewasa ini, maka sulit dijamin bahwa pilihan yang terbanyak itu sebagai yang terbaik.”

Aspek Hankam Terabaikan

Kondisi lain di DPR yang membuatnya prihatin adalah cenderung diabaikannya penggunaan pendekatan dan pertimbangan aspek Hankam dalam proses penyusunan dan pembahasan substansi berbagai RUU di DPR.

Padahal, Budi mengingatkan, Aspek Hankam bersifat sangat hakiki dalam kehidupan ini. Dalam arti kata luas, tidak ada satu masalah pun yang tidak memerlukan pertimbangan dari aspek Hankam.

Sesuai dengan kapasitasnya, dalam menyumbangkan kontribusi pandangan, pemikiran, ide/gagasan pada penyusunan dan pembahasan setiap Rancangan Undang-undang (RUU) di DPR, F-TNI/Polri cenderung memakai pendekatan dan perspektif pertahanan dan keamanan (Hankam).

F-TNI/Polri sangat menyadari bahwa aspek Hankam tidak bisa diabaikan urgensinya pada setiap perumusan kebijakan nasional yang dikemas dalam bentuk undang-undang.

Dia bisa memahami bila, setelah F-TNI/Polri sebagai pihak yang selama ini secara profesional memahami masalah ini tidak ada lagi di DPR,



BUDI HARSONO DAN AKBAR TANDJUNG BERSAMA PARA KADER GOLKAR ■ mti/dok

aspek Hankam kemudian kurang mendapat perhatian yang optimal dalam setiap pembahasan RUU.

Dia juga sangat memaklumi bahwa sampai saat ini trauma terhadap hal-hal yang berbau militer masih kental. Akan tetapi, jangan sampai trauma itu akhirnya menafikan pentingnya pertimbangan dari aspek Hankam dalam perumusan kebijakan nasional.

Agar pembahasan RUU tetap menyertakan pertimbangan-pertimbangan dari aspek Hankam, Budi Harsono mengintroduksi sebuah solusi yang realistis. Apa itu?

Ketika akan membahas setiap RUU, Komisi atau Pansus yang dibentuk DPR perlu mengundang pihak TNI dan Polri untuk dimintai pendapat dan pandangannya sebagai masukan.

Jadi, logikanya, pihak TNI tidak hanya dipanggil ke DPR saat rapat dengar pendapat (RDP) selaku mitra (pengawasan) kerja dengan Komisi I yang membidangi pertahanan.

Begitupun halnya Polri. Institusi keamanan dalam negeri ini tidak lagi dipanggil ke DPR sekadar berurusan dengan Komisi III yang membawahi urusan hukum.

Dua institusi tersebut sepatutnya dilibatkan juga dalam proses pembahasan RUU. Alasannya, kata Budi, tidak ada kebijakan nasional yang tidak berhubungan dengan aspek Hankam. Dia menunjuk contoh RUU Antipornografi dan Pornoaksi (APP).

Supaya UU APP kelak benar-benar aplikatif di lapangan, dalam hal penegakan hukumnya misalnya, pandangan Polri mesti didengarkan sebagai pihak paling berwenang menangani kasus-kasus pelanggaran UU APP itu di lapangan?

“Masalah pornografi dan pornoaksi memang tidak ada hubungan langsung dengan aspek Hankam, tapi institusi Polri yang paling tahu dinamika di lapangan,” jelas Budi.

Solusi selanjutnya yang ditawarkan Budi Harsono, di Pimpinan DPR ada semacam penghubung TNI dan Polri ke parlemen. Penghubung dari TNI dan Polri itu bukan anggota Dewan.

Setiap saat mereka bisa dimintai pendapat/pandangan oleh Pimpinan DPR atau komisi-komisi yang memerhatikan. Misalnya, ketika ada pembahasan RUU yang membutuhkan pertimbangan dari aspek Hankam, mereka bisa dijadikan sebagai konsultan DPR. □ mti/af

Terbanyak Belum Tentu Terbaik

Tanpa bermaksud menafikan keniscayaan mekanisme *voting* dalam proses pengambilan keputusan di DPR, Budi Harsono mengambil sebuah ilustrasi untuk menggambarkan betapa pilihan dari suara terbanyak tidak identik dengan pilihan yang terbaik.

Secara kasat mata sebuah benda berwarna putih. Lima orang diminta pendapatnya soal warna tersebut. Kalau empat orang mengatakan benda itu merah, maka satu orang yang melihatnya benda itu putih mau tak mau akan ikut pendapat mayoritas (empat orang) karena kalah dalam *voting*. Meski sebenarnya pendapat yang seorang itu paling benar.

Dalam pemilihan presiden, gubernur, atau bupati/walikota, belum tentu yang menjadi pemenang (karena memperoleh suara terbanyak) adalah yang pilihan terbaik.

Karena itu, pilihan yang terbaik sangat tergantung pada kualitas diri dari para pemilih, yang dilandasi oleh antara lain obyektivitas, tingkat pengetahuannya terhadap siapa atau apa yang dipilihnya (seperti karakter dan integritas).

Memilih seseorang tidak bisa atas dasar kesan sesaat saja hanya karena orang itu terlihat simpatik, misalnya. Tapi, perlu diketahui bagaimana karakternya, integritas pribadinya, dan kemampuan intelektualnya. Kemampuan untuk mengenali sesuatu atau seseorang lebih dalam hanya dimiliki orang yang berkualitas.

Kalau yang memilih adalah orang yang tidak berkualitas, subyektif dan emosional, itu namanya sekadar ikut-ikutan akhirnya. Hanya memilih berdasarkan kesan pertama saja. □ mti/af

Pimpin F-TNI/Polri

Pada akhir 2001, ketika terjadi konflik politik antara Presiden Abdurrahman Wahid di satu pihak dan mayoritas fraksi di DPR di lain pihak dengan menggelar Sidang Istimewa MPR, sehingga akhirnya tampuk pemerintah diserahkan kepada (Wakil Presiden RI, saat itu) Megawati Soekarnoputri, Fraksi TNI/Polri mampu memosisikan diri secara tepat dan efektif.

Di tengah berlangsungnya pertikaian politik tingkat tinggi tersebut, peran Budi Harsono dan rekan-rekannya di F-TNI/Polri ikut berperan dalam menentukan nasib bangsa dan negara ini ke depan.

Secara filosofis, sebuah negara terdiri atas 3 (tiga) unsur: pemerintah, rakyat, dan wilayah. Pada hakikatnya, pengabdian TNI dan Polri hanya kepada kepentingan bangsa, negara, dan rakyat sebagai sebuah kesatuan. Selaku wakil dari TNI dan Polri di parlemen, F-TNI/Polri juga mengem-



BUDI HARSONO PIMPIN F-TNI/POLRI DI MASA KRITIS ■ mti/dok

ban spirit pengabdian yang sama.

Jadi, sepanjang pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan baik untuk kepentingan rakyat dan keutuhan wilayah NKRI,

F-TNI/Polri pasti memberikan dukungan.

Namun, manakala masalah yang ada sudah mengancam keselamatan bangsa dan negara atau di saat stabilitas nasional

dipertaruhkan hanya untuk kepentingan-kepentingan politik praktis, maka F-TNI/Polri harus mengambil sikap dan tindakan dengan tetap memomorsatukan kepentingan bangsa dan negara. F-

Polri di Masa Kritis

TNI/Polri yang hanya beranggotakan 38 orang selalu mengamati setiap dinamika dan perkembangan situasi di parlemen, sembari menganalisis berbagai langkah apa yang mesti ditempuh.

Sepanjang skala persoalan belum membahayakan keselamatan bangsa dan negara, F-TNI/Polri tidak memihak pihak manapun yang terlibat dalam konflik.

Karena sering berada di dalam arus perbedaan kepentingan dan dinamika politik praktis, dia dan rekan-rekannya di F-TNI/Polri harus benar-benar jernih menakar setiap persoalan yang mengemuka, bijak memposisikan diri, serta tegas menyatakan sikap.

F-TNI/Polri selalu mengadakan rapat-rapat internal untuk menganalisis dan menyikapi perkembangan keadaan dan dinamika politik di Senayan, dan keputusan rapat senantiasa dilaporkan kepada Panglima TNI dan Kapolri.

Selaku Ketua F-TNI/Polri, dan kebetulan berasal dari unsur TNI, Budi harus secara intensif melaporkan langsung setiap dinamika politik yang berlangsung di DPR/MPR, dan setiap hasil keputusan rapat internal F-TNI/Polri, kepada Panglima TNI, Kapolri, dan Kasospol TNI agar Mabes TNI dan Polri tidak ketinggalan akan informasi-informasi penting yang berguna ketika akan mengambil keputusan.

Alhasil, berkat komitmen dan selalu bersandar pada netralitas dan prinsip non-partisan, serta senantiasa menyikapi substansi konflik dari sudut kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, F-TNI/Polri akhirnya mampu menempatkan dirinya secara tepat di tengah tarik-menarik kepentingan politik praktis.

Kasus Bulog

Dalam sejarah panjang pengabdianya kepada bangsa dan negara, F-TNI/

Polri pernah dihadapkan pada kondisi yang kritis yakni sebuah kebuntuan politik antara mayoritas fraksi di DPR, di satu pihak, dan Presiden Abdurrahman Wahid yang didukung minoritas fraksi di DPR, di lain pihak, sekitar akhir tahun 2001.

Pertikaian yang memanas itu bermula dari dugaan penyalahgunaan kekuasaan terkait dana Bulog yang ditudingkan oleh mayoritas fraksi di DPR kepada Presiden Abdurrahman Wahid.

Tudingan tersebut menajam menjadi pertikaian politik sampai membuahkan kesepakatan mayoritas fraksi di DPR membentuk sebuah panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus tersebut secara tuntas. Dilakukanlah pemungutan suara (*voting*) apakah perlu dibentuk Pansus atau tidak.

Jika pada forum-forum *voting* sebelumnya cenderung memilih abstain, maka ketika dilakukan *voting* untuk mengambil keputusan tentang perlu tidaknya dibentuk Pansus, F-TNI/Polri memilih setuju.

Persetujuan F-TNI/Polri semata-mata agar kasus tersebut bisa segera diakhiri. F-TNI/Polri tidak ingin isu tersebut mengambang atau diambangkan menjadi 'bola salju' politik yang menimbulkan eksekusi lebih luas, dan malahan menyimpang dari substansinya.

F-TNI/Polri tidak mau bila rakyat –yang sejatinya sudah mengalami krisis kepercayaan kepada para elit politik nasional baik eksekutif maupun legislatif—menjadi semakin bingung dan diombang-ambingkan oleh ketidakpastian.

Meski begitu, fleksibilitas pilihan sikap tetap dipertahankan F-TNI/Polri. Terhadap rencana pembentukan Pansus Bulog, F-TNI/Polri memberikan dukungan. Namun, saat DPR menggelar *voting* untuk mengambil sikap atas persoalan-persoalan yang menyangkut substansi kasus, F-TNI/Polri kembali bersikap abstain.

Alasannya? Karena, F-TNI/Polri menilai persoalan masih berskala konflik kepentingan, dan mempersepsikannya belum mem-

bahayakan keselamatan bangsa dan negara.

Posisi F-TNI/Polri sebenarnya berada di tengah-tengah dalam ruang konflik yang bersumber dari kasus Bulog. Tidak ikut sana atau sini. Karenanya dalam berbagai *voting* menyangkut kasus Bulog F-TNI/Polri cenderung memilih abstain karena masalah itu belum menyangkut kelangsungan hidup bangsa.

Riskonya, kerap muncul komentar bernada miring tertuju kepada F-TNI/Polri, termasuk yang datang dari kalangan Dewan sendiri. "Apa gunanya ada di DPR kalau bersikap abstain terus. Masalahnya kan sudah jelas, tinggal menilai benar atau salah saja! Kok tidak mau ambil sikap? Mengapa memilih abstain?" demikian celetukan pedas dan sinis yang ditujukan kepada F-TNI/Polri.

Padahal, Budi Harsono mengklarifikasi, abstain adalah juga sebuah pilihan sikap. Pilihan itu dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa sebagai alat negara, F-TNI/Polri hanya mengabdikan kepada kepentingan bangsa



BUDI HARSONO BERSAMA HARI SABARNO BERKANDA DI SELA SEBUAH ACARA ■ mti/dok



BUDI HARSONO BERSAMA AGUM GUMELAR USAI MAIN SEPAKBOLA ■ mti/dok

dan negara.

Menyangkut kasus Bulog, lanjutnya, jika diukur secara jernih dan murni dari skala kepentingan nasional, substansi kasus tersebut sesungguhnya relatif tidak begitu berdampak pada nasib dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Dengan kata lain, F-TNI/Polri menilai substansi persoalan tidak layak untuk dijadikan masalah nasional apalagi sebagai alasan kuat dan mendesak untuk mengganti pemerintahan.

Kasus Bulog hanyalah titik picu utama sebuah ledakan besar dari akumulasi masalah yang sudah menumpuk di negara ini, seperti krisis kepercayaan rakyat kepada para elit politik dan ketidakpercayaan di antara elit politik sendiri.

Konflik di Tubuh Polri

Suhu politik yang meningkat akibat konflik kepentingan antarelit partai politik semakin memanas manakala ada kebijakan baru dari Presiden tentang pengangkatan Kapolri baru.

Dari awal, proses pengangkatan Kapolri tersebut dinilai tidak sesuai dengan konvensi yang selama ini berlaku. Menurut Budi, sesuai prosedur yang berlaku di Polri, setelah melalui proses Wanjakti, Kapolri memilih beberapa orang calon penggantinya dan mengajukannya kepada Presiden. Biasanya, ada dua atau tiga orang calon Kapolri yang diajukan kepada Presiden. Presiden lantas memilih satu atau dua dari tiga calon yang diajukan Kapolri untuk selanjutnya dimintai persetujuan dari

DPR RI.

Bila seandainya Presiden menilai tidak ada satu pun nama yang diajukan Kapolri layak untuk dicalonkan, maka Presiden akan mengembalikan konsep itu kepada Kapolri untuk dibahas lagi.

Dalam konteks pergantian Kapolri baru yang bermasalah tersebut, persoalannya Presiden menunjuk seorang perwira tinggi Polri sebagai Kapolri baru. Kebijakan tersebut tidak sepenuhnya melalui tahapan proses di internal Polri.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kekisruhan di dalam tubuh Polri. Sehingga, tak ayal, dualisme kepemimpinan melanda lembaga Polri dan itu potensial menciptakan konflik internal di tubuh Polri.

Bila dibiarkan berlarut-

larut, kondisi rawan di tubuh Polri mulai dari pusat sampai ke daerah bisa membahayakan keselamatan bangsa dan negara serta mengancam stabilitas keamanan nasional. Pasalnya, institusi Polri adalah sebuah sistem dan organisasi yang bersenjata, dengan tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Ciri-ciri organisasi bersenjata itu dia harus satu dan harus homogen”, demikian pernyataan Budi Harsono soal dualisme kepemimpinan Polri, menanggapi pertanyaan wartawan sesuai mengikuti Sidang Paripurna MPR 2001.

Kekisruhan di tubuh Polri itu memperburuk situasi dan kondisi politik nasional pada saat itu yang tidak kondusif dan tidak stabil. Sebab, sebelumnya telah

berlangsung krisis kepercayaan rakyat kepada para elit politik dan suasana saling tidak percaya antarelit politik sendiri.

Dalam situasi dan kondisi negara yang tidak stabil tersebut, soliditas Polri dan TNI justru sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional serta keselamatan bangsa dan negara.

Bagaimana Polri bisa fokus menjalankan tugas menjaga keamanan ibukota dan daerah di seluruh tanah air apabila di tubuh organisasi Polri sendiri terjadi dualisme kepemimpinan yang berimplikasi buruk pada kebijakan Polri di lapangan?

Gejala Serupa di TNI

Faktor lain yang menuntut F-TNI/Polri mengambil sikap adalah adanya gejala kejadian serupa di tubuh Polri yang mengimbas ke dalam tubuh TNI yang membuat institusi pertahanan negara yang dikenal sangat solid tersebut menjadi resah.

Berbagai manuver di tubuh TNI memang belum sampai menciptakan dualisme kepemimpinan di institusi tersebut. Namun, gaya berpolitik praktis untuk kepentingan sendiri sudah mulai menggejala. Hal itu ditandai oleh perilaku politik praktis dari beberapa oknum TNI dalam rangka mendapatkan dukungan politik demi memenuhi kepentingan dan ambisi pribadinya sendiri.

Sidang Istimewa MPR

Memanasnya situasi politik terutama ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, ketidakpercayaan masyarakat terhadap elit politik, dan sikap saling tidak percaya di antara elit politik sendiri, mendorong pimpinan MPR mengundang seluruh anggotanya, sekitar 500 orang anggota DPR ditambah sekitar 200 anggota dari utusan daerah dan utusan golongan, untuk mengikuti sidang paripurna MPR pada Sabtu, 21 Juli 2001.

Presiden diundang datang ke MPR untuk dimintai pertanggungjawaban. Suasana kian memanas lantaran Presiden Wahid

menganggap sidang paripurna yang akan digelar MPR tersebut ilegal alias tidak sah.

Lepas dari penolakan Presiden Wahid tersebut, pada Sabtu pagi itu, MPR tetap mengadakan Sidang Paripurna guna mengadakan pemungutan suara soal percepatan SI MPR. Seusai sesi penyampaian pandangan dari setiap fraksi, sesi pemungutan suara lewat *voting* pun diambil.

Hasil akhirnya: dari 601 anggota MPR yang hadir di sidang paripurna, 592 orang menyatakan setuju SI MPR dipercepat, dan sidang tersebut diselenggarakan pada Senin, 23 Juli 2001.

Dalam *voting* tersebut, F-TNI/Polri menyatakan dukungan dipercepatnya SI MPR. "Kita memang mendukung dipercepatnya Sidang Istimewa MPR," kata Budi Harsono. Dukungan tersebut telah melalui proses pemikiran dan pertimbangan panjang dan terus-menerus dalam mengamati perkembangan keadaan yang terjadi dan telah diproses melalui

mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Sejak awal, F-TNI/Polri memang menilai secara jernih bahwa kasus Bulog memang bermasalah namun itu belum bisa dijadikan legitimasi atau 'bahan mentah' ideal bagi diselenggarakannya SI-MPR, sebab belum terkategori masalah yang berskala nasional.

Akan tetapi, F-TNI/Polri punya dasar pertimbangan khusus. Kondisi bangsa dan negara semakin tidak menentu akibat eksese dari pertikaian politik antara Presiden yang didukung 10 persen fraksi di DPR dan mayoritas fraksi di DPR.

Pertimbangan paling utama adalah kekhawatiran pada dampak buruk dari kebijakan Presiden mengangkat Kapolri baru yang bermasalah. Konflik melanda tubuh Polri padahal dia alat pertahanan negara yang bersenjata. Kondisi ini akan membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

Di samping faktor dualisme kepemimpinan di Polri, persetujuan F-TNI/

Polri pada percepatan SI MPR tak lepas dari pertimbangan F-TNI/Polri yang mempersiapkan kondisi negara sudah semakin kritis, menyusul banyaknya aktivitas dan manuver politik saat itu.

Kondisi tersebut diperburuk oleh mengkristalnya krisis kepercayaan rakyat kepada elit-elit politik, termasuk aparat pemerintah baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Dekrit Presiden

Minggu, 22 Juli 2001. Di Istana Merdeka banyak berkumpul kalangan aktivis prodemokrasi, mulai dari tokoh-tokoh LSM sampai mahasiswa. Kedatangan mereka untuk menyatakan dukungan moral kepada Presiden Abdurrahman Wahid.

Malam harinya, Gus Dur menemui para tamunya sembari mengintrodukir niatnya untuk mengeluarkan Dekrit. Isu yang beredar luas bahwa Presiden Wahid akan mengeluarkan Dekrit Presiden pada pukul 22.00 malam itu.

Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengeluarkan Dekrit ternyata memang tidak bisa dicegah lagi. Akhirnya, pada 23 Juli 2001, tengah malam, Presiden Wahid keluar ruangan dan berdiri di hadapan wartawan, yang telah menunggu hampir tiga jam lebih, untuk mengumumkan maklumat.

Presiden Wahid mengakui bahwa maklumat itu bukan tindakan yang menyenangkan tapi dia harus mengambil tindakan demi keselamatan bangsa dan negara.

Isi lengkap maklumat atau yang sering disebut "dekrit" oleh Presiden Wahid kemudian dibacakan Juru Bicara Kepresidenan Yahya C. Staquf pada pukul 01.17.

Maklumat itu menyebutkan, "Krisis konstitusional telah memperparah krisis ekonomi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Maka dengan keyakinan dan tanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan bangsa serta berdasarkan sebagian terbesar masyarakat Indonesia, hari ini selaku



BUDI HARSONO DAN ISTERI GERAK JALAN ■ mti/dok



BUDI HARSONO PEJUANG IKHLAS ■ mti/dok

Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, saya terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa untuk memaklumkan:

(1) Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI;

(2) Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun;

(3) Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde

Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.”

Presiden Abdurrahman Wahid juga memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk “mengamankan langkah-langkah penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Tak pelak, kehebohan dan suasana hiruk-pikuk merebak di Hotel Mulia, tempat menginap Ketua MPR Amien Rais dan mayoritas anggota MPR lain.

Setelah berkonsultasi dengan kalangan pimpinan

fraksi MPR yang berkumpul di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Ketua MPR-RI, Amien Rais, menggelar jumpa pers pada pukul 02.00 dini hari. Isinya, penegasan bahwa MPR tetap melaksanakan SI MPR.

Tak lama kemudian, Akbar Tanjung, Ketua Umum DPP Partai Golkar, pun mengadakan jumpa pers. Begitupun Menkopolsus, Agum Gumelar, yang mengadakan pertemuan pers menjelang shalat subuh.

Sidang Istimewa MPR pun

akhirnya digelar pada Senin, 23 Juli 2001, siang. Petang harinya, pukul 16.53, sidang MPR yang dihadiri sebanyak 591 anggota secara resmi menyatakan persetujuannya mem-berhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI ke-4 sebab dinilai melanggar haluan negara.

MPR juga sepakat untuk mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke-5.

Menurut hemat Budi Harsono, Maklumat atau Dekrit Presiden yang kemudian berbuah pemberhentian Presiden Wahid oleh MPR dalam Sidang Istimewa justru mendelegitimasi pemerintahan saat itu.

“Dekrit atau maklumat Presiden itulah yang akhirnya membuat Sidang Istimewa MPR sah untuk digelar,” demikian argumen-tasi Budi.

Dalam hemat Budi, Dekrit Presiden merupakan sebuah langkah politis yang ditem-puh Presiden untuk menyelamatkan negara yang dipersepsikannya dalam situasi darurat.

Dekrit adalah pemecahan masalah politik di luar prosedur karena kondisi darurat. Presiden Soekarno pernah mengeluarkan Dekrit sebagai solusi atas masalah yang ada pada Kontituante.

Hanya saja, tak bisa dipungkiri keniscayaan satu hal, Dekrit akan efektif berjalan jika mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat, termasuk dari kekuatan-kekuatan politik di negara ini. Namun sebaliknya Dekrit akan gagal bila tidak mendapat-kan dukungan dari ke-kuatan-kekuatan politik yang ada. Dekrit Presiden pada tanggal 23 juli 2001 tersebut tidak mencapai sasaran karena tidak mendapatkan dukungan dari kekuatan-kekuatan politik yang ada.

Demikianlah sekelumit peran yang diemban anggota TNI dan Polri yang ter-gabung dalam F-TNI/Polri sewaktu bertugas di DPR dulu, terutama perannya di masa-masa kritis yang menentukan nasib bangsa dan negara. □ mti/af



Mengabdikan Melalui Partai Golkar

Karena pertimbangan historis dan ideologis, Budi Harsono menerima ajakan Akbar Tandjung bergabung ke Partai Golkar. Dia pun menyambut kepercayaan dan tanggung jawab sebagai Sekjen Partai Golkar.

Belum genap dua bulan menjalani masa pensiun dari dinas ketentaraan, Budi diajak Akbar bergabung ke Partai Golkar. Dia juga ditawarkan posisi Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar oleh politikus kawakan tersebut.

Budi lantas minta waktu satu minggu untuk memikirkan secara matang tawaran Akbar, yang saat itu menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar, sebelum mengambil keputusan.

Akhirnya, dengan segenap pertimbangan termasuk berbagai konsekuensi yang bakal diterima, terhitung sejak Agustus 2002, Budi yang pensiun dari TNI pada awal Juni 2002 memutuskan menerima tawaran sekaligus tantangan tersebut.

Ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi keputusan Budi Harsono bergabung ke partai politik terbesar di Indonesia itu. Dua di antaranya adalah alasan ideologis dan pertimbangan historis.

Selama meniti karir di dunia militer, mulai sejak menjalani pendidikan pembentukan militer sebagai taruna AMN di

Magelang sampai menunaikan tugas dan pengabdian akhir di Fraksi TNI/Polri DPR, dengan pangkat

terakhir Letnan Jenderal TNI, ada sebuah spirit yang senantiasa menjadi pedoman hidupnya dalam mengaktualisasikan diri. Yakni semangat bernegara dan membela negara.

Di mata seorang Budi Harsono, semangat kebangsaan, yang *nota bene* selaras dengan TNI, merupakan karakter yang melekat sangat kuat pada Partai Golkar dan menjadi kelebihannya dibandingkan Parpol-parpol lainnya. Terlebih lagi, Partai

Golkar sangat tidak asing bagi anggota Fraksi Partai Golkar (2004-2009) yang kini ditugaskan di Komisi VII (bidang Energi dan Sumber Daya Mineral) DPR itu. Budi menghabiskan sebagian besar masa 35 tahun pengabdian di bidang teritorial. Pengalaman bertugas di bidang teritorial membuat Budi mengenal dan memahami sekali seluk-beluk Partai Golkar. Sebab, dia banyak berinteraksi dengan kalangan fungsionaris, termasuk para petinggi, Partai Golkar.

Seperti dipahami, Golkar merupakan satu dari tiga jalur yang menjadi tulang



HUBUNGAN BAIK DENGAN AKBAR TANDJUNG SUDAH SEJAK LAMA ■ mti/dok

panggung pemerintahan Orde Baru, yang terkenal dengan sebutan ABG. ABG sendiri adalah singkatan dari ABRI untuk huruf A, Birokrasi untuk huruf B, dan Golongan Karya (di era reformasi berubah nama menjadi Partai Golkar) untuk huruf G.

Di berbagai forum pertemuan ABG, dia sering terlibat di dalamnya. Dalam kesempatan-kesempatan itu, dia selalu berinteraksi dengan kalangan petinggi dan fungsionaris Golkar. Karenanya, dia relatif tidak terlalu kesulitan menyesuaikan diri dengan dinamika di Golkar.

Partai Perikat NKRI

Dari pengalaman interaktif selama puluhan tahun itu, dia sangat memahami apa dan bagaimana Golkar. Seperti halnya TNI, Partai Golkar memiliki landasan berfikir, platform, dan komitmen nasionalisme serta menjadi simbol perekat sekaligus pengawal bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai Dasar Negara. Partai Golkar berperan sebagai tonggak perekat bagi bangsa Indonesia yang majemuk ini.

Bagi Budi, faktor-faktor perekat bagi tegaknya NKRI ini adalah Birokrasi, TNI, dan Parpol. Sebagai sebuah Parpol, apabila Partai Golkar sampai lemah, maka kekuatannya sebagai perekat NKRI bisa hilang.

Bertolak dari pemahaman tersebut dia kemudian mau bergabung ke Partai Golkar dengan sebuah motivasi agar dapat menyumbangkan darma baktinya kepada bangsa dan negara, melalui Parpol itu.

Sokoguru kehidupan demokrasi adalah Parpol. Demokrasi akan dapat bertumbuh dan berkembang dengan sehat jika Parpolnya berkualitas. Sejauh penilaiannya, di antara begitu banyak Parpol yang ada saat ini, hanya sedikit yang berkualitas, salah satunya adalah Partai Golkar.

Dia ingin mengabdikan diri di Partai Golkar karena sangat meyakini dan menaruh harapan bahwa proses demokrasi di negeri ini akan bisa berjalan



BUDI HARSONO DAN JUSUF KALLA ■ mti/dok

dengan baik melalui kiprah Partai Golkar.

Satu kekuatan lain yang dimiliki Partai Golkar adalah sumber daya manusia (kader)-nya yang berkualitas serta jaringan yang terstruktur dan mengakar rumput sampai ke daerah yang tersebar di seluruh penjuru tanah air.

Dari aspek kualitas SDM, misalnya, Partai Golkar punya kader yang rata-rata berkualitas sehingga persaingan di internal pun relatif ketat. SDM dari Partai Golkar adalah salah satu yang terbaik di negara ini. Menunjuk anggota Fraksi Partai Golkar di DPR, dia menegaskan, sebagian besar dari mereka

adalah kader partai yang memang besar melalui proses. Tidak ada yang karbitan.

"Saya melihat Partai Golkar memiliki struktur jaringan terbaik dari pusat sampai ke daerah dan kader yang berkualitas baik di antara partai-partai politik yang ada di Indonesia. Saya ingin agar Partai Golkar yang sudah 30 tahun dibangun ini tidak hilang ditelan zaman," papar Budi.

"Saya ingin ikut membangun Partai Golkar agar partai ini benar-benar dipercaya oleh rakyat. Alhamdulillah, sampai saat ini, Partai Golkar masih dipercayai rakyat yang diindikasikan dari perolehan

suara terbanyak pada Pemilu 2004."

Konflik Internal

Di samping alasan historis dan ideologis tersebut, ada satu faktor penting lain yang memotivasi Budi memberikan sumbangsih kepada Partai Golkar.

Apa itu? Kondisi Parpol pemenang Pemilu 2004 itu tengah diterpa konflik internal, yang potensial sekali memicu perpecahan menyusul masalah Bulog yang menimpa Akbar Tandjung.

Dia mengaku prihatin, di saat mengerahkan segenap energi guna menghadapi persoalan hukum, Akbar justru digoyang secara

politis oleh internal partainya sendiri. Ada kelompok yang hendak melemahkan posisinya.

“Andai Pak Akbar tidak punya masalah seperti itu, mungkin saya belum tentu mau bergabung ke Partai Golkar. Tapi karena ada masalah, saya terpanggil untuk membantu beliau menyelesaikan masalah tersebut,” tutur Budi.

Apakah ada kedekatan emosional Budi Harsono dengan Akbar Tandjung? “Hubungan saya dengan Pak Akbar baik dan sudah berlangsung lama. Namun, motivasi utama saya bergabung ke Partai Golkar adalah keinginan saya agar partai ini tetap utuh,” ungkapnya.

Dia melihat potensi perpecahan yang ada di Partai Golkar dapat merusak semuanya. Karena saat ini Partai Golkar adalah salah satu partai yang punya tekad dan komitmen pada NKRI dan mampu menjadi perekat bangsa ini, selain TNI dan pemerintah.

“Sangat disayangkan bila partai ini sampai pecah dan hancur, apalagi dulu TNI ikut membidani kelahirannya. Jika Partai Golkar pecah, perkembangan demokrasi di negeri ini akan menjadi berantakan. Karena itu, saya terpanggil dengan segenap kemampuan untuk ikut membantu meredakan ketegangan yang tengah berlangsung di internal Partai Golkar saat itu,” cetus Budi lagi.

Begitu bergabung dan menjalankan tugas sebagai Sekjen partai, Budi Harsono tidak menemui hambatan serius dalam menyesuaikan diri. Hal itu tak lepas dari pemahamannya yang mendalam akan seluk-beluk Partai Golkar.

Selain itu, secara pribadi, dia juga sudah lama kenal baik dengan tokoh-tokoh Golkar. Apalagi, pengalamannya dulu sebagai Assospol TNI sangat mendukungnya menjalin interaksi dengan para tokoh Golkar.

Setiap Ketua Umum Golkar mengadakan rapat-rapat tiga jalur Partai Golkar, misalnya, Budi yang ditugaskan dari Mabes TNI. Karenanya, dia kenal banyak tokoh Golkar dalam

rapat-rapat intensif tiga jalur tersebut.

Maka, ketika dia diajak Akbar Tandjung bergabung ke Partai Golkar dan diberi kepercayaan memangku jabatan Sekjen, dia relatif mampu memposisikan diri sebagai jembatan.

Peran sebagai jembatan komunikasi di tubuh Partai Golkar bisa Budi jalani berkat pengalaman sebelumnya di DPR saat menjadi Ketua Fraksi TNI/Polri, yang sering dimintai fraksi-fraksi yang saling berseteru sebagai penengah.

Kini, setelah tidak lagi duduk dalam struktur kepengurusan pusat partai terhitung sejak akhir Desember 2004, pasca-Pemilu 2004, Budi tetap menunjukkan loyalitasnya kepada Partai Golkar.

Secara pribadi, dia tetap menjalin hubungan baik dengan seluruh kader dan tokoh-tokoh Partai Golkar, dengan sikap saling menghargai.

Lagi pula, Budi menekankan, dia bergabung ke Partai Golkar semata-mata dimotivasi oleh keinginan untuk menjaga keutuhan partai dan pada gilirannya menjaga keutuhan negara ini.

Sebagai wujud konsistensi loyalitasnya kepada partai, bila ada hal-hal yang menurutnya penting, dia

tetap menyampaikan saran dan masukan kepada partai baik secara informal yakni melalui pribadi-pribadi pengurus pusat partai, maupun secara formal memberi saran melalui berbagai media yang ada. Bagi Budi, selaku kader, dia hanya mengabdikan kepada partai bukan mengabdikan kepada orang perorang.

Dulu, secara formal, sewaktu memegang posisi Sekjen Partai Golkar, dia memang bisa mempraktikkan ide/gagasannya.

Dan, ada kepuasan batin pada diri Budi tat kala seluruh jerih-payahnya dan segenap energinya yang dicurahkan kepada Partai Golkar selaku Sekjen, membuahkan hasil yang tidak mengecewakan.

“Sewaktu saya diajak Pak Akbar untuk membesarkan Partai Golkar, saya bantu sepenuh hati demi kebesaran dan



BUDI, SEKJEN DPP PARTAI GOLKAR 2000-2005 ■ mti/dok

keberlangsungan partai ini. Dan, alhamdulillah, Partai Golkar tetap utuh dan selamat dari ancaman perpecahan. Bahkan, Partai Golkar mampu tampil sebagai pemenang Pemilu 2004, yang ditandai dominasi wakilnya di DPR,” tandas Budi Harsono. □

mti/af



BUDI HARSONO BERSAMA SEJUMLAH PETINGGI GOLKAR (IRSJAD SUDIURO, BUDI HARSONO, AKBAR TANDJUNG, MULADI, COSMAS BATUBARA DAN MARWAH DAUD ■ mti/dok

Dari Teritorial ke Pentas Politik

Selama 35 tahun berkarier di militer, sebagian besar tugas Budi Harsono dihabiskan di bidang teritorial (1967-2002). Tugas sebagai Kasdim, Dandim, Kasrem, Danrem, Aster, hingga Assospol pernah dijalani Budi.



BUDI HARSONO DAN AKBAR TANDJUNG ■ mti/dok

Dijelaskan oleh Budi, hakikat tugas teritorial adalah bergaul dengan masyarakat. Sama dengan ajaran agama, kita harus banyak bersilaturahmi. Tugas teritorial memang pada dasarnya membina masyarakat.

Atas dasar itu, orang teritorial selalu memegang prinsip dalam bertugas, yakni tidak boleh punya musuh, justru harus punya banyak teman dan sahabat.

Ada filosofi tugas di teritorial: Bersikap baik dengan semua orang, semua kalangan, dan semua lapisan masyarakat. Sampai-sampai, karena sering bergaul dengan masyarakat luas,

banyak kalangan yang tidak percaya: *kok* karakter Budi Harsono tidak seperti seorang militer. Tidak seperti tentara kebanyakan.

Pergaulan dengan masyarakat sangat membantu kelancaran tugas Budi saat terjun ke pentas politik praktis, yang diawalnya sebagai anggota Fraksi TNI/Polri di DPR-MPR.

“Pengalaman teritorial sangat membantu saya mengemban tugas di bidang politik di DPR/MPR dulu. Begitu pun halnya pergaulan saya dengan lingkungan partai politik merupakan bagian dari tugas-tugas teritorial. Jadi tidak sulit bagi saya bergaul dengan kalangan

aktivis/fungsionaris Parpol, bergaul dalam arti kata yang akrab. Saya punya akses dengan kalangan tokoh Parpol-parpol sehingga itu membantu saya menjalankan tugas di Fraksi TNI/Polri.”

Kesenjangan komunikasi

Ada kesimpulan yang diperoleh Budi selama terjun ke dunia politik praktis selama 4,5 tahun bertugas di Fraksi TNI/Polri DPR-RI, baik sebagai anggota biasa, wakil ketua, maupun ketua fraksi.

Menurutnya, hampir semua masalah di negara ini timbul akibat adanya kesenjangan komunikasi antara rakyat dan pemerintah serta antara elit-elit politik. Terlebih dalam kehidupan politik, komunikasi merupakan hal yang sangat dominan pengaruhnya.

Dia mulai bertugas di DPR di kala bangsa ini tengah menghadapi masa kritis dan masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Dia menilai, jalinan komunikasi antara aparat pemerintah (birokrasi) dan masyarakat luas, di awal reformasi bergulir, relatif tidak berlangsung harmonis.

Ada sejumlah faktor penyebab timbulnya masalah yang menepa bangsa ini. Salah satu faktor penting namun berakibat fatal adalah kesenjangan komunikasi antara rakyat dan pemerintah.

“Karena itu, dengan berbagai lapisan masyarakat, saya berusaha untuk bisa saling berkomunikasi dengan menciptakan ruang dialog,” jelasnya.

Ketika menjabat Ketua Komisi II DPR (bidang Pemerintahan Dalam Negeri), dia berusaha semaksimal



BUDI HARSONO ■ mti/dok

mungkin membangun dan menciptakan ruang komunikasi dengan masyarakat luas, termasuk dengan tokoh-tokoh gerakan reformasi.

Dia menambahkan, pihaknya membuka ruang dialog agar tidak terjadi kesenjangan komunikasi dalam rangka mengatasi persoalan yang dihadapi bangsa saat itu. Baginya komunikasi dengan masyarakat harus selalu dibangun dan dijalin.

Jangan sampai terjadi kesenjangan komunikasi apalagi menyangkut persoalan-persoalan bangsa yang menuntut pemecahan bersama. Karenanya, aspirasi dari berbagai elemen masyarakat yang datang ke Senayan ditampung dan direspons.

“Dalam kapasitas Ketua Komisi II, pada 1998, saya undang Pak Amien Rais dan kawan-kawan datang ke DPR untuk berdialog dengan Komisi II. Saat itu belum terjadi pergantian kekuasaan.



BUDI HARSONO BERSAMA AGUNG LAKSONO DAN SLAMET EFFENDY YUSUF ■ mti/dok

Mahasiswa belum masuk dan menduduki Gedung DPR/MPR. Dan, Pak Harto belum mengundurkan diri.”

Menurutnya, seandainya tidak terjadi kesenjangan komunikasi, tidak akan ada masalah. Semua masalah akhirnya mengemuka, dalam pengamatan Budi, adalah akibat terjadinya kesenjangan komunikasi.

Misalnya, komunikasi antartokoh nasional sendiri atau antara tokoh-tokoh nasional dan pemerintah. Sehingga, tidak bisa saling berkomunikasi dengan baik. Sikap saling mencurigai yang justru lebih mengemuka.

Hal itu akibat dari tersumbatnya saluran komunikasi sehingga satu sama lain tidak saling memberikan informasi, dan pada akhirnya, muncul kesimpulan sendiri-sendiri, yang tentu saja sangat apriori sifatnya.

Sejarah Terulang

Demokrasi hanya bisa dibangun melalui peran partai politik (Parpol) yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Aspirasi rakyat disalurkan melalui Parpol. Dengan kata lain, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas Parpol-parpol-nya. Demokrasi ditumbuh-kembangkan melalui Parpol.

Meskipun presiden/wakil

presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dipilih secara langsung, namun sistem demokrasi yang dianut, diterapkan, dan ditumbuh-kembangkan di Indonesia sejatinya adalah sistem perwakilan.

Walaupun setiap warga negara memiliki hak politik (suara), demokrasi yang dikembangkan tetap bertumpu pada sistem perwakilan. Perwakilan itu sendiri dipilih melalui mekanisme Parpol. Proses pengambilan keputusan setiap kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah melalui perwakilan Parpol yang duduk di DPR atau DPRD.

Fakta lain, dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada), calon gubernur, calon bupati atau calon walikota harus diajukan oleh Parpol, yang memiliki perwakilan di DPRD daerah bersangkutan yang menyelenggarakan Pilkada tersebut. Singkatnya, peran Parpol sangat menentukan kehidupan demokrasi.

Parpol diibaratkan sel inti dalam pembangunan tubuh demokrasi di negeri ini. Namun, fenomena Parpol di tanah air dewasa ini cenderung tidak menampilkan peran idealnya. Malah, kontraproduktif bagi demokrasi, kondisi riil menunjukkan

semakin menipisnya kepercayaan rakyat kepada Parpol. Bahkan, sebagian rakyat terlanjur memandang apriori terhadap manfaat dari kiprah dan peran Parpol.

Itulah problema dan tantangan yang dihadapi bangsa ini saat ini, yang, ironisnya, relatif sama dengan yang terjadi di masa lalu. Sejarah mencatat, peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru merupakan akibat dari krisis kepercayaan rakyat kepada partai politik yang ada.

Lembaga Konstituante menemui jalan buntu dalam mengambil keputusan dan akhirnya membuahkan krisis kepercayaan rakyat kepada Parpol.

Bila menyimak kondisi peranan Parpol dalam kehidupan demokrasi saat ini, ada semacam simpul bahwa sejarah terulang kembali karena sebagian masyarakat berpendapat bahwa sebagian Parpol yang ada tidak sepenuhnya memikirkan kepentingan dan nasib rakyat.

Fenomena itu semakin diperparah dengan banyaknya anggota DPRD di daerah yang terlibat dalam kasus korupsi. Akibatnya, rakyat semakin berkurang kepercayaannya kepada Parpol.

Padahal Parpol dibentuk

untuk mengurus dan melayani kepentingan rakyat. Tengok saja, saat kampanye Pemilu, setiap Parpol menebar janji-janjinya nan muluk akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pokoknya pro rakyatlah.

Tapi Parpol-parpol tersebut belum bisa membuktikan dan memenuhi janji-janjinya saat kampanye itu. Kenyataan demikian tak pelak menorehkan satu kesadaran kritis di benak rakyat, Parpol-parpol ternyata hanya hidup saat Pemilu. Begitu hiruk-pikuk Pemilu berakhir, sosok Parpol pun seakan-akan berkurang kegiatannya.

Itu mengindikasikan Parpol telah mempertontonkan sebuah perilaku demokrasi yang kurang konsisten di hadapan rakyat. Ini tantangan terbesar bagi bangsa ini, bagaimana Parpol harus bisa terus memupuk kepercayaan dari rakyat.

“Jangan hanya berlakon bagus saat akan Pemilu semata-mata untuk menarik dukungan rakyat. Justru ketika terjadi bencana alam (tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus) di berbagai daerah di tanah air, misalnya, Parpol harus bisa membuktikan diri secara konkret berbuat untuk meringankan beban penderitaan rakyat,” tandasnya.

Kondisi lain yang diharapkan dilihat dari peran Parpol, dia menambahkan, adalah terkait dengan semakin menipisnya kesadaran bernegara dan kesadaran bela negara pada warga negara Indonesia.

Selain pemerintah melalui jajaran birokrasinya, hemat Budi, Parpol adalah aktor utama yang sangat diharapkan berperan dalam memberikan pendidikan politik pada kader dan simpatisannya. Pendidikan politik tersebut antara lain adalah menumbuh-kembangkan kesadaran bernegara dan kesadaran bela negara kepada seluruh warga negara Indonesia.

Berbagai hal tersebut di atas merupakan tantangan bagi Parpol-parpol untuk berbenah diri. Raih kepercayaan masyarakat karena demokrasi hanya dapat berkembang dengan baik bila Parpol-parpol berkualitas! □

mti/af

Meniti Karier Militer dengan Ikhlas

Menunaikan tugas yang diamanatkan kepada dirinya dengan sikap penuh ikhlas, dan meyakini adanya tangan Tuhan di balik setiap tanggung jawab yang diserahkan kepadanya, adalah etos seorang Budi Harsono dalam mengabdikan diri di dunia ketentaraan selama 35 tahun.



BUDI HARSONO MASUK AMN ■ mti/dok

Letnan Jenderal (Purn) TNI Budi Harsono adalah lulusan Akademi Militer Nasional (AMN) tahun 1967. Dia termasuk yang bernasib baik di antara sebanyak

231 orang rekan seangkatannya, perwira lulusan AMN 1967.

Dikatakan demikian, karena hanya ada empat orang yang sukses menapaki jenjang kepangkatan sampai bintang tiga, dan seorang di antaranya adalah Budi Harsono.

Selain Budi Harsono (jabatan terakhir sebagai Ketua Fraksi TNI/Polri di DPR-RI) sendiri, tiga orang rekan seangkatannya yang juga menyandang bintang tiga adalah A.M. Hendropriyono (jabatan terakhir Kepala Badan Intelijen Nasional/ BIN), Hari Sabarno (jabatan terakhir Wakil Ketua MPR-RI), dan Farid Zainuddin (jabatan terakhir Wakil Kepala

BIN).
A.M. Hendropriyono

dan Hari Sabarno, belakangan, memperoleh kenaikan pangkat kehormatan dari negara menjadi bintang empat (Jenderal TNI), setelah



BUDI HARSONO SAAT MENJABAT ASSOSPOL TNI ■ mti/dok

Tugas Dekatkan Diri kepada Tuhan

Dari berbagai pengalaman hidupnya selama 35 tahun bertugas di dunia ketentaraan, ada banyak hikmah yang dia petik. Seringnya menghadapi masa-masa kritis selama menjalankan tugas, kemudian sering berpindah-pindah tempat tugas, membuat dirinya dekat dengan Tuhan, Sang Maha Kuasa. Keyakinan spiritual bahwa hidup-mati anak manusia berada di tangan Sang Maha Pencipta senantiasa melekat pada dirinya.

Terlebih, misalnya, saat menghadapi masa-masa kritis dalam mengemban tugas operasi bersama pasukannya ke beberapa wilayah konflik, dia merasa sangat perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, dan memohon petunjuk-Nya agar tidak salah dalam melangkah.

Setidaknya, Budi Harsono pernah menjalani tiga kali tugas operasi. Pertama, tugas operasi ke perbatasan Kalimantan Barat dengan

Sarawak, Malaysia, pada tahun 1971. Saat itu, dia menjadi Danki Yonif 406 Gombang, Jawa Tengah, berpangkat Kapten. Tugas operasi ini berlangsung selama satu tahun.

Kedua, tugas operasi ke Timor Timur (Timtim) pada tahun 1981. Saat itu, dia menjabat Wakil Komandan Yonif 122 Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berpangkat Mayor.

Ketiga, tugas operasi (kembali) ke Timtim pada tahun 1985. Ketika itu, dia menjabat Komandan Yonif 312 Kala Hitam Subang, Jawa Barat, berpangkat Letnan Kolonel.

Menurutnya, kepada Tuhan, bukan hanya memohon perlindungan untuk diri sendiri, tapi juga untuk seluruh prajurit yang dipimpinnya. Dia menunjuk contoh, ketika membawa satu batalyon melaksanakan tugas operasi, selain bertanggung jawab atas nasib 700 orang anggota

keduanya resmi pensiun dari dunia ketentaraan.

Selama 34 tahun berkarir di dunia militer, berbekalkan semangat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, mantan Assospol Mabes TNI (1997) ini berusaha semaksimal mungkin mengabdikan diri sebagai perwira pejuang dan pembela kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

Jenjang kepangkatan dan kariernya di dunia ketentaraan, mulai dari tugas pertama sebagai Komandan Peleton (Danton) Batalyon Infanteri (Yonif) 406, Gombong, Jawa Tengah (1968-berpangkat Letnan Dua) hingga tugas terakhir sebagai Ketua Fraksi TNI/Polri di DPR-

RI (2002-berpangkat Letnan Jenderal TNI), diraih Budi Harsono secara alamiah.

Merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi Budi, dia berhasil meniti karir militer sampai memperoleh pangkat maksimal tanpa sama sekali lewat pendekatan jalur lobi sana dan lobi sini. Karir militernya berjalan mulus bukan lantaran dia kenal dengan atasan, atau apalagi memakai jalur relasi.

Baginya, bekerja (tugas)



BUDI HARSONO DKK MENYEBERANG SUNGAI DI TIMTIM ■ mti/dok

adalah amanah dan, diyakininya, tangan Tuhan berperan utama. Karenanya, sejak dulu Budi mengemban setiap tugas yang diberikan Negara kepadanya dengan penuh pengabdian, seraya bersandar pada sebuah prinsip dan filosofi hidup yang sampai kini dia pegang: "BEKERJALAH DENGAN IKHLAS, TUHAN AKAN MENJAGA REZEKI KITA".

Selama 34 tahun sebagai prajurit TNI, dia sering berpindah-pindah tempat tugas. Antara lain, delapan tahun di Jawa Tengah (1968-1976), tujuh tahun di Sumatera Utara (1976-1983), sembilan tahun di Jawa Barat (1984-1989 dan

1992-1994).

Jabatan Danton, Wadanki, Danki, Kasi Ops selama delapan tahun dari tahun 1968-1975 di Yonif 406, Gombong, yang menjadi bagian dari Kodam IV Diponegoro, Jawa Tengah.

Pada 1975, dia sempat mengikuti pendidikan Suslapa selama enam bulan di Pusat Persenjataan Infanteri (Pussenif), Bandung. Setelah delapan tahun bertugas di Kodam IV Diponegoro, sekitar akhir 1976, masih berpangkat Kapten, dia dipindah-tugaskan ke Kodam II Bukit Barisan, Medan, Sumatera Utara, dengan memegang jabatan Perwira Paban Madya/



SANTAI SEJENAK DI SELA TUGAS OPERASI ■

pasukan yang dipimpinnya, secara tak langsung dia juga memikul beban pada nasib anak dan istri mereka.

Baik isteri prajurit yang sudah berkeluarga maupun orang tua para prajurit yang masih bujangan menitipkan kepadanya selaku komandan. Rasa tanggung jawab itu dan agar tugas lancar mendorongnya untuk selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tugas operasi seperti itu semakin menempa kadar keimanan dan ketakwaannya kepada Sang Penentu hidup dan matinya manusia.

Bila orang akan mati sudah ada takdirnya masing-masing. Jadi tidak boleh takut akan kematian karena sudah ada takdirnya. Tapi kita juga harus tetap berusaha agar kita dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Dia selalu membekali diri dengan ketakwaan kepada Tuhan dalam menjalankan setiap tugas. Semua keputusan atau langkah yang ditempuhnya, dia sangat percaya, tak lepas dari petunjuk-Nya. Kepada setiap prajurit dia juga ingatkan agar selalu mendekatkan diri kepada

Tuhan.

Tugas operasi berperang melawan gerilya, ungapnya, mengharuskan setiap prajurit berani, aktif bergerak, dan banyak inisiatif agar nyali musuh melemah. Selain itu, dalam perang melawan taktik gerilya, pasukan harus berani bergerak dalam regu-regu kecil. Dia sendiri memberikan contoh konkret di lapangan kepada prajurit-prajurit yang dikomandoinya.

"Walaupun memimpin 700 orang, saya perintahkan pecah menjadi kelompok-kelompok kecil untuk melawan taktik perang gerilya. Misalnya, saya perintahkan bergerak persepuluh orang. Saya sendiri ikut serta di dalamnya dengan memimpin sembilan orang," tuturnya.

Dengan demikian, lanjutnya, pimpinan dengan bawahan menghadapi risiko yang sama. Hal itu juga berguna dalam upaya menciptakan rasa kesatuan, kebersamaan, dan persaudaraan. Apalagi, dalam menjalankan satu tugas di daerah operasi kesetiakawanan adalah sebuah keharusan. □ mti/af



BUDI DI MEDAN PERJUANGAN, BEBAN DAN TANGGUNG JAWAB DI PUNDAK ■ mti/dok

Karo Operasi Kodam II Bukit Barisan. Empat tahun jabatan perwira staf Kodam itu diembannya dan pangkatnya naik menjadi Mayor.

Lepas dari sana, pada akhir tahun 1981, dia ditugaskan di pasukan sebagai Wakil Komandan Batalyon Infanteri (Wadanyonif) 122 Tebing Tinggi, Sumut. Tugas di Yonif 122 relatif sebentar karena sekembalinya dari Tugas Operasi ke Timor Timur pada akhir tahun 1981, masih berpangkat Mayor, dia dimutasi lagi sebagai Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0206 di Rantau Prapat, Labuan Batu, Sumut.

Setahun bertugas Kodim 0206 Rantau Prapat, pada 1982, dia dipindahtugaskan ke kota Medan dan menjabat Kasdim 0201 Kota Besar Medan. Dalam kurun waktu setahun (1982-1983) bertugas di Kasdim 0201 Tabes Medan, dia mendapat promosi

Bukit Barisan, sekitar pertengahan 1983, dia kembali harus meninggalkan tugas sebagai perwira lapangan karena mendapat tugas lain yang sangat menunjang perkembangan karirnya, yakni mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung selama satu tahun. Selesai Seskoad (1984), dia mendapat tugas baru sebagai Komandan Batalyon Infanteri (Yonif) 312 Kala Hitam di di Subang, Jawa Barat, yang berada dalam wilayah komando Kodam III Siliwangi, Jawa Barat.

Kemudian, pada 1986, dia mendapat kepercayaan untuk menjabat Komandan Kodim (Dandim) 0617 Majalengka, Jabar. Tugas sebagai Dandim 0617 Majalengka diembannya selama dua tahun.

Masih di wilayah komando Kodam III Siliwangi, dia bertugas selama satu tahun (1988-1989) sebagai Kepala Staf Komando Resort Militer (Kasrem) 061 Bogor, Jabar.

Setelah lima tahun mengabdikan diri di

Kodam III Siliwangi, pada 1989, Budi Harsono mendapat tanggung jawab baru sebagai Asisten Teritorial (Aster) Divisi I Kostrad yang berpusat di Cilodong, Bogor, Jabar. Selaras dengan tanggung jawab dan konsekuensi tugas barunya itu, dia mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat dari Letkol menjadi Kolonel. Jabatan itu diembannya sampai tahun 1992.

Pada 1992-1993, dia bertugas sebagai Aster Kodam III Siliwangi, Bandung, Jabar. Pada 1993-1994, dia bertugas sebagai Komandan Korem (Danrem) 063 Cirebon, Jabar. Pada akhir 1993, Kolonel Budi Harsono kembali mengikuti pendidikan lanjutan di Lemhannas Reguler KRA XXI selama satu tahun.

Seusai mengikuti Lemhannas, pada 1995-1996, dia ditugaskan sebagai Paban (Perwira Bantuan) Sospol Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta. Pada pertengahan 1996, dia mendapatkan kepercayaan dari Mabes TNI sebagai Wakil Asisten Sospol (Waassospol)

kenaikan pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol).

Setelah bertugas selama tujuh tahun di Kodam II



BUDI HARSONO MEMBACA PETA ■ mti/dok



LETJEN TNI PURN BUDI HARSONO BERJUANG DENGAN IKHLAS ■ mti/dok

Mabes TNI.

Sejalan dengan tanggung jawab tugas yang diembannya itu, dia mendapat kenaikan pangkat satu tingkat dari Kolonel menjadi Brigadir Jenderal TNI. Kini, dia telah menyandang bintang satu di pundaknya.

Baru enam bulan menjabat Waassospol

Mabes TNI (pada 1997), dia dipercaya untuk memangku jabatan Assospol Mabes TNI dan mendapat promosi kenaikan pangkat Mayor Jenderal TNI (bintang dua).

Perjalanan karir dan pangkat Budi Harsono berjalan lancar. Hanya dalam kurun waktu dua

tahun (1995-1997), Mabes TNI memberikannya dua kali kenaikan pangkat: 1995-1996 (Kolonel-Brigadir Jenderal) dan 1996-1997 (Brigadir Jenderal-Mayor Jenderal).

Pasca-Pemilu 1997, dia mendapat kepercayaan dari Mabes TNI untuk menjalankan tugas di bidang sosial politik TNI

dan bergabung dengan Fraksi TNI/Polri di DPR. Jabatan Assospol TNI yang ditinggalkannya digantikan oleh Mayjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, yang kini menjadi Presiden RI.

Seperti diketahui, saat itu, TNI memiliki dwifungsi yakni fungsi pertahanan-keamanan (Hankam) dan fungsi sosial-politik (Sospol). Anggota TNI yang bergabung dalam F-TNI/Polri mengemban tugas untuk fungsi Sospol TNI.

Di Senayan, dia langsung diserahi jabatan dan dipercaya menduduki posisi Ketua Komisi II DPR yang mengurus bidang Pemerintahan.

Pasca Pemilu 1999, dia kembali ditugaskan Mabes TNI di DPR untuk masa bakti 1999-2004 dan menjabat sebagai Wakil Ketua F-TNI/Polri. Pada tahun 2001, dia ditugaskan Mabes TNI sebagai Ketua F-TNI/Polri di DPR, menggantikan Letjen TNI Ahmad Rustandi, yang memasuki masa pensiun.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, posisi Ketua F-TNI/Polri harus dipegang oleh seorang perwira bintang tiga. Budi Harsono pun mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat dari bintang dua (Mayor Jenderal TNI) menjadi bintang tiga (Letnan Jenderal TNI). Dengan demikian, secara jenjang kepangkatan di militer, dia telah mencapai titik puncaknya.

Jabatan Ketua F-TNI/Polri dipegangnya sampai pertengahan tahun 2002. Bersamaan dengan itu, penerima lima Bintang tanda penghargaan, di antaranya Bintang Kartika Eka Paksi, Bintang Yudha Dharma, dan Bintang Dharma, ini pensiun dari dunia ketenteraan setelah selama 35 tahun mengabdikan hidupnya sebagai seorang Sapta Margais sejati. □ mti/af

Bekerja Ikhlas, Tuhan

Hidup ini mengalir saja seperti sifat air. Apa adanya. Keikhlasan dalam bekerja, berbuat dan menjalankan setiap amanah yang diberikan. Bekerja adalah ibadah.



BUDI DAN REKAN SANTAP SIANG DI SELA OPERASI ■ mti/dok

Bila kita ikhlas dalam melaksanakan pekerjaan, maka Tuhan akan menjaga rezeki kita. Ikhlas akan memberikan kekuatan yang sangat besar.

“Saya sangat yakin bahwa jika kita ikhlas, Tuhan akan menjaga rezeki kita. Semakin kita ikhlas, semakin besar kekuatan yang datang pada kita. Kalau kita meyakini agama kita dan kita laksanakan, Insya Allah, hidup kita akan dijaga-Nya,” tutur Budi.

Hanya saja, keikhlasan itu bisa dicapai bila kita tidak mempunyai pamrih. Sekali melaksanakan tugas dengan motivasi pamrih maka itu artinya tidak ikhlas menerima amanah yang diberikan. Sebab, mengedepankan pamrih sama artinya menghitung untung-rugi.

Dari dulu sampai sekarang, di mana pun dan kapanpun dia bertugas dan ditugaskan oleh negara, dia selalu memegang teguh sebuah filosofi hidup: “Bila kita bekerja dengan ikhlas, percaya kepada-Nya, Tuhan akan menjaga rezeki kita”.

Filosofi hidup itu yang dia pegang

sampai sekarang. Baginya, bekerja merupakan ibadah. Karena itu dia selalu menunaikan pekerjaan dengan

penuh ikhlas. Soal rezeki, Tuhan pasti akan mengaturnya. Keikhlasan dalam bekerja pada akhirnya akan berbuah kebaikan. Buktinya?

“Dari mulai berpangkat Letnan Dua sampai Letnan Jenderal, saya tidak pernah lobi sana atau lobi sini untuk memperoleh jabatan, apalagi memintaminta posisi. Saya juga tidak pernah, misalnya, mendekati Asisten Personil TNI untuk mendapatkan promosi pangkat,” ucapnya.

Dia sangat yakin bahwa jika kita ikhlas menjalankan tugas, Tuhan pasti membimbing kita. Selama bertugas di militer, dia merasakan begitu banyak karunia yang diberikan oleh-Nya. Tangan Tuhan benar-benar mengatur dan menentukan nasibnya.

Sewaktu menjabat Paban Sospol Mabes ABRI, sekadar contoh, dia mengaku sangat ikhlas dan enjoy menjalankan tugas meski dia harus bekerja sampai larut malam, membuat konsep pidato, amanat atau makalah seminar untuk Panglima ABRI. Bahkan, tuntutan tugas itu kadang kala mengharuskannya untuk jarang pulang ke rumah dan bertemu keluarga. Dia mesti begadang sampai larut malam atau bahkan hingga dini hari guna menyiapkan bahan-bahan tersebut.

Seusai mengerjakan tugas, dia pulang sendiri ke rumah pada tengah malam atau dini hari. Tidak bertemu orang lain. Hanya ditemani sopir. Dia tidak merasa harus menonjolkan prestasi kerjanya kepada atasan, misalnya, agar mendapatkan pujian sebab dia memang ikhlas menjalani



BUDI DAN PASUKAN MENURUNI LERENG BUKIT DI HUTAN TIMTIM ■ mti/dok

Menjaga Rezeki Kita

rutinitas tugas tersebut.

“Motivasi kerja saya tetap terjaga karena saya memang ikhlas menjalankan tugas-tugas yang diemban, meski tidak ada yang melihat. Sifat saya tidak pernah berubah, dari dulu tidak suka menonjolkan hasil kerja,” cetusnya.

Kembali pada prinsip hidupnya, dia meyakini Tuhan mengetahui kadar keikhlasannya bekerja, walaupun orang lain tidak tahu. Tuhan jua yang menjaga rezeki apa yang pantas untuk dirinya.

“Alhamdulillah, saya mampu meraih pangkat maksimal Bintang Tiga di militer. Semua saya serahkan secara total kepada Tuhan. Soal rezeki, Tuhan yang menjaganya. Dan itu terbukti,” tegasnya lagi.

Satu hal yang ada di benaknya setiap waktu mengerjakan tugas yang diamanatkan kepadanya: Dia hanya ingin menyelesaikan pekerjaan dengan ikhlas dan sebaik-baiknya. Filosofi hidup itu dia pegang dan yakini terus sejak puluhan tahun lalu sampai sekarang meski tidak aktif lagi di dunia militer.

Dia sangat menyadari, komunikasi memang perlu misalnya agar bisa dikenal dan diperhatikan orang serta

unjuk kemampuan diri. Disadari olehnya, mungkin apa yang dia lakoni selama ini kurang bagus dari aspek komunikasi sebab dia dianggap tidak mampu menjual dan memamerkan prestasi dan kualifikasi dirinya kepada atasan. Tidak bisa memanfaatkan ide. Tidak bisa memposisikan diri populer di mata atasan.

Tak pernah terbersit sedikitpun di pikiran Budi untuk meminta-minta jabatan. Alasannya sederhana saja. Baginya, jabatan adalah sebuah amanah. Sedangkan amanah itu sendiri merupakan sebuah karunia Tuhan yang sudah ditakar oleh-Nya.

Dia meyakini secara spiritual, setiap jabatan yang diamanahkan atau tugas yang dipercayakan kepada dirinya sudah pasti telah Tuhan takarkan dan sesuaikan dengan kemampuan yang dia miliki.

“Seandainya kita meminta-minta jabatan, lantas kemudian diberi jabatan tertentu, bagaimana kalau ternyata kita tidak sanggup menjalankannya?” tanya Budi dengan nada retoris.

Dia meyakini sekali, setiap tugas yang diamanatkan kepadanya memang yang terbaik untuk dirinya. Karena itu, apapun tugas yang diamanatkan kepadanya dan di manapun dia ditempatkan, dia berusaha semaksimal mungkin mengerjakannya dengan sebaik-baiknya dan penuh keikhlasan.

Dan, Alhamdulillah, Budi Harsono ternyata mampu menunaikan setiap tugas yang diamanatkan kepada dirinya karena Tuhan memang sudah mengukur batas kemampuan (kelebihan dan kekurangan) yang dia miliki. □ mti/af



BUDI HARSONO DAN SANG ADIK BRIGJEN TNI PURN BUDI TRIARSO MANTAN DIR TOPOGRAFI SUAD ■ mti/dok



SAAT SERTIJAB ASSPOL TNI DARI MAYJEN TNI BUDI HARSONO KEPADA MAYJEN TNI SUSILO BAMBANG YUDHOYONO YANG KINI JADI PRESIDEN RI ■ mti/dok

Masa Kecil, Remaja, dan Dewasa

Berasal dari keluarga berekonomi pas-pasan, dan sebagai anak tertua dari sembilan bersaudara, Budi Harsono meraih kesuksesan hidup dengan kebersahajaan.

Tokoh yang satu ini lahir di Yogyakarta, 13 September 1946. Dia adalah anak tertua dari sembilan bersaudara, buah kasih pernikahan pasangan berbahagia Aris Moenandar dan Salamah. Aris Moenandar, Sang Ayah, adalah seorang abdi negara yang bekerja di Jawatan Radio Republik Indonesia (RRI). Sang Ibu, Salamah, hanya lah seorang ibu rumah tangga biasa.

Kedua orang tuanya memberikan perhatian dan kasih sayang penuh kepada anak-anaknya. Budi dan adik-adiknya juga diasuh, diajarkan, dididik, dan dibekali nilai-nilai budi pekerti, etika, moralitas, dan ajaran agama.

Peranan ayahnya besar sekali terutama dalam hal menanamkan tanggung jawab dan keteladanan kepada keluarga. Karena Sang Ayah sering berpindah-pindah tugas ke luar daerah, praktis Sang Ibu yang sering menemani keseharian Budi dan adik-adiknya.

Tapi, mengingat intensitas pertemuan lebih banyak dengan ibu dibandingkan dengan ayah yang sering bertugas di luar daerah, praktis sehari-hari figur ibu lah yang paling dominan mewarnai pertumbuhan dan perkembangan Budi beserta adik-adiknya. Sang Ibu lah yang sehari-hari mengasuh, mendidik, dan mengawasi secara intensif anak-anaknya.

Lepas dari kondisi itu, ada karakter khas Sang Ayah yang agaknya menurun pada diri Budi Harsono, yakni sikap tidak pemarah dan tidak banyak bicara.

“Ayah saya memang tipe orang yang tidak pernah marah. Beliau seorang yang pendiam. Tidak banyak omong. Kalau tidak merasa perlu dan penting sekali, ayah tidak ngomong,” ucap Budi.

Aris Moenandar dan Salamah sangat mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya sebagai bekal kesuksesan hidup mereka di kemudian hari. Dia dan adik-adiknya lebih diarahkan untuk berkonsentrasi pada pelajaran sekolah.

Jenjang pendidikan dasar (SR) dan pendidikan lanjutan (SMP) selama sembilan tahun (1952-1961) diselesaikan Budi di kota kelahirannya, Yogyakarta. Sedangkan, bangku pendidikan SMA dihabiskannya di kota Manado, Sulawesi Utara.

Si Anak Bandel

Semasa tinggal di Yogyakarta, Budi berada di lingkungan yang terhitung kurang baik. Karena itu, kedua orang tuanya —terlebih sang ibunda— sangat selektif dan cenderung protektif pada pergaulan Budi dan adik-adiknya.

Batasan yang diberlakukan orang tuanya dalam hal pergaulan dengan lingkungan, bagi Budi, memang ada untung-ruginya. Tapi, apa kelebihanannya dan apa kekurangannya baru bisa ditakar dan dipahami di belakang hari.

Namun, pergaulan yang salah dengan lingkungan di luar rumah, termasuk di sekolah, agaknya cukup mempengaruhi pola perilaku Budi. Menurut pengakuannya, sewaktu



BUDI HARSONO ■ mti/dok

duduk di bangku SMP di Yogyakarta, dia termasuk anak bandel. Perilaku teman-temannya dulu yang nakal, tanpa disadarinya, telah mempengaruhi perilakunya.

Akibatnya, dia tidak bisa lagi konsentrasi dan tak mepedulikan lagi pelajaran di sekolah. Bersama beberapa teman satu kelas yang menjadi gengnya, dia selalu membuat ulah.

Kendati demikian, kenakalan dia bersama teman-temannya dulu tidak seperti kenakalan remaja sekarang. Bukan kenakalan yang merugikan orang lain. Paling-paling, yang kerap dilakoni dia dan teman-temannya adalah membolos, minggat dari sekolah, keluyuran di luar sekolah, atau berkelahi.

Mengendap-endap keluar kelas dengan menerobos jendela, di saat guru sedang serius memberikan pelajaran di kelas, adalah salah satu kebiasaan buruk dan ‘keahlian’ Budi saat itu.

Peringatan keras dan teguran dari guru dan sekolah seakan tak mempan untuk menyadarkan Budi. Sehingga, akibatnya, sejak Kelas 1 SMP dan terutama pada Caturwulan I Kelas 2 SMP, nilai rapornya praktis dipenuhi warna merah.

Nasehat Sang Ayah

Kebengalan seorang Budi Harsono mulai berubah drastis tatkala dia mendapat nasehat dari sang ayahanda, Aris Moenandar, yang kebetulan baru pulang dari tugas di daerah.

Dikisahkan oleh Budi, begitu mengetahui nilai rapor anaknya yang nyaris tidak ada wana hitam atau birunya sama sekali, ayahnya lantas memanggil dirinya.

Budi yang saat itu sudah siap dimarahi habis-habisan justru dibuat heran oleh sikap sang ayahanda. Sebab, dengan sikap kebabakan dan gaya bicara yang lemah lembut, tanpa sedikitpun dipenuhi bernada penuh amarah, Aris Moenandar justeru memberikan nasehat kepada Budi.

Lewat pesan-pesan nasehat tersebut, Aris memantik kesadaran hakiki Budi bahwa, selaku anak tertua, tanggung jawabnya sangat diandalkan oleh kedua orang tuanya guna membimbing adik-adiknya.

Pendekatan yang dipakai Aris Moenandar untuk mengubah pribadi Budi rupanya membuahkan hasil. Teguran halus dari sang ayahanda tercinta ternyata memecut kesadaran dan membuka pikiran positif Budi untuk mengubah diri.

Akhirnya, dia menyadari —setelah menerima wejangan dari sang ayah— betapa salah dan merugi dirinya karena telah mengabaikan perjuangan kedua orang tuanya untuk

menyekolahkan agar kelak bisa berguna bagi keluarga dan bangsa. "Mengapa saya malah mengecewakan mereka?" ucapnya kala itu dalam hati dengan nada bertanya kepada diri sendiri.

Dia benar-benar membatasi pergaulannya dengan teman-teman gengnya. Dia memutuskan untuk menjaga jarak dengan mereka, dan tidak akan pernah bergabung atau ikut-ikutan lagi dengan pola pergaulan mereka. Kalaupun bertemu dengan mereka, dia sekadar menyapa alakadarnya.

Sejak saat itu, sikap dan perilaku Budi Harsono yang dikenal dan telah dicap anak paling bengal di sekolah oleh para gurunya berubah 180 derajat. Dia tak pernah lagi datang terlambat masuk kelas, apalagi membolos sekolah dan minggat dari sekolah.

Jika biasanya memilih posisi duduk di bangku paling belakang, sejak saat itu, dia pindah duduk ke barisan paling depan agar mudah menyimak pelajaran dari guru. Menyaksikan perubahan perilaku Budi, guru-guru pun dibuat bingung dan kaget bercampur perasaan heran. Mereka kaget, kok anak yang begitu nakal dan membuat kewalahan para guru telah berubah perangnya.

Betapa tidak, selama ini, saking putus asa dan kewalahannya menghadapi perangai Budi, para guru pernah sempat memperingatkannya tidak bakalan dinaikkan ke kelas tiga bila dia tidak mau mengubah sikapnya. Waktu itu, Budi sama sekali tidak peduli dengan ucapan para guru yang bernada ancaman itu.

Budi membuktikan kepada kedua orang tua dan para gurunya di sekolah bahwa dirinya telah berubah.

Perubahan sikap itu berbuah manis. nilai rapornya pada Caturwulan II Kelas 2 SMP hitam semua, tak ada satupun mata pelajaran yang berponten merah. Tak pelak, perubahan tingkah lakunya ditambah lagi hasil rapor si anak nakal yang bagus semakin membuat para guru di sekolah terheran-heran.

Waktu pun berlalu, Budi akhirnya naik ke Kelas 3, jurusan Ilmu Pasti. Dulu, pembagian jurusan sudah dilakukan sejak Kelas 3 SMP. Ada dua jurusan pilihan pada waktu itu: A untuk jurusan Ilmu Sosial dan B untuk jurusan Ilmu Pasti.

Pada tahun 1961, dia dan adik-adiknya ikut diboyong kedua orang tua ke Manado, Sulawesi Utara, menyusul perpindahan tugas Sang Ayahanda ke kota itu. Di kota itulah dia menjalani jenjang pendidikan SMA-nya sampai selesai.

Di Manado ketika itu orang Jawa memang terbilang sangat sedikit. Meski karakter dan budaya Jawa sangat melekat pada diri dan pribadinya, Budi relatif mampu



BUDI DAN ISTERI DI RUMAH DINAS SAAT BERTUGAS DI TEBING TINGGI ■ mti/dok

menyesuaikan diri dengan lingkungan Manado.

Kebetulan, ada banyak guru yang mengajar di sekolahnya saat itu berasal dari tanah Jawa. Mereka sebenarnya adalah mahasiswa tingkat III/tingkat IV dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, dan Institut Teknologi Bandung (ITB), yang ditugaskan kampusnya masing-masing sebagai guru bantu di sekolah tersebut.

Saat itu, pemerintah membuat kebijakan mengerahkan para mahasiswa perguruan tinggi untuk mengabdikan diri sebagai guru di sekolah-sekolah di daerah-daerah luar Jawa, yang masih kekurangan tenaga pengajar.

Setelah rata-rata 2-3 tahun mengabdikan diri sebagai guru, mereka selanjutnya kembali ke kampusnya masing-masing.

Karena berasal dari Pulau Jawa, dan mungkin dianggap punya kelebihan, Budi Harsono sering dijadikan contoh bagi teman-teman sekelas oleh guru-guru tersebut. Misalnya, bila ada soal-soal di papan tulis, dia yang selalu diminta menyelesaikannya. Secara tidak langsung, dia menjadi terpacu juga untuk tekun dan serius belajar.

Begitu menamatkan jenjang SMA pada 1964, dia sempat mengalami kebingungan. Di satu sisi, dia ingin melanjutkan kuliah. Namun, di lain sisi, dia teringat dan menyadari kemampuan keuangan orang tuanya yang terbatas, apalagi masih ada delapan adiknya yang sangat membutuhkan biaya sekolah.

Dari hati kecil, dia sejatinya ingin sekali melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi, mengingat adik-adiknya masih membutuhkan biaya, niatnya untuk kuliah di perguruan tinggi harus dia kubur dalam-dalam.

Akhirnya, dia menemukan obat bagi kegundahan hatinya, sekaligus jalan keluar atas kondisi dilematis yang dihadapinya, yakni dia harus melanjutkan pendidikan tapi tidak membebani orang tuanya secara ekonomi. Dia sudah bertekad bulat dan memancarkan niat, andaiapun dia kuliah, orang tuanya tidak akan terbebani.

Pikirannya tertuju pada pendidikan di sejumlah akademi milik instansi pemerintah, yang umumnya memberikan fasilitas ikatan dinas kepada para mahasiswanya, seperti akademi bank, akademi PU, akademi kereta api, dsb.

Dalam proses perenungan itulah, dan



BUDI DAN IBUNDA SALAMAH BERJALAN DI BAWAH KERANDA JENAZAH AYAHANDA ARIS MOENANDAR ■ mti/dok

dalam suasana hati dan pikiran yang galau, ingatannya tertumbuk pada Akademi Militer Nasional (AMN). Dia teringat bahwa sekolahnya pernah dikunjungi oleh taruna-taruna AMN. Para taruna AMN memang ditugaskan mengadakan anjungsana ke SMA-SMA yang ada di Manado dalam rangka mensosialisasikan keberadaan AMN kepada siswa-siswa Kelas 3 SMA.

Apalagi, kesan pertamanya ketika itu terhadap penampilan para Taruna AMN nan gagah dan berwibawa dengan baju seragamnya yang khas mendorong Budi untuk mencoba peruntungan. Dia pun kemudian memberanikan diri untuk mendaftar sebagai taruna AMN di kota itu.



SAAT WISUDA DUA PUTERANYA ■ mti/dok

Tes AMN dan Tinggi Badan

Ada peristiwa menggelikan yang dialami Budi saat dia menjalani tahapan tes masuk AMN di kota Manado. Pangkal persoalannya adalah perawakan Budi Harsono yang mungil dan kurus kerempeng. Berat badannya bahkan tidak sampai 50 kg.

Memang semasa sekolah di SMA, kondisi fisiknya tak urung membuatnya didera perasaan minder. Dia merasa keberadaannya dipandang hanya sebelah mata oleh lingkungan.

Diakui olehnya, di satu sisi, perasaan minder dan kurang percaya diri sempat merasuki jiwanya ketika mengikuti tes AMN di Manado. Namun, pada sisi lain, dia justru semakin termotivasi untuk lulus tes AMN.

"Motivasi saya menjadi tentara begitu besar sebab dengan jadi tentara saya bisa menunjukkan keberadaan dan jati diri kepada lingkungan. Dengan menjadi seorang tentara, saya berharap akan ada penghargaan dari lingkungan karena itu berarti saya juga punya kelebihan," tukasnya.

Terkenang kembali saat-saat menjalani proses tes masuk AMN di Manado dulu, Budi mengisahkan bagaimana dia harus bersaing dengan ratusan peserta lain yang memiliki fisik dan postur tubuh lebih ideal dibandingkan dirinya.

Sebagian besar di antara mereka berbadan tinggi-besar dan berperawakan gagah. Kenyataan itu sempat membuat ciut nyali dan semangat Budi Harsono.

Ternyata benar, mungkin saking mungilnya perawakan Budi Harsono, sewaktu menjalani tahap demi tahap tes, tinggi badan dan berat badannya harus diukur kembali.

Agaknya, para penguji yang *nota bene* para perwira TNI masih meragukan bahwa peserta yang satu ini telah memenuhi syarat secara fisik. Bahkan, sewaktu mengikuti tes tahap akhir di hadapan Pantuhir (Panitia Penentu Terakhir) yang terdiri atas sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah, postur tubuhnya masih saja diragukan. Sehingga, untuk meyakinkan diri, Pantuhir meminta agar tinggi dan berat badannya diukur kembali.

Padahal, secara formal, pada tahap Pantuhir tersebut syarat tinggi badan peserta tes tidak lagi diutak-atik atau dipertanyakan. Tapi, mungkin karena sangat meragukan validitas data tinggi badan Budi, salah seorang penguji pada Pantuhir masih meminta ada proses cek ulang. "Coba

tinggi badan dan berat badan Anda dicek lagi," ucap sang penguji tersebut yang ternyata seorang jenderal bintang satu itu, seraya menunjuk Budi.

Apakah tinggi badan Budi memang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan panitia? Menurut Budi, tinggi badannya yang 160 cm memenuhi syarat yang ditentukan panitia waktu itu yakni 155 cm. Mungkin, karena berat badannya yang hanya 49 kg, muncul dugaan kesan seolah-olah tinggi badannya tidak memenuhi syarat.

Dewi Fortuna ternyata berpihak pada tekad yang membaja Budi Harsono untuk menjadi tentara. Dia akhirnya dinyatakan lulus dan termasuk dalam 16 orang peserta tes AMN dari sekitar 600-an orang yang mengikuti tes di Manado.

Selanjutnya, 16 peserta tes asal Manado tersebut harus mengikuti proses tes tahap lanjutan selama satu bulan penuh di kota Bandung, Jawa Barat, persisnya di kawasan Lembang. Setelah tes di Lembang, 16 orang itu akan disaring lagi menjadi delapan orang. Kedelapan orang itulah, peserta asal Manado, yang selanjutnya akan dikirim ke Lembah Tidar di Magelang, guna menjalani pendidikan pembentukan militer selama tiga tahun.

Singkatnya, dari Manado ke Bandung, Budi bersama 15 peserta lain memakai angkutan kapal laut. Setibanya di Lembang, Budi menyaksikan telah berkumpul seluruh peserta tes yang lolos dari daerah asalnya masing-masing, yang akan menjalani tes lanjutan. Selama di Lembang, seluruh peserta kembali menjalani berbagai tes seperti psikotes, tes fisik, tes kesehatan, dll.

Keberuntungan benar-benar menyertai langkah Budi Harsono. Dia termasuk delapan peserta asal Manado yang dinyatakan lulus seleksi tahap lanjutan di Lembang dan akan menjalani proses pendidikan kemiliteran di AMN Magelang, Jawa Tengah.

Sepengetahuan Budi, penetapan jumlah peserta yang lulus dari daerah didasarkan atas rasio antara kebutuhan dan kepadatan penduduk daerah bersangkutan. Jika untuk Manado saat itu hanya ada jatah delapan orang, maka untuk kawasan Pulau Jawa rata-rata 50-an orang yang diterima.

Dituturkan oleh Budi, banyak orang termasuk teman-teman sekolah dan guru yang sama sekali terkejut dan tidak mengira sama sekali kalau dia bisa menjadi tentara,

apalagi mampu menembus persaingan ketat memasuki AMN Magelang.

Tekad membaja seorang Budi Harsono untuk menjadi tentara akhirnya terwujud. Pada tahun 1967, bersama 231 rekan seangkatannya, Budi Harsono dilantik sebagai perwira pertama ABRI dan berhak menyandang pangkat Letnan Dua.

Perubahan Motivasi Hidup

Selain perasaan bangga yang menggelora di jiwa, selama menjalani hari-hari yang keras dan penuh disiplin di Lembah Tidar, Magelang, Budi mengaku pribadinya mengalami banyak sekali perubahan.

Hal yang paling dirasakannya dalam proses pendidikan pembentukan militer itu adalah motivasi hidupnya yang berubah 180 derajat. Mengubah motivasi dan paradigma berpikir orang, ungkap Budi, memang merupakan tujuan terpenting dari pendidikan AMN.

Konkretnya, setiap taruna AMN Magelang yang semula cenderung berpandangan hidup ekonomis-materialistis dididik dan dibina agar orientasi hidupnya kelak semata-mata membela negara dan mencintai tanah airnya.

Mentalitas para taruna AMN diubah dari yang berlatar belakang ekonomi atau sekadar prestise (kebanggaan) pribadi menjadi pengabdikan kepentingan bangsa dan negara.

Selama di Magelang, motivasi awal para taruna AMN untuk menjadi tentara berubah drastis. Mereka disadarkan bahwa tentara mesti mengabdikan pada negara dan berani berkorban membela negara. Budi merujuk pada peng-alaman dirinya sendiri saat mengikuti pendidikan di AMN dulu.

“Seperti saya sendiri, awalnya ingin menjadi tentara karena alasan ketertarikan pada dunia militer yang terkesan gagah dan dihormati lingkungan, dan motivasi ekonomi-material karena kondisi keluarga yang pas-pasan. Setelah menjalani pendidikan beberapa lama di AMN, saya mengalami perubahan orientasi hidup. Saya menjadi sosok tentara yang betul-betul siap membela negara,” katanya.

Dia menekankan, tujuan pokok dari pendidikan pembentukan militer (menjadi perwira ABRI) adalah mengubah segenap motivasi yang terlalu individualistis seperti tampil gagah atau mapan secara ekonomi menjadi sosok pengabdian, pengawal, dan pembela negara.

Dalam pendidikan pembentukan militer, kepada taruna juga ditanamkan kesadaran bernegara dan kesediaan berkorban membela negara. Semua pendidikan militer di negara manapun memiliki tujuan semacam itu.



RESEPSI PERNIKAHAN PUTERA KEDUA ■ mti/dok

Karenanya, lanjut Budi, jika motif seseorang masuk tentara sekadar demi prestise atau mendapatkan keamanan secara ekonomi, bakal rusak tentara Indonesia karena tidak berkualitas.

Kembali ke soal lembaga pendidikan pembentukan militer, Budi Harsono menggarisbawahi, saat ini hanya tinggal sistem pendidikan semacam itu yang mampu membentuk dan memberikan motivasi agar warga negara Indonesia rela berkorban untuk negaranya. Yang mau dan mampu membela negaranya dengan segenap pikiran, jiwa, dan raga.

Pada sistem pendidikan umum juga ada penanaman sikap mental nasionalisme seperti itu, tapi persentasenya tidak sebesar di sistem pendidikan pembentukan militer, yang sejak awal sudah menanamkan kesadaran bernegara, kesediaan berkorban membela kepentingan negara, dan semangat mempertahankan NKRI.

Dia meyakini bahwa nilai kejujuran dan nasionalisme terus menyala dan tertanam di benak dan jiwa para lulusan pendidikan militer meski telah bersosialisasi dengan lingkungan umum.

Menunjuk pengalaman pribadinya, begitu lulus dari AMN Magelang, dia langsung ditugaskan memimpin 30 orang anak buah sebagai Komandan Peleton (Danton) di Batalyon 406 Gombong, Jawa Tengah.

Dia mengaku, idealismenya sebagai orang yang baru selesai digodok dari —“kawah candradimuka”— Lembah Tidar masih sangat tinggi. Apa-apa yang diperolehnya selama masa pendidikan dia wujudkan secara riil di lapangan. Diberi tanggung jawab memimpin 30 orang membersihkan satu tekad besar pada diri Budi Harsono, bagaimana bisa memimpin mereka agar dapat menjalankan tugas dengan baik, mempunyai keterampilan teknis tempur dan perang yang memadai, serta memiliki motivasi tinggi untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara.

Di samping tanggung jawab begitu besar memimpin banyak orang, idealismenya semakin menguat manakala dia bersama pasukannya dihadapkan pada tugas-tugas operasi ke sejumlah daerah konflik, seperti ke Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak, Malaysia (1971) dan dua kali ke Timor Timur (1981 dan 1985).

“Dengan kepercayaan mengemban tugas khusus yang diamanatkan negara, saya dituntut untuk menjadi orang yang bertanggung jawab kepada tugas dan kepada seluruh anggota pasukan yang saya pimpin. Singkatnya, idealisme dan nasionalisme saya yang terbentuk di pendidikan militer tetap tinggi,” ucapnya.

Intinya, kesadaran dan semangat bernegara dan bela negara yang diperoleh selama menjalani penggodokan secara mental, fisik, pikiran, dan kesadaran di Lembah Tidar, Magelang, dulu masih sangat membekas dan terus tertanam pada dirinya bukan hanya kala mengabdikan diri sebagai perwira TNI aktif, tapi juga setelah dia pensiun dari dunia ketentaraan (Purna-wirawan TNI AD).

Dan, sejatinya kesadaran bernegara, kesediaan berkorban membela negara, dan mencintai negaranya sebetulnya tidak hanya dimiliki sosok seorang tentara tapi seharusnya juga dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia.

Mempersunting Gadis Gombong

Setelah lulus dari AMN di Magelang pada tahun 1968, Budi Harsono di-tugaskan di Batalyon Infanteri (Yonif) 406, Gombong, Jawa Tengah, dengan jabatan Komandan Peleton (Danton).

Di tengah keseharian menjalankan tugasnya, hati pemuda Letnan Dua Budi Harsono tertambat kepada seorang gadis cantik, Mut Indayah. Dua sejoli ini dipertemukan Tuhan di lapangan olah raga di depan Mess Perwira Yonif 406.

Biasanya, setiap sore hari, para perwira muda dan prajurit Yonif 406 bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, terutama dengan kalangan

anak mudanya, melalui kegiatan olah raga bersama seperti bola voli dan bulutangkis.

Mess Perwira yang ditempati Budi Harsono kebetulan persis berhadapan langsung dengan sekolah kejuruan (SMEA) tempat Mut Indayah menimba ilmu. Intensitas pertemuan mereka di lapangan olah raga tersebut ternyata menimbulkan benih-benih cinta di antara mereka berdua.

Hubungan kasih pun terjalin. Setelah satu tahun berpacaran, Budi mempersunting Mut Indayah sebagai isteri pada 31 Agustus 1972. Itu berarti, sampai saat ini, Budi Harsono dan Mut Indayah telah melewati –apa yang disebut sebagai— ‘Perkawinan Perak’ (25 tahun).

Ayah Mut Indayah –asli Tegal— adalah juga seorang militer, yang saat itu berdinasi di Batang, Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara, ibu Mut asli dari Gombong.

Seingatnya, selain dirinya ada lima perwira muda lainnya yang berpacaran dengan gadis Gombong. Tapi, dari enam perwira muda ini hanya Budi yang sukses mempersunting gadis Gombong.

Mut Indayah yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi setelah menikah dengan Budi Harsono, di masa remajanya, adalah seorang gadis yang sangat aktif di berbagai kegiatan. Seperti kegiatan kesenian (menari) dan khususnya olah raga (renang, bola voli, dan anggar).

Dari seabreg kegiatan tersebut, anggar jenis floret adalah olah raga yang paling ditekuni Mut Indayah. Gelar juara kerap kali dia peroleh dari pertandingan-pertandingan anggar yang digelar di Jawa Tengah.

Berkat prestasinya yang menonjol di bidang anggar, sewaktu masih kelas 3 SMEA, Mut Indayah terpilih sebagai atlet utusan Jawa Tengah untuk anggar jenis floret pada Pekan Olah Raga Nasional (PON) di Surabaya tahun 1969.

Anggar, kata Budi, bisa dikatakan sudah menjadi bagian hidup Sang Isteri tercinta. Bahkan, meski telah dikaruniai seorang anak, Mut masih aktif mengge-luti dunia anggar.

Pada 1976, ‘kegilaan’ Mut Indayah pada olah raga anggar akhirnya berhenti dengan sendirinya karena, dia harus mendampingi Sang Suami Tercinta (sudah berpangkat Mayor) yang dipindahkan tugas sebagai Perwira Paban Madya di Kodam Bukit Barisan, Medan, setelah delapan tahun bertugas di Gombong.

Saat menyatakan kesediaannya dipinang Budi Harsono, Mut Indayah sangat mema-hami berbagai konsekuensi yang mesti dia lakoni sebagai seorang isteri tentara, terma-suk mengikuti ke manapun dan di manapun Sang Suami ditugaskan oleh negara. Walau demikian, di tempat yang baru, Mut masih aktif bermain bola voli dan bola basket bersama ibu-ibu Persit. □

mti/af

Teladan bagi

Keteladanan sikap dan harmoni dalam keluarga adalah dua hal yang ditonjolkan oleh Budi Harsono selaku kepala rumah tangga.



UMROH BERSAMA KELUARGA (2001) ■ mti/dok

Ada dua nilai kehidupan yang Budi Harsono petik dari pengalamannya semasa mendapat bimbingan dan asuhan kedua orang tuanya. Nilai-nilai itu adalah keteladanan dan kerukunan orang tua.

Dan dua nilai kebaikan itu kemudian dia terapkan juga kepada anak-anaknya, tentu dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Bagi Budi, dua nilai itu sangat diperlukan agar anak-anak dapat bertumbuh dan berkembang dalam suasana yang nyaman.

Secara konkret, sebagai pemimpin rumah tangganya, Budi Harsono senantiasa menanamkan kepada seluruh anggota keluarganya pendidikan moral, seperti nilai agama dan budi pekerti.

Nilai-nilai itu ditanamkan kepada anak-anak sedini mungkin sebab bila diberikan setelah anak-anak besar relatif agak sulit mengubah perangai mereka.

Baginya, pendidikan moral sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi anak-anaknya ke depan. Pendidikan moral sekaligus juga akan membentengi

anak-anaknya dari berbagai pengaruh negatif lingkungan sekitar.

Sebisa mungkin, dia selalu mengajak isteri dan empat anaknya untuk shalat berjamaah di rumah, terutama shalat Subuh dan shalat Maghrib. Gambaran shalat berjamaah (ayah sebagai imam sementara ibu dan anak-anak sebagai makmum) secara tidak langsung membentuk kesadaran dan pemahaman pada keempat anaknya tentang peranan masing-masing.

Sang ayah yang bertindak selaku imam shalat mencerminkan dia adalah sang pemimpin yang mesti dipatuhi dan ditaati, sedangkan ibu dan keempat anaknya yang menjadi makmum shalat merupakan yang dipimpin. Dari shalat berjamaah, kata Budi, seorang ayah bisa menunjukkan keteladannya kepada anak-anaknya.

Sehabis melaksanakan shalat, anak-anak mencium tangan ayah dan ibunya. Itu adalah simbol penghormatan anak kepada kedua orang tuanya. Jadi, hemat Budi, shalat berjamaah bersama keluarga adalah satu media pendidikan moral kepada anak-anak.

Tak berhenti sampai di situ makna dari shalat berjamaah. Dari aktivitas spiritual tersebut akan muncul kesadaran beragama pada anak-anaknya, yang juga akan menjadi fondasi dan bekal hidup mereka dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, seperti lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah.

Keluarga yang rukun dan harmonis pasti memberikan rasa nyaman kepada anak-anak. Sebaliknya, keluarga yang tidak harmonis dan tidak memberikan

Keluarga

kenyamanan berdampak sangat buruk pada perilaku anak-anak. Karenanya, keutuhan dan kekompakan orang tua sangat menentukan perkembangan jiwa dan mental anak-anak.

Pada awalnya, setiap mendapat tugas dari negara ke daerah yang baru (*tour of duty*), dia memboyong keluarganya ke daerah baru tersebut. Namun karena selama satu tahun kadang sampai dua kali berpindah tugas, sementara anak-anaknya sudah mengikuti pendidikan lanjutan, akhirnya dia tidak mengikutsertakan keluarganya ke daerah tugas baru.

Sehingga, sehari-hari sang isteri, Mut Indayah, lah yang memainkan peran sangat besar dalam menanamkan pola pendidikan yang baik dan wawasan yang benar kepada anak-anak, mulai saat mereka kecil sampai akil balikh.

Dia sendiri, karena tuntutan tugas bahkan sering tugas ke luar kota, relatif jarang bertemu dengan anak-anaknya. Paling cepat satu minggu sekali dia baru bisa bertemu dengan keluarga.

Dalam mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti kepada anak-anaknya, Mut Indayah menggunakan kisah

pewayangan sebagai medianya.

Kisah dan cerita perwayangan, seperti *Mahabrata*, mengandung nilai-nilai keteladanan, kebaikan, kepahlawanan, dan termasuk keangkaramurkaan.

Setelah anak-anaknya mulai meranjak besar, Budi Harsono dan Mut Indayah menerapkan pola lain untuk membangun wawasan tentang kehidupan kepada anak-anaknya.

Contohnya, anak-anak diajak berdiskusi tentang sebuah peristiwa hangat di masyarakat. Di kesempatan itu, dia lantas menanyakan

pendapat dan pandangan anak-anaknya tentang peristiwa tersebut. Mereka diberi kebebasan mengutarakan pandangan masing-masing.

Hasil dari pendidikan dan pembinaan yang ditanamkan oleh Budi Harsono dan Mut Indayah kepada keempat putra mereka sangat membanggakan. "Alhamdulillah, anak-anak saya baik-baik semua. Dari aspek pendidikan, pendidikan anak-anak saya tertib.

Dua putra tertua mereka, Budi Indawan dan Sus Budi Indardi sudah menyelesaikan pendidikan sarjana bahkan telah meraih titel S-2. Putra ke-3, Budi Inda Timur Putra, kini berstatus mahasiswa Universitas Parahiyangan, Bandung. Putra bungsu, Budi Inda

Catur Satya, masih bersekolah di salah satu SMU di Bandung.

Dari sisi spiritualitas, mereka tidak pernah lalai shalat. Mereka juga rajin berpuasa senin-kamis dengan kesadaran dan kemauan mereka sendiri, tanpa harus dipaksa," ungkapnya penuh kebanggaan.

Sangat bersahaja nilai keteladanan yang ditanamkan Budi kepada anak-anaknya. Hidup ini semata-mata mencari ridho dari Allah SWT. Yang namanya nasib baik adalah karunia-Nya. Mendapatkan kemudahan hidup misalnya dapat menyelesaikan sekolah dan kemudian mudah mendapatkan pekerjaan adalah pertolongan Tuhan.

Hanya saja, dia berprinsip, pertolongan Tuhan tidak akan datang dengan sendirinya. Pertolongan Tuhan adalah buah dari perilaku kita yang baik. Seperti karena suka menolong orang lain atau lantaran rajin beramal. Jadi, semua itu ada mekanisme timbal-balik dan sebab-akibatnya.

Selain itu, kita akan mendapatkan kemudahan dalam hidup ini bila banyak berserah diri kepada-Nya dan senantiasa mengikuti segala petunjuk-Nya dalam melakoni hidup di dunia ini. "Prinsip melakoni hidup itu saya tanamkan juga kepada anak-anak," tuturnya. □ **mti/af**



BUDI DAN ISTERI BERSAMA CUCU ■ **mti/dok**

Terapkan Disiplin Batin

Meski seorang tentara, budi tidak terlalu kaku menerapkan disiplin militer ke tengah kehidupan keluarganya, terutama kepada anak-anaknya. Dalam arti kata, dia tidak menerapkan disiplin yang ketat dan keras, sebagaimana yang dia jalani di dunia militer, kepada anak-anaknya.

Ayah dari empat orang putra: Budi Indawan, ST., MM, Sus Budi Indardi, ST., MM., Budi Inda Timur Putra, Budi Inda Catur Satya ini justru menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di dalam rumah tangganya, khususnya dalam mendidik keempat anak laki-lakinya. Pun dia tidak memaksakan kehendak kepada anak-anaknya agar mengikuti jejaknya menjadi seorang tentara. Keempat anaknya diberikan kebebasan menentukan masa depannya sendiri.

Pengantun Islam yang taat dan figur Muslim yang sejak dulu sampai kini terbiasa melakoni puasa Senin-Kamis ini berpandangan, disiplin yang baik diterapkan adalah apa yang disebut disiplin batin.

Menurutnya, disiplin batin adalah kesadaran yang tumbuh dari setiap orang untuk mentaati setiap ketentuan, kelaziman, norma dan tata nilai yang menurut keyakinannya baik dan bermanfaat bagi dirinya.

Orang yang punya disiplin batin ini meyakini bahwa apa-apa yang dia kerjakan berdasarkan satu aturan tertentu pasti memberikan manfaat kepada

dirinya. Dengan kata lain, disiplin batin adalah disiplin yang tumbuh dari dalam diri seseorang itu sendiri. Tidak perlu dipaksa, ditakut-takuti, atau diancam dengan berbagai sanksi.

Dia menunjuk contoh, disiplin dalam mentaati waktu. Dalam Islam juga diajarkan, misalnya, melaksanakan ibadah shalat sangat diutamakan tepat pada waktunya dan tertib.

Dengan disiplin, hidup menjadi tertib. Bila hidup tertib maka hidup pun teratur, terencana, dan terprogram. Semua yang teratur dan terencana akan bermanfaat bagi yang bersangkutan.

Hidup yang teratur, terencana, dan terprogram akan membuat nyaman bagi siapa pun pelakornya. Itulah salah satu manfaat bila disiplin menaati waktu.

Budi yang menggemari wayang kulit ini tidak menerapkan disiplin seperti tentara kepada anak-anak. Dia lebih menerapkan sikap keterbukaan, pendekatan kekeluargaan, dan suasana demokratis dalam keluarganya.

Pendekatan kekeluargaan dan saling pengertian, menurutnya, relatif lebih mudah diserap dan diterima anak-anaknya. Dia mendidik anak-anak melalui diskusi dan dialog.

Dia memang kadang dibuat jengkel oleh tingkah laku anak-anaknya. Tapi dia tidak sampai membuatnya marah besar. Dia merasa tidak perlu mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak-anaknya, apalagi sampai memukul fisik mereka. Karena, "Saya tidak menerapkan pendekatan kekuasaan di dalam keluarga," tandas penggemar olah raga tenis, golf, jogging, dan sepak bola ini. □ **mti**

Sosok Budi di Mata Mut Indayah

“Pengalah dan Tidak Suka Konflik”

Banyak suka dan duka yang dialami Mut Indayah selama 34 tahun mendampingi Budi Harsono mengarungi bahtera kehidupan. Di mata wanita kelahiran Gombong, 14 Januari 1952, ini, Sang Suami adalah sosok pribadi yang sabar, *nrimo* (menerima apa adanya), dan bahkan cenderung mengalah hampir pada banyak hal.

“Walaupun suami saya sebenarnya benar, tapi masih dipersalahkan, beliau tetap *nrimo* dan *ngalah* saja. Mungkin itu sudah sifat bawaannya dari kecil yang sering mengalah,” ungkap Mut yang dinikahi Budi pada tahun 1972.

Kendati demikian, sesekali Mut Indayah menjadi kesal karena kesabaran Sang Suami dalam menghadapi orang lain, padahal orang itu menyakitinya. Sehingga tak jarang pula dia mengingatkan Budi agar bersikap tegas.

Penggemar wayang dan penerap falsafah tokoh wayang dalam menamakan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anaknya ini menambahkan, mengalah memang sebuah sikap yang bagus.

Tapi kalau selalu bersikap mengalah, dan terus-menerus diinjak-injak orang lain, lama-kelamaan bakal jadi kalah. Kalau terus-menerus mengalah,



MUT INDAYAH, BERPIDATO ■ mti/dok



BUDI DAN ISTERI PADA PERAYAAN NATAL 2003 & TAHUN BARU 2004 ■ mti/dok

tidak tertutup kemungkinan, kita malah akan dilecehkan.

Jadi, kondisi itu perlu dibetulkan. Caranya? Kita harus mengoreksi, menegur dan kalau perlu memberi tahu agar orang lain mengerti bahwa kita tidak suka diperlakukannya dengan cara demikian. Tujuannya bukan untuk membalas dendam melainkan mengingatkan orang itu agar jangan memperlakukan kita seperti itu lagi.

Mut sering mengeluhkan sikap Budi yang tidak mau mengoreksi orang yang telah memperlakukan dirinya secara salah. Budi lebih memilih sabar dan *nrimo* saja ketimbang bereaksi.

“Tapi, mungkin itulah kelebihan Bapak. Beliau adalah seorang dengan karakter yang tidak mau menciptakan konflik,” aku Mut Indayah.

Berbeda dengan karakter Sang Suami, dia justru selalu berupaya menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya sampai tuntas. Sebab, dia tipe orang yang tidak mau menghindari masalah.

Namun setelah dia merenungkan, Mut mengakui bahwa ternyata prinsip yang diterapkan Sang Suami dalam menjalani kehidupan ada juga benarnya. Dia teringat pada sebuah falsafah Jawa: “*Wong Ngalah Luhur Wekasane. Wong Nrimo Gede Rejekine*”.

Artinya: ‘Orang yang mengalah akan ditempatkan Tuhan pada posisi di atas (luhur). Orang yang pasrah akan

dilimpahi Tuhan dengan rezeki yang banyak’.

“Saya meyakini hanya peranan tangan Tuhan yang bisa menjadikan suami saya mampu meniti karir di militer sampai menjadi bintang tiga. Setelah pensiun pun, Tuhan masih memberi kedudukan kepada suami saya sebagai anggota DPR RI. Selanjutnya, dengan kedudukan tersebut otomatis orang menghormati kita dan tentu saja rezeki akan mengalir dengan sendirinya,” papar Mut Indayah.

Fokus pada Tugas

Pribadi khas yang juga melekat pada sosok Budi Harsono, masih kata Mut, adalah jika sedang mengerjakan sesuatu terutama tugas dari kantor, Sang Suami sangat fokus pada pekerjaannya.

Segegap pikirannya hanya tercurahkan pada tugas. Singkatnya, menyelesaikan tugas adalah nomor satu, sementara isteri dan anak-anak itu nomor dua. Mut sangat menyadari, Budi tipe orang yang amanah dan bertanggung jawab pada setiap tugas yang diembankan kepadanya, terlebih tugas-tugas dari kantor. Bapak berpandangan, tugas harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Sering kali, Budi baru bisa pulang ke rumah pada pukul 2.00 atau pukul 3.00 dinihari karena dia harus lembur menyelesaikan tugas di kantor dan.

Rutinitas Budi seperti itu diterima apa adanya.

“Bapak orangnya cenderung sangat perfeksionis dalam urusan tugas. Bila, misalnya, besok akan mengerjakan sesuatu, Bapak pasti melakukan cek dan ricek apa saja yang harus disiapkan,” katanya.

Mut mengaku dapat memahami dan menerima sikap Sang Suami. Tak pernah sedikitpun terbersit di benaknya untuk memprotes suami karena dia selaku isteri telah dinomorduakan.

Dia tidak pernah bertanya kepada Budi apa yang sedang dikerjakannya sehingga harus pulang larut malam bahkan sampai pagi esok harinya. Meski kadang-kadang dimintai pendapat dan masukan oleh Sang Suami tentang beberapa hal menyangkut tugas kantor, tapi untuk urusan-urusan dinas luar kota, Mut cenderung tidak tahu sama sekali.

Paling diberi tahu, misalnya, Budi ke acara ini dan itu atau pergi ke luar kota mendampingi Panglima TNI atau Kasospol TNI di masa dinas militer. Atau, mendampingi atau mewakili Ketua Umum dalam kegiatan-kegiatan Partai Golkar.

Mut sendiri kebetulan punya kesibukan di Persit dan mengurus anak-anak di rumah. Dan, yang paling mendasar, Mut adalah tipe isteri yang tidak suka menuntut banyak kepada suami, termasuk urusan materi.

“Semua mengalir begitu saja seperti air. Apalagi, dari dulu saya orangnya tidak banyak meminta ini dan itu kepada Bapak. Saya *nrimo* saja. Bagi saya, kami sekeluarga bisa makan saja sudah bersyukur,” ujarnya.

Mut berpegangan pada satu prinsip hidup, dia percaya kepada orang lain 100 persen, apalagi kepada suaminya sendiri. Misalnya, saat membangun rumah, dia pasti memberikan kepercayaan penuh kepada yang mengerjakannya. Kalau ditipu, baginya, itu urusan yang menipu kepada Tuhan. Mut percaya bahwa Sang Suami melaksanakan tugas di kantor dan mengerjakan hal-hal yang positif.



BUDI HARSONO BERPOSE BERSAMA KELUARGA ■ mti/dok

Kadang-kadang Mut sering ditegur oleh Budi karena terlampau mempercayai orang lain. “Kalau percaya sama orang itu jangan sampai 100 persen. Harus ada cadangannya bahwa tidak semua orang seperti Kamu,” kata Mut, mengutip kata-kata Budi.

Nrimo dan Bagja

Lepas dari itu semua, Mut yang mengaku senantiasa menghubungkan segala sesuatu dengan pendekatan religius meyakini bahwa sekarang Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan ‘imbalan’ dan ‘bonus’ atas jerih-payah, ketekunan, dan keseriusan Sang Suami dalam mengemban tugas-tugas selama ini.

Dia sangat bersyukur, Sang Suami masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk tetap punya kegiatan dan tanggung jawab setelah pensiun dari dinas militer.

Ada resep utama Mut dalam membina rumah tangga agar langgeng dan berbahagia. Resep utamanya adalah sabar dan jujur serta memahami pekerjaan dan kegiatan Sang Suami.

“Saya harus *nrimo* dan sabar karena yakin semua yang dikerjakannya

juga untuk keluarga, isteri, dan anak-anak,” kata penganut filosofi hidup: “Kesempatan bukan hanya ada satu kali. Berani melepas kesempatan pertama karena yakin Tuhan pasti memberikan kesempatan selanjutnya”.

Mut menunjuk satu pandangan umum yang sering dipakai orang: ‘Kesempatan hanya datang sekali. Karena itu, kesempatan itu jangan dilepaskan tapi langsung diambil’.

Namun, pandangan umum itu tidak berlaku sepenuhnya bagi dirinya. Terkait dengan filosofi hidup yang dipegangnya itu, dia menekankan, walaupun kesempatan ada di depan mata, dia tidak akan serta-merta mengambilnya. Dia harus menakarnya baik-buruknya lebih dulu.

“Apabila kesempatan itu meragukan, maka saya akan melepasnya. Sebab, saya yakin Tuhan pasti akan mengganti pada kesempatan-kesempatan yang lain,” tandas wanita yang masih tampak energik ini.

Mut Indayah senantiasa mendambakan *bagja* atau nasib baik (keberuntungan) dalam kehidupannya. Menurutnya, *kebagjaan* diperoleh dari daya upaya (usaha) dan perbuatan. *Bagja* bisa terwujud berkat ikhtiar manusia yang bersandar pada nilai keikhlasan kepada Tuhan.

Misalnya, lewat usaha antara lain belajar dengan tekun, bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh bersikap baik kepada orang serta perbuatan antara lain beribadah dengan tekun, jujur, rendah hati dan banyak beramal. Namun ikhtiar tersebut harus didukung oleh keyakinan bahwa ada tangan Tuhan yang menentukan nasib kita. □ mti/af



SERAH TERIMA JABATAN KETUA IKKA DARI IBU MUT BUDI HARSONO KEPADA IBU ANI SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ■ mti/dok

Kesadaran Bernegara dan Bela Negara Mulai Hilang

“Jangan tanyakan apa yang dapat negara berikan kepadamu, tetapi tanyalah apa yang sudah Anda berikan kepada negara.” (Presiden AS John F. Kennedy)

Semangat nasionalisme yang berada di balik makna ungkapan yang populer ke seantero jagat itu agaknya sangat kontekstual dengan kondisi di Indonesia. Kendati demikian, potret negeri ini dewasa ini justru menggambarkan dengan gamblang betapa kesadaran bernegara, kesediaan berkorban membela negara, dan mencintai negara pada warga negara sudah mengalami erosi yang sangat tajam.

Secara obyektif, Budi Harsono menilai faktor penyebab dari profil ironis anak bangsa dewasa ini adalah kekurangan pada sistem pembangunan nasional masa silam. Pembangunan aspek sumber daya manusia (SDM) yang seharusnya mendapat tempat teratas justru kurang menjadi prioritas utama pembangunan jangka panjang alias kurang diperhatikan.

Selama ini, konsep pembangunan SDM dilaksanakan secara beriringan dengan derap pembangunan fisik-material atau pembangunan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, pembangunan SDM tertinggal dari pembangunan ekonomi. Akibatnya, hasil pembangunan SDM dari proses pendidikan kurang maksimal.

Sebagai eksekusi dari hasil pembangunan di bidang ekonomi, SDM bangsa ini yang terbentuk cenderung memiliki sikap, mental, dan perilaku yang materialistis, individualistis, dan pragmatis.

“Setiap orang hanya cenderung memikirkan kepentingannya sendiri. Setiap individu berpikir dan bertindak berdasarkan imbalan apa yang bakal dia peroleh saja. Cara pandang seperti itulah yang dominan merasuki benak SDM kita dewasa ini. Kita bisa rasakan itu,” papar Budi.

Indikasinya, bisa dilihat dari gambaran umum kualitas produk akhir yang dihasilkan sistem pendidikan nasional sebagai media pembangunan SDM. Pembangunan SDM-lah yang semestinya diprogramkan lebih awal.

Memang, membangun SDM bukanlah suatu yang instan. Segala jerih-payah dari apa yang dikerjakan



BUDI HARSONO: KESADARAN BERNEGARA ■ mti/dok

sekarang baru bisa dipetik hasilnya oleh bangsa ini pada 15 tahun sampai 20 tahun yang akan datang.

Sedangkan, yang namanya, membangun SDM haruslah dari awal dan sistematis karena hasilnya baru bisa dirasakan manfaatnya oleh bangsa ini dalam jangka panjang. Berbeda sekali dengan pembangunan fisik, seperti jembatan, jalan, atau gedung perkantoran, yang hasilnya sudah bisa langsung dilihat dan diperoleh hasilnya dalam jangka pendek.

Karena itu, dalam membangun SDM antara lain tentang aspek-aspek kesadaran bernegara dan kesadaran bela negara inilah yang sejatinya perlu dibangun dan ditumbuhkan secara terus-menerus oleh bangsa ini.

Dengan kata lain, bukan hanya aspek intelektualitas dan keterampilan yang dibangun tapi juga aspek budi pekerti dan cinta pada negara. Sekarang hampir tidak ada pendidikan yang memberikan secara maksimal budi pekerti serta kesadaran bernegara dan membela negara.

Akibatnya, rasa cinta kepada negara semakin hari semakin menipis di jiwa warga negara. Belum lagi derasnya pengaruh globalisasi sekarang ini semakin mempengaruhi hilangnya kecintaan kepada negara. "Fondasi bangsa ini sudah keropos!" tukas Budi Harsono.

Padahal, di masa perjuangan bangsa ini merebut kemerdekaan pada tahun 1945, dengan hanya bersenjatakan bambu runcing, para pahlawan kusuma bangsa berani melawan penjajah yang bersenjata lengkap.

Para pahlawan rela mengorbankan jiwa dan raganya karena memiliki kebanggaan dan kecintaan pada negaranya. Mati pun tidak apa-apa. Semangat itu dikawatirkan pada suatu saat akan hilang karena dari hari ke hari terus meluntur.

Semangat dan idealisme itu harus dibangkitkan dan ditumbuhkembangkan kembali, dalam hal ini melalui media pendidikan. Dalam kurikulum pendidikan mesti ada penanaman nilai dan semangat bernegara dan kesadaran bela negara.

'Mengapa saya harus mencintai negara ini?' dan 'Mengapa saya mesti berkorban untuk negara ini?' adalah dua pertanyaan besar yang bisa menjadi pintu masuk penanaman kesadaran bela negara dan idealisme kebangsaan itu melalui setiap jenjang pendidikan.

"Intinya, sejak kecil setiap warga negara yang sedang mengecap bangku pendidikan pada setiap jenjangnya diberikan motivasi untuk mencintai dan bangga kepada negaranya," ucapnya.

Namun membangun motivasi warga negara bukanlah pekerjaan instan. Sebab, membangun motivasi bukan indoktrinasi, melainkan membangkitkan kesadaran eksistensial setiap



BUDI HARSONO BERSAMA AKBAR TANJUNG, SLEMET E YUSUF DAN FAHMI IDRIS ■ mti/dok

warga negara sebagai anak bangsa.

Satu hal yang patut pula digarisbawahi, membela negara ini tidak hanya tugas TNI tapi juga seluruh komponen bangsa ini. Penekanan akan kondisi itu masih sangat kurang pada negara ini. Padahal, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak memberikan kesadaran bela negara kepada warga negaranya.

Bahaya Narkoba, sekadar satu contoh, haruslah dipersepsikan sebagai sebuah ancaman yang sangat berbahaya bagi seluruh bangsa ini. Mengancam generasi muda harapan bangsa dan ujung-ujungnya membuat kemampuan bela negara pada warga negara menjadi rapuh.

Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negaranya dan kesediaan berkorban membela negaranya. Ini yang sangat kurang pada warga negara Indonesia. Itu bisa dirasakan bersama. Tengok saja kiprah sebagian LSM lokal yang cenderung lebih mengutamakan kepentingan NGO-NGO asing yang menjadi donornya ketimbang kepentingan bangsanya sendiri.

Menunjuk fenomena di Korea Selatan, Jepang, dan Cina sebagai salah satu contoh konkret hasil penanaman kesadaran bernegara, Budi Harsono mengatakan, rakyat negara-negara itu dengan penuh kesadaran mengkonsumsi produk dalam negerinya. Bukan dari negara luar. Rakyat Korea Selatan dan Jepang lebih suka memakai mobil produksinya sendiri daripada produksi negara luar.

Perlu disadari, perang di era sekarang sudah bersifat semesta. Setiap negara sudah harus siap berperang. Sekadar ilustrasi, dalam perang modern yang pertama dilumpuhkan adalah pusat-pusat logistik seperti instalasi listrik, jalan-jalan, jembatan,

lapangan terbang. Tujuannya agar negara itu menjadi lumpuh. Kalau sudah lumpuh, mudah untuk dikalahkan.

Bertolak dari hal itulah, dalam konteks Indonesia saat ini, kesadaran bernegara dan kesadaran bela negara harus terus ditumbuhkembangkan kepada setiap warga negara agar, pada gilirannya, mereka memiliki kebanggaan, dan mampu membela negaranya sendiri. Lebih jauh dari itu, mereka mau mengabdikan diri dan bersedia berkorban untuk negaranya. Hanya saja, kesadaran warga negara untuk berkorban akan muncul bila negara (baca: pemerintah) memperhatikan nasib mereka.

Bangkitkan Kepercayaan Rakyat

Bagaimanapun, bertumbuh dan berkembangnya semangat bernegara dan kesadaran bela negara mensyaratkan adanya hubungan timbal-balik antara pemerintah dan rakyat.

Pemerintah tidak bisa sekadar menuntut rakyat tanpa menunjukkan kinerja yang baik, khususnya bahwa apa yang pemerintah perbuat memang semata-mata untuk kepentingan rakyat.

Pemerintah harus mampu membuat rakyat merasakan bahwa pemerintah telah berbuat banyak dan bekerja keras untuk mereka. Rakyat harus merasakan manfaat dari apa-apa yang diperbuat pemerintah sehingga rakyat mau berpartisipasi dalam membangun negaranya.

Ada kesadaran warga negara untuk ikhlas menanggung beban dari derap pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah. Sebab, setiap warga negara tahu bahwa pemerintah berbuat maksimal untuk kepentingannya juga. Ironisnya, dalam hemat Budi, kondisi tersebut masih jauh dari harapan.

Contoh paling konkret, kebijakan

pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Idealnya, rakyat bersedia menanggung beban akibat kenaikan harga BBM tersebut karena rakyat tahu bahwa pemerintah memang tidak punya cara atau jalan keluar lain menyalasi tingginya harga minyak di pasar dunia. Rakyat mengerti bahwa pemerintah berbuat demikian untuk kepentingan semua. Untuk keselamatan bangsa.

Tapi realitasnya ada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan ada miskomunikasi antara pemerintah dan rakyat. Rakyat masih menilai secara apriori kebijakan pemerintah tersebut. Persoalan komunikasi antara pemerintah dan rakyat itu mesti diperhatikan.

Sebab, jalinan komunikasi yang baik sangat berperan dalam menciptakan tumbuhnya kepercayaan rakyat kepada negara. Bila sudah tumbuh kepercayaannya kepada pemerintah, rakyat pun akan mau menanggung beban pembangunan. Sehingga, rakyat memahami pemerintah menaikkan harga BBM dengan alasan yang jelas.

"Tantangan besar bagi pemerintah untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat. Untuk itu, pemerintah harus punya *sense of crisis* dan kepedulian kepada nasib rakyat. Dari situlah baru bisa dibenahi semua," tandas Budi.

Contoh yang lain, ada keinginan pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Rakyat menilai kinerja PLN sendiri masih belum benar. Biaya produksinya masih sangat tinggi. Jadi, sebelum menaikkan TDL, pemerintah sebaiknya membenahi dulu kinerja PLN secara konkret.

"Tumbuhkan kepercayaan pada rakyat bahwa pemerintah betul-betul membenahi kinerja PLN. Lakukan efisiensi, audit dengan baik, turunkan biaya produksi dan sebagainya," ujar Budi Harsono.

Biaya produksi PLN masih sangat tinggi yakni sebesar 11 sen dolar per-KWH. Bandingkan dengan biaya produksi listrik di Malaysia atau Singapura yang hanya 6 sen dolar per-KWH.

Alasannya, PLN masih menggunakan pembangkit listrik yang berbahan bakar minyak. Bandingkan dengan pembangkit-pembangkit listrik di Malaysia dan Singapura yang sudah berbahan bakar gas dan batubara.

Dengan melaksanakan program-programnya pemerintah perlu menumbuhkan kepercayaan rakyat, agar rakyat bersedia menanggung beban secara sukarela dari berbagai kebijakan yang diambil pemerintah.

Budi kembali mengingatkan, semangat bernegara dan kesadaran bela negara bisa tumbuh dengan sendirinya pada rakyat sepanjang ada kepercayaan rakyat bahwa pemerintah memang memperhatikan nasibnya. Akan tumbuh gairah setiap individu

dan masyarakat untuk berkarya, berbuat untuk negaranya.

Hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat akan membuat Negara maju, dan dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran kenegaraan dan kesadaran bela Negara dari setiap individu masyarakat.

"Sekarang, banyak orang yang bersikap apatis. Jangankan memikirkan lingkungannya, untuk mengurus dirinya sendiri saja susah. Padahal, kesadaran bernegara dan bela negara berawal dari kesadaran pada lingkungan terkecil: dari keluarga, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga akhirnya pada negara."

Bangsa Butuh Pemimpin Panutan

Di tengah kondisi bangsa Indonesia yang sedang terpuruk di berbagai bidang kehidupan, Budi Harsono menggarisbawahi, upaya membangkitkan semangat bernegara dan kesadaran bela negara pada warga negara relatif tidak mudah.

Karenanya, bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin yang bisa menampilkan dirinya sebagai tokoh yang bisa dipercaya dan menjadi panutan bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin panutan adalah yang mau dan mampu memberikan contoh teladan.

Pemimpin panutan adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan dengan segala risikonya. Sosok pemimpin yang kuat, berani, dihormati karena perilakunya, dan mampu memberi contoh konkret. Pemimpin yang konsekuen dan konsisten mempraktikkan apa yang dia ucapkan.

Misalnya, ketika Sang Pemimpin memimpin gerakan hidup sederhana kepada rakyatnya, maka dia sendiri harus benar-benar hidup secara sederhana.

Bukan pemimpin yang cari untung dan mengutamakan kepentingannya sendiri. Bukan pula pemimpin yang bicara A tapi kelakuannya B. Pemimpin dengan karakter seperti itu tidak akan laku. Sosok pemimpin yang memiliki mental cari selamat tidak bisa diandalkan membangun negeri ini, dan membawa bangsa ini dari lembah keterpurukan.

Tapi, tragisnya, sejauh ini bangsa Indonesia belum mempunyai sosok pemimpin ideal seperti itu. Tokoh-tokoh panutan sudah punah dan hampir tidak ada lagi figur-figur yang bisa menjadi pemimpin panutan.

Mudah-mudahan di masa yang akan datang muncul pemimpin panutan. Pribadi pemimpin teladan yang berani mengambil risiko untuk membawa bangsa ini lepas dan bebas dari keterpurukan. Pemimpin berkarakter demikian yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. □ **mti/af**

Netra

Sebagai institusi, TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Namun, para perwira TNI harus MELEK POLITIK agar tahu keadaan dan tidak mudah diperalat oleh pihak-pihak dari luar TNI.

Budi Harsono ingin menggarisbawahi satu hal penting menyangkut kiprah TNI di era reformasi dewasa ini. "Adalah suatu pandangan yang keliru bila TNI tidak boleh berpolitik," cetusnya.

Dia memaparkan argumentasinya. Eksistensi sikap politik TNI tercermin dari semboyan dan pedoman hidupnya yakni Sapta Marga. Itu mengisyaratkan bahwa TNI adalah pembela ideologi negara dan pengawal Konstitusi.

"Itu merupakan satu sikap politik dari TNI. Dan, politik TNI pada hakikatnya adalah politik negara. TNI mengabdikan pada ideologi negara dan Konstitusi. Siapa pun yang melawan ideologi negara dan Konstitusi akan berhadapan dengan rakyat dan TNI sebagai bagian tak terpisahkan dari rakyat," ujarnya berargumen.

Dia sangat sepekat bahwa TNI tidak boleh melakukan politik praktis. Kendati demikian, TNI harus mengerti dan memahami dinamika kehidupan politik praktis di Indonesia. Singkatnya, TNI harus 'melek politik' sebab hal itu berkaitan erat dengan tugas utamanya menjaga keselamatan bangsa dan negara.

Jika TNI 'buta politik' dan tidak mengerti dinamika politik yang terjadi di negara ini, TNI akhirnya akan kesulitan dalam menakar apakah situasi yang berkembang terkategori mengancam keselamatan bangsa dan negara ataukah tidak.

Akibat ketidaktahuannya dan/atau ketidakmauannya mengerti dan memahami perkembangan politik praktis tersebut, TNI pun salah dalam mempersepsikan dan tidak akurat dalam mengkalkulasi situasi dan kondisi yang berkembang. Sehingga, akibat yang lebih fatal lagi, TNI ibaratnya akan 'ketinggalan kereta'.

Dengan mengerti dan memahami dinamika politik praktis, TNI relatif bisa mengantisipasi dan melakukan persiapan manakala terjadi situasi yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

"Anggota TNI, terutama para perwira TNI, bagaimanapun seharusnya

lititas TNI

mengerti dan memahami dinamika dan perkembangan politik praktis di tanah air. TNI sepatutnya tidak menjadi pho-bi politik hanya karena adanya stigma TNI di masa lalu. TNI jangan sampai bersikap apatis pada politik sebab TNI bukan sekadar alat,” papar mantan Assospol TNI (1997) ini.

“Ah sudah itu urusan politik, saya tidak mau tahu,” itu satu statemen yang keliru dan dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara, sebab itu artinya anggota TNI memposisikan TNI sendiri sekadar alat yang bisa saja dimanfaatkan oleh pengambil keputusan politik untuk kepentingan praktisnya yang mungkin bertentangan dengan Konstitusi dan Ideologi Negara.

Kita sangat menyadari adanya trauma masa lalu kepada TNI. Kita juga menyadari bahwa kiprah TNI di masa lalu memang ada sebagian yang keliru dan membuat institusi TNI sendiri tidak maju. TNI sudah tidak ingin berpolitik praktis lagi. Namun kita ingin mendudukan persoalan secara proporsional.

Dwifungsi ABRI

Dalam hemat Budi, secara konseptual Dwi-fungsi ABRI hakikatnya adalah sebenarnya merupakan suatu pemikiran yang wajar. Konsep Dwifungsi ABRI pada hakikatnya pengabdian kepada bangsa dan negara secara total, baik di bidang pertahanan dan keamanan (Hankam) maupun bidang non-Hankam.

Dan, dalam implementasinya, konsep Dwifungsi ABRI khususnya pengabdian di bidang Non-Hankam hanya diaktualisasikan pada tataran kebijakan (proses perumusan kebijakan nasional) yang diwujudkan melalui sumbangsih pemikiran.

Pemikiran (ide, gagasan, pendapat, dan pandangan) yang diberikan ABRI tersebut terutama dari sudut pandang Hankam terhadap berbagai kebijakan nasional, sehingga kebijakan tersebut akan sempurna karena telah melalui pertimbangan yang komprehensif.

Namun, dalam prakteknya di lapangan pada masa lalu, ternyata terjadi penyimpangan terhadap konsepsi semula. Ada sebagian yang keliru dalam menerjemahkan konsep

Dwifungsi ABRI.

Konsep Dwifungsi ABRI sebagian telah diterapkan secara tidak tepat oleh pemerintahan pada masa lalu, ABRI dilibatkan dalam tataran pelaksanaan di luar bidang Hankam,



BUDI HARSONO ■ mti/dok

seperti kebijakan mengkaryakan anggota ABRI dengan menempatkan mereka pada posisi politis sebagai gubernur, bupati dan walikota.

“Semestinya, dalam proses pengambilan keputusan kebijakan nasional, ABRI ikut terlibat tapi tidak ikut serta dalam tataran operasionalisasi kebijakan tersebut di lapangan,” ungkap Budi seraya mengingatkan, Jenderal Besar TNI (purn.) Abdul Haris Nasution mengajukan konsep ‘Jalan Tengah’ dilatarbelakangi maksud untuk menempatkan peran ABRI pada tataran kebijakan.

Sehingga, tak aneh, keberadaan unsur TNI di DPR/MPR yang tergabung dalam Fraksi ABRI, yang kemudian berubah nama menjadi Fraksi TNI/Polri, sempat menimbulkan perasaan iri dari anggota Dewan yang berasal dari Parpol.

Dia sangat memaklumi jika muncul pernyataan bernada ketus: “Kok orang yang tidak berkeringat dalam Pemilu bisa melenggang ke Senayan.”

Dia menganalisis, penerapan yang tidak tepat dari konsep Dwifungsi

ABRI di masa lalu tersebut justru merugikan ABRI secara institusional karena ABRI menjadi kurang konsentrasi dalam melaksanakan fungsi pokoknya di bidang Hankam.

Aspek Hankam

Di dalam setiap langkah yang ditempuh bangsa dan negara ini dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya, pemikiran dan pandangan TNI dari aspek Hankam sebaiknya diikutsertakan.

Untuk menyumbangkan pemikirannya TNI tidak harus berada di parlemen (DPR dan DPRD) seperti dulu, yang merupakan wilayah politik praktis.

Sumbangsih pemikiran TNI dari aspek Hankam dalam mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini semestinya ditampung dan diakomodasi. Tujuannya, agar kebijakan nasional yang diambil bersifat komprehensif, bukan hanya pendekatan kesejahteraan tapi juga pendekatan Hankam.

Untuk disadari, tidak ada kebijakan nasional yang tidak terkait dengan aspek Hankam. Di negara maju sekalipun, seperti Amerika Serikat (AS), perspektif Hankam pasti menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan nasionalnya.

Dalam konteks Indonesia, masih kata Budi, untuk menyalurkan pendapat, pandangan, dan gagasannya dari aspek Hankam tersebut, TNI tidak mesti berada di parlemen (legislatif) atau pemerintahan (eksekutif).

Sumbangsih pemikiran ABRI dapat disalurkan melalui Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) atau Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas), misalnya. Lembaga tersebut bisa difungsikan sebagai wadah pemerintah untuk mengakomodasi darmabakti, sumbang saran, gagasan, aspirasi, dan pemikiran dari TNI untuk perkembangan bangsa dan negara ini, khususnya dari aspek Hankam.

Pada hakikatnya, pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan adalah suatu hal yang niscaya dijadikan dasar pertimbangan dalam setiap aspek kehidupan manusia.

Dia memakai ilustrasi dinamika kehidupan sebuah keluarga untuk menggambarkan bahwa aspek kesejahteraan dan aspek keamanan sesungguhnya dua hal yang saling berkaitan.

Simpul kata, lanjut Budi Harsono, pendekatan kesejahteraan dan Hankam adalah kebutuhan hakiki setiap individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dua aspek itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu satu hal yang hakiki. Untuk kelangsungan hidupnya, manusia sejak lahir membutuhkan aspek kesejahteraan dan keamanan. □

mti/af

Jangan Hilangk

Wawancara Letjen TNI (Purn) H Budi Harsono

Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak lahir secara tiba-tiba di saat negara ini sudah mapan. Secara historis, cikal-bakal TNI adalah sebagian rakyat bersenjata yang berjuang mengorbankan jiwa dan raganya mengusir penjajah. Keniscayaan sejarah TNI itu yang tidak boleh hilang. Sebab, itulah jati diri TNI.

Budi Harsono, pensiunan Jenderal Bintang Tiga TNI-AD, menggarisbawahi hal itu. Menurut mantan Ketua Fraksi TNI/Polri DPR-RI (2001-2002) itu, profesionalisme TNI sudah sepatutnya seperti halnya tentara di banyak negara di dunia. Profesionalisme tentara bersifat universal. Tapi, "Jati diri TNI sebagai bagian



BUDI HARSONO BERSAMA ISTERI MUT INDAYAH ■ mti/dok

yang tak terpisahkan dari rakyat tidak boleh hilang, apalagi dihilangkan dengan alasan apapun. Jati diri TNI adalah kebersamaannya dengan rakyat, karena TNI mengabdikan pada kepentingan rakyat," jelas anggota Fraksi Partai Golkar DPR-RI (2004-2009) yang pernah menjabat Assospol Mabes ABRI (1997) itu kepada **Anis**

Fuadi, wartawan *TOKOH INDONESIA*, dalam satu kesempatan bincang-bincang di ruang kerjanya Gedung DPR/MPR, Jakarta, belum lama ini.

Di bawah ini bisa disimak paparan lengkap seputar persepsi, harapan, sekaligus keprihatinan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar (2002-2004) itu ihwal

an Jati Diri TNI

jati diri TNI.

Majalah Tokoh Indonesia (MTI): Bisa Bapak jelaskan apa itu jati diri TNI?

Budi Harsono (BH):

Tentara di setiap negara memiliki ciri khas dalam proses kelahirannya dan berproses sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Tentara harus memiliki kekhasan agar tak mudah dilumpuhkan.

Begitu pun dengan TNI. Proses pembentukannya berawal dari rakyat pejuang bersenjata yang disatukan ke dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR adalah embrio sekaligus bukti TNI adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat. TNI mengabdikan pada kepentingan rakyat. Ada kebersamaan TNI dengan rakyat. Itulah jati diri TNI yang menjadi ciri khasnya.

Jati diri TNI bukan sesuatu hal yang dicari-cari atau direkayasa, tapi sudah terbentuk sejak lahir. Jati diri TNI menyiratkan kebersamaan rakyat dengan tentara. Jati diri inilah yang membuat TNI kuat.

Realitas itu yang tidak boleh dihilangkan dari sejarah bangsa ini. Bangsa ini sama artinya telah melupakan sejarahnya sendiri bila memisahkan TNI dari rakyat. Selamanya, TNI tidak boleh dipisahkan dari rakyat. Bila dipisahkan dari rakyat, TNI tidak punya kekuatan lagi (lemah) karena telah kehilangan jati dirinya.

Jadi jangan sekali-kali memisahkan TNI dari rakyat. TNI tidak punya kekuatan lagi secara batiniah, atau akan kehilangan ruhnya, jika terpisah dari rakyat. Bila TNI kehilangan kekuatannya, akhirnya, bangsa ini akan menderita.

MTI: Idealnya, di manakah jati diri TNI diposisikan pada kondisi bangsa saat ini?

BH: Dalam perjuangan bangsa dan negara ini



BERPOSE BERSAMA PENGURUS IKKA ■ mti/dok

untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional seluruh komponen bangsa dilibatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Setiap komponen bangsa ini punya posisi yang sederajat sesuai dengan peranan masing-masing dalam proses pertumbuhan-kembangan negara ini. Tidak ada yang berposisi lebih tinggi atau paling tinggi.

Profesi guru punya peran sendiri. Profesi dokter punya peran sendiri. Begitu juga TNI punya peran sendiri. Dengan kebersamaan itu, ikatan antar-komponen bangsa menjadi kuat.

TNI adalah bagian yang tak terpisahkan dari rakyat yang mesti diberdayakan pemikirannya dalam setiap langkah yang ditempuh bangsa dan negara ini mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya.

TNI jangan ditempatkan di luar proses perjuangan itu sebab pada hakikatnya TNI berjuang untuk kepentingan rakyat. Sampai kapanpun, TNI punya tanggung jawab menjaga keselamatan

bangsa dan negara ini.

Karenanya, TNI sepatutnya bisa memberikan kontribusi pemikirannya bagi bertumbuhkembangnya bangsa ini, agar TNI benar-benar merasa memiliki dan dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia.

Untuk menyumbangkan pemikirannya TNI tidak harus berada di parlemen seperti dulu, yang *nota bene* wilayah politik praktis.

Dewan Ketahanan Nasional atau Lembaga Ketahanan Nasional, misalnya, bisa difungsikan sebagai wadah pemerintah mengakomodasi darmabakti, sumbang saran, gagasan, aspirasi, dan pemikiran TNI untuk kemajuan bangsa dan negara ini, khususnya dari pengamatan dari aspek Hankam terhadap berbagai konsep kebijakan nasional.

Di negara manapun, tidak ada masalah yang didekati secara sektoral saja. Solusi atas masalah di berbagai bidang kehidupan yang dihadapi bangsa dan negara ini akan komprehensif bila juga memperhatikan dan mempertimbangkan dari

aspek Hankam.

Manfaatkan pemikiran dan pandangan TNI yang konstruktif terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini. Sehingga, pada akhirnya, setiap kebijakan negara diambil atas satu masalah bersifat komprehensif.

Memang, tugas TNI menjaga kedaulatan negara dari pihak luar yang mengancam keselamatan bangsa. Tapi, tanggung jawab TNI bukan sekadar mempersepsikan ada atau tidaknya ancaman musuh dari luar secara fisik, tetapi juga ancaman nonfisik (seperti Narkoba atau pornografi) yang akan melemahkan bangsa ini secara keseluruhan. Sebagai komponen bangsa, tentunya TNI/Polri ikut terpanggil untuk memberikan pemikiran untuk mengatasi berbagai masalah tersebut.

Kita ingin, TNI dapat kembali pada jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional. Jati diri prajurit

TNI inilah yang menjadi sumber kekuatan moral pengabdian prajurit kepada negara dan bangsa.

MTI: Soal tuntutan profesionalisme TNI?

BH: Kita sepakat TNI harus profesional. Ketika kita bicara profesionalisme TNI, kita bicara soal profesionalisme tentara secara universal di dunia.

Misalnya, kemampuan menggunakan senjata (tank, pesawat tempur, kapal laut) atau kemampuan taktis tentara dalam menyerang posisi musuh. Atau, kemampuan tentara menembak. Hal-hal teknis ketentaraan seperti itu *kan* bersifat universal. Saya berpendapat bahwa profesionalisme TNI memang harus ditingkatkan kualitasnya, agar mampu melaksanakan tugasnya menjaga keselamatan bangsa dan negara. Namun kekuatan TNI tidak sekadar kemampuan profesionalisme, namun perlu juga kekuatan mental/spirit perjuangan.

Oleh karena itu, selain profesionalisme, kekuatan TNI juga perlu didukung oleh semangat dan mentalnya sebagai tentara yang berasal dari rakyat dan berjuang untuk rakyat. Kekuatan khusus TNI adalah jati dirinya.

Tentara bagusnya hanya mengurus perang. Tentara yang profesional. Bagianmu itu saja! demikian peran TNI diposisikan. Tapi menurut saya, janganlah TNI dikotak-kotakkan seperti itu sebab akan menghilangkan jati dirinya.

TNI ingin bersama rakyat, bukannya ingin memeralat rakyat. TNI ingin berbakti pada negara ini. TNI ingin mengabdikan pada kepentingan rakyat karena jati dirinya memang berasal dari rakyat.

Karena itu, bila TNI dipisahkan dari rakyat sehingga hilang jati dirinya, maka TNI akan menjadi lemah. TNI tidak punya kekuatan lagi secara batiniah, atau akan kehilangan ruhnya, jika terpisah dari rakyat.

Bila TNI kehilangan kekuatannya, akhirnya, bangsa ini akan menderita. Lemahnya TNI berarti lemahnya bangsa dan



BUDI HARSONO BERSAMA DIN SYAMSUDDIN ■ mti/dok

negara ini.

MTI: Maksud Bapak, profesionalisme jangan sampai menghilangkan jati diri TNI?

BH: Benar. Kekuatan TNI adalah pada kemampuan profesionalismenya dan semangat kejuangannya mengabdikan pada negara. Dan hal ini tidak lepas dari proses kelahirannya.

Sejarah TNI sangat berbeda dengan sejarah tentara di negara-negara lain. Kita tidak bisa menyamakan jati diri TNI dengan tentara di negara-negara lain. Kalau dipersamakan begitu saja, jati diri TNI akan hilang. Padahal di situlah letak kekuatannya.

Dengan semangat kebersamaan, TNI bersatu padu dengan rakyat yang hanya bersenjata bambu runcing mengusir penjajah yang memiliki persenjataan hebat.

Kita ingat sejarah, TNI berperang melawan penjajah, rakyat membantu dengan menyediakan makanan. Itu kan satu proses kerja sama yang secara alamiah terbentuk ketika bangsa ini melawan

penjajah.

Oleh karena itu, kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat jangan sampai hilang. Singkatnya, tanpa rakyat TNI menjadi *nothing*. Tapi, bersama rakyat TNI akan menjadi *something*.

Tapi dalam perkembangannya pada saat ini, TNI cenderung hendak dibuat dan dikembangkan seperti tentara di negara-negara lain. Tentara yang jauh dari rakyat. Padahal kekuatan TNI justru berada pada kebersamaannya dan menyatunya dia dengan rakyat. Menjadi tentara yang profesional boleh, tapi jati dirinya jangan sampai hilang.

TNI berasal dari rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Jadi berbeda dengan tentara di negara-negara lain. Kita harus hati-hati sekali jangan sampai TNI lepas jati dirinya.

MTI: Ada indikasi-indikasi upaya sistematis memisahkan TNI dari rakyat?

BH: Tanda-tanda yang jelas belum ada, tapi gejala ke arah itu sudah mulai

terasa. Dan, kewajiban saya sebagai mantan anggota TNI untuk mengingatkan, bahwa jati diri TNI dan kebersamaannya dengan rakyat harus tetap dilestarikan.

Generasi Angkatan '45 telah mewariskan semangat kebersamaan TNI dengan rakyat. Kebersamaan TNI-rakyat itu jangan sampai hilang. Jati diri TNI itu harus tetap dilestarikan sepanjang zaman oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Bagaimanapun, upaya memisahkan TNI dari rakyat justru potensial melemahkan TNI sendiri. TNI yang kuat bukan hanya pada badannya tapi juga jiwanya. Jiwa TNI yang merakyat yang bersama rakyat dan merasakan/empati pada kesulitan rakyat akan lebih mempererat hubungan TNI dan rakyat.

Meski punya senjata lengkap tapi percuma saja bila jiwa anggota TNI kosong. Sebab, sosok orang yang ada di belakang senjata (*man behind the gun*) itulah yang menentukan.

Prajurit TNI harus merasa nyaman dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

Jadi harus tercipta kondisi yang membuat nyaman yakni dengan selalu mengidentifikasi TNI sebagai bagian dari rakyat.

Konsep jati diri bangsa ini adalah kekeluargaan dan kebersamaan. Kalau kita silau dengan yang ada di negara-negara maju dan lantas menirunya mentah-mentah, dengan melupakan jati diri bangsa sendiri, kita tidak akan menjadi apa-apa. Mengambang di awang-awang.

Kewajiban saya sebagai anak bangsa untuk mengingatkan, semangat reformasi jangankan sampai membuat TNI keluar dari jati dirinya. Saya tidak berprasangka buruk pada pihak-pihak lain. Sekadar mengingatkan.

MTI: Tapi harapan Bapak akan berhadapan dengan sinisme dan trauma pada masa lalu?

BH: Saya sangat menyadari, trauma terhadap eksistensi dan peranan TNI di masa lalu masih menghantui pikiran sebagian besar elit politik di negeri ini, termasuk rakyat sampai saat ini.

Kalau diibaratkan gerakan

ayun ke tengah kembali. Maka kewajiban saya mengingatkan itu. Kalau tidak diingatkan, pasti akan hilang jati diri TNI. Dunia politik bukan bidang TNI lagi.

Lepas dari realitas itu, kita harus memberikan informasi-informasi untuk meyakinkan masyarakat soal jati diri TNI sehingga tidak sampai timbul prasangka negatif bahwa TNI ingin berkuasa lagi atau TNI ingin berpolitik praktis lagi.

TNI ingin bersama rakyat, bukannya ingin memeralat rakyat. TNI ingin berbakti pada negara ini. TNI ingin mengabdikan pada kepentingan rakyat karena jati dirinya memang berasal dari rakyat.

Di masa sekarang, ketika negeri ini dilanda berbagai musibah bencana alam seperti gelombang pasang tsunami, banjir bandang, atau tanah longsor, aparat TNI adalah yang pertama kali turun ke lokasi bencana.

Itu dilakukan karena kecintaannya pada negara dan karena kecintaannya kepada saudara-saudaranya yakni rakyat. Tanpa disuruh, TNI langsung turun membantu saudaranya yang

dan negara sangat membutuhkan tentara yang kuat. Tentara bisa kuat bila ia menyatu dengan rakyat sebagai bagian dari keluarga besar Indonesia. Bukannya ia terpisah dari keluarga besarnya.

Ibarat sebuah keluarga besar, TNI adalah bagian dari keluarga besar itu. TNI dilahirkan dari keluarga itu. Makanya, TNI pasti ikut bertanggung jawab moral terhadap apa pun yang menimpa keluarga itu, termasuk berbagai ancaman terhadap keselamatan hidup keluarganya. TNI bukanlah orang luar.

Jadi sungguh disayangkan bila, semata-mata didorong kepentingan politik, ada pihak yang berusaha memisahkan atau menghilangkan kebersamaan yang sudah terjalin di dalam keluarga itu.

Mungkin terkait trauma pada kiprah TNI di masa lalu. Karena TNI punya senjata sehingga dikhawatirkan TNI akan menguasai semua bidang bila tidak diatur.

Masa lalu kan begitu sehingga tentara bilang A semua juga bilang A.

Trauma itu membuat pikiran yang jernih menjadi hilang karena ketakutan akan muncul lagi kondisi seperti itu. Jangan sampai trauma tersebut menghilangkan jati diri TNI.

MTI: Apa ini sekadar romantisme sejarah ataukah memang ada yang pasti dipetik dengan melestarikan jati diri TNI ini?

BH: Kelestarian jati diri TNI, menurut saya, adalah hal yang positif sampai kapan pun dan tidak boleh tergilas perkembangan zaman. Jati diri TNI itu harus tetap lestari sepanjang zaman dan harus dijaga oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Kebersamaan TNI dan rakyat tidak hanya terwujud secara lahiriah tapi juga dari aspek pemikiran dan batiniah. Pemikiran-

pemikiran TNI dapat menjadi sumbangan pemikiran yang positif terhadap berbagai kebijakan nasional.

Mengapa saya katakan begitu? Karena, semua masalah di semua bidang kehidupan yang dihadapi bangsa dan negara ini akan komprehensif pengamatannya, di samping dari aspek kesejahteraan, juga didekati dari aspek pertahanan dan keamanan.

Di negara manapun, tidak ada satu masalah yang didekati secara sektoral saja. Itu pasti dipandang dari berbagai aspek kehidupan sehingga sifatnya menyeluruh atau komprehensif.

Pandangan dari aspek Hankam diharapkan datang dari TNI sehingga, pada gilirannya, TNI bertanggung jawab atas pertumbuhan, dan merasa ikut memiliki, negara ini.

MTI: Jadi aspek Hankam harus jadi pertimbangan?

BH: Ada dua pendekatan yang secara umum dipakai dalam menyikapi masalah, yakni pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Jadi, pendekatan keamanan adalah salah satu kebutuhan hakiki setiap individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Memang, tugas TNI menjaga kedaulatan negara dari musuh yang mengancam keselamatan bangsa dan negara. Dan tanggung jawab TNI itu bukan sekadar mempersepsikan ada atau tidaknya ancaman musuh dari luar secara fisik, tetapi juga ancaman nonfisik.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan pornografi dan Narkoba, sekadar menunjuk dua contoh, adalah masalah-masalah yang akan melemahkan bangsa ini secara keseluruhan. Menyelesaikan masalah Narkoba dan Pornografi yang sudah demikian merajalela di negara kita ini memerlukan juga pandangan dari aspek Hankam.

Bangsa ini akan memiliki ketahanan yang tangguh bila kondisi fisik and nonfisiknya kuat. Itulah hakekat yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional.



IBU MUT INDAH BERSAMA IBU ANI SBY DAN IBU SUDI SILALAH ■ mti/dok

bandul, dulu TNI bergerak terlampaui ke kanan. Kini bandul terlalu diayunkan ke kiri. Belum bergerak sampai ke tengah, posisi idealnya. Nah, untuk mengembalikan bandul kembali ke tengah atau posisi ideal itu memang membutuhkan waktu dan proses.

Kita ingin bandul meng-

sedang dirundung kemandangan dan kesusahan. Itu implementasi sekaligus refleksi dari jati diri TNI sebagai bagian dari rakyat.

Tidak ada kan TNI kemudian mereklamakan dirinya sebagai garda terdepan negara ini dalam penanganan bencana alam? Itu membuktikan, rakyat

Kita bukan hanya ingin membangun badan, tapi juga jiwa bangsa ini. Kita bisa simak kembali petikan lagu kebangsaan *Indonesia Raya*: Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya.

Percuma saja kalau kita bangun badan bangsa ini dulu jika jiwanya kosong. Kita ini kan sekarang terbalik, yang dibangun badannya (fisik) tapi jiwanya (mental) kurang mendapatkan perhatian. Buktinya, kesadaran bernegara dan kesadaran bela negara sudah mengalami degradasi yang tajam.

Padahal, maksud WR Soepratman menciptakan lagu *Indonesia Raya*, kita harus membangun jiwa bangsa ini lebih dahulu, yang ditandai terbangunnya SDM yang berkualitas. Baru setelah jiwa terbangun, kemudian dibangun badan atau fisiknya.

Sekarang, pembangunan jiwa kurang mendapatkan perhatian. Kita larut dengan perkembangan keadaan. Tanpa daya, hanyut mengikuti arus yang mengalir. Kesadaran mencintai negara ini sudah hampir tidak ada lagi akibat tergilas oleh pragmatisme dan egoisme pribadi atau kelompok.

MTI: Bukankah di partai-partai politik, di pemerintahan dan di parlemen ada beberapa orang pensiunan TNI. Apakah keberadaan mereka belum bisa menjamin bahwa aspek Hankam akan tetap terakomodir dalam proses bangsa ini mencapai tujuan nasionalnya?

BH: Keberadaan para purnawirawan TNI di partai politik dan DPR kan lebih bersifat individual sesuai kemampuannya masing-masing.

Keberadaan para purnawirawan tersebut tentunya berperan cukup positif dalam arti kata sumbangan pemikiran dari aspek Hankam, dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota Dewan.

Namun, karena jumlahnya terbatas dan perannya dilakukan secara individual



BUDI HARSONO ■ mti/af

maka hasilnya kurang maksimal.

Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa aktivitas dan peran purnawirawan TNI adalah sangat tergantung pada kemampuan yang dimiliki dan bagaimana lingkungan dapat menerima dan memerankan purnawirawan tersebut. Dan ini berlangsung secara alamiah.

Purnawirawan TNI adalah juga bagian dari rakyat. Tidak ada pengkotak-kotakan lagi. Setelah pensiun, ia menjadi rakyat sipil biasa dan mendapatkan pekerjaan sesuai tuntutan dari lingkungan yang membutuhkan.

Misalnya, seorang pensiunan TNI mempunyai bakat di bidang politik. Ia bisa menyumbangkan pemikirannya di bidang politik. Bila partai-partai politik menerimanya, itu karena sang pensiunan TNI dinilai punya kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan.

Ada lagi mungkin pensiunan TNI yang ahli di bidang hukum, silahkan saja bila ia mau berkarier di dunia hukum.

Pensiunan tentara bekerja di pabrik atau perusahaan kontraktor karena punya kemampuan di bidang *engineering*. Kalau ia kemudian dipercaya memimpin perusahaan, itu karena ia memang punya kemampuan, bukan karena ia bekas tentara. Lingkungan kerjanya membutuhkannya sebagai pemimpin.

Termasuk di pemerintah-

an. Presiden memilih pensiunan TNI duduk di kabinet dalam kapasitasnya sebagai pribadi-pribadi yang sudah tidak aktif di militer. Pada lingkungannya tersebut, para purnawirawan tentunya akan menekuni bidangnya masing-masing dan otomatis pertimbangan-pertimbangan dari segi keamanan akan menyertainya dalam melangkah.

Di negara-negara maju berlaku hal seperti itu. Semua berjalan dengan sendirinya atau alamiah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Negara itu tidak melihat latar belakang asalnya tapi kemampuannya.

MTI: Pendapat Bapak soal Koter?

BH: Menurut saya, keberadaan Koter memang diperlukan. Karena sistem pertahanan dan keamanan yang kita bangun selama ini adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

Dalam menghadapi ancaman, sistem itu tidak hanya dipersiapkan pada masa perang saja, tapi juga harus dipersiapkan sejak dini di dalam keadaan damai.

Misalnya, bagaimana membina potensi daerah dalam menghadapi ancaman. Karenanya sangat perlu dibentuk suatu komando kewilayahan, entah itu bernama Koter atau apa pun namanya. Kalau istilah Koter mungkin masih menimbulkan trauma masa

lalu, silahkan dibuat nama yang lain.

Tapi yang jelas, komando kewilayahan bagi tentara itu sangat perlu. Komando kewilayahan itu harus diberikan ruang lingkup tugas yang jelas sehingga dia tidak akan masuk ke wilayah pihak lain. Tidak seperti yang berlangsung di masa lalu di mana TNI juga menangani masalah politik.

Oleh karenanya, Koter harus focus pada tugas pokoknya, yakni mempersiapkan daerah yaitu membina potensi kewilayahan menjadi kekuatan kewilayahan untuk menghadapi ancaman.

MTI: Banyak pihak yang menuntut agar sistem Koter dihilangkan?

BH: Kalau komando kewilayahan ingin dihilangkan sama sekali, maka sistem pertahanan dan keamanan kita mesti diubah dulu *dong*. Sishankamrata harus diubah dulu. Sebab, sampai sekarang Sishankamrata tetap disepakati. Tidak berubah.

Kekeliruan implementasi pada masa yang lalu tentunya tidak serta merta menyalahkan system yang dianut. Koter pada masa lalu banyak melakukan tugas-tugas di luar tugas pokoknya ini yang harus kita perbaiki.

Sishankamrata yang kita anut sudah teruji keampuhannya pada masa perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Sishankamrata adalah sistem yang melibatkan seluruh potensi komponen bangsa ini dalam menghadapi segenap ancaman dari luar. Sistem Hankam itu yang kita sepakati dalam UUD 1945. Sampai sekarang masih diakui dan tetap kita lakukan. Konsekuensi kita menggunakan Sishankamrata itu diperlukan komando kewilayahan yang selama ini kita dikenal sebagai Komando Teritorial. Jadi, Koter itu sangat perlu dan harus ada tentu dengan rambu-rambu yang tegas agar apa yang dikerjakannya tidak sampai keluar pagar. Koter itulah yang membina potensi daerah menjadi kekuatan kewilayahan untuk menghadapi ancaman. □ **mti/af**

kreasi etalase web

www.esero.com

WWW DESIGN



Esero

Web Design & Hosting

BACAAN PARA EKSEKUTIF



BERITA | INDONESIA
MAJALAH BERITA PILIHAN

*All in One
One for All*